



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**PEMBANGUNAN BUDAYA MARITIM DALAM MENDUKUNG  
INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA  
(STUDI MASYARAKAT PESISIR BANTUL)**

**RIDWAN**

**NIM: 120160205020**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR**

**SEPTEMBER 2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ridwan  
NIM : 120160205020  
Program Studi : Keamanan Maritim  
Judul Tesis : Pembangunan Budaya Maritim Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Studi Masyarakat Pesisir Bantul)

Tesis berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D  
Laksamana Muda TNI ( )  
Pembimbing II : Ir. Bayu Asih Yulianto, M.Si ( )  
Penguji I : Dr. M. Jurianto, M.M  
Laksamana Madya (Purn) ( )  
Penguji II : Rayanda Barnas, S.E., M.Si (Han)  
Kolonel Lek ( )  
Penguji III : Purwanto, S.E., M.M., M.Si  
Kolonel Laut (P) ( )

Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : September 2018

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam Tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, September 2018

Ridwan

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan  
NIM : 120160205020  
Program Studi : Keamanan Maritim  
Fakultas : Keamanan Nasional  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Fee Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*Pembangunan Budaya Maritim Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Studi Masyarakat Pesisir Bantul)*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai hak cipta/karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, September 2018

Ridwan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.4.1 Manfaat Akademis .....	13
1.4.2 Manfaat Praktis .....	14
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian .....	14
1.5.1 Ruang Lingkup .....	14
1.5.2 Gambaran Desain Penelitian .....	15

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

2.1 Tinjauan Pustaka .....	17
2.1.1 Teori Sea Power .....	17
2.1.2 Teori Budaya Maritim.....	18
2.1.3 Teori Nilai dan Norma.....	21
2.1.4 Konsep Poros Maritim Dunia.....	24
2.1.5 Konsep Fungsi Pemda.....	25
2.1.6 Teori Kesadaran Masyarakat.....	26

2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
2.3 Kerangka Pemikiran .....	30

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

3.1 Desain Penelitian .....	31
3.2 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian .....	32
3.2.1 Sumber Data .....	32
3.2.1.1 Data Primer .....	32
3.2.1.2 Data Sekunder .....	34
3.2.2 Subjek Penelitian .....	34
3.2.3 Objek Penelitian .....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.4 Teknik Pengolahan Data .....	36
3.5 Teknik Analisis dan Interpretasi Data .....	36
3.6 Prosedur Penelitian .....	38
3.6.1 Instrumen Penelitian .....	38
3.6.2 Data Primer .....	38
3.6.3 Data Sekunder .....	38
3.6.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data .....	39
3.6 Jadwal Penelitian .....	39

### **BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	41
4.1.1 Gambaran Umum Kebijakan Poros Maritim Dunia.....	41
4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Bantul .....	44
4.1.2.1 Letak dan Batas Wilayah.....	44
4.1.2.2 Luas dan Wilayah Administrasi.....	44
4.1.2.3 Perikanan .....	45
4.1.2.4 Pariwisata.....	46

4.1.3 Gambaran Umum Kebijakan Pemda Bantul Dalam Bidang Maritim dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Bantul (SKPD) yang terkait Dengan Laut.....	47
4.1.3.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bantul .....	48
4.1.3.2 Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Bantul....	50
4.1.3.3 Dinas Pariwisata Bantul.....	51
4.1.3.4 Dinas Lingkungan Hidup Bantul.....	54
4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil.....	55
4.2.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	54
4.2.1 Pengumpulan Data.....	55
4.2.1.1 Pengumpulan Data Primer .....	56
4.2.1.2 Pengumpulan Data Sekunder.....	58
4.2.2 Pengolahan Data.....	59
4.2.3 Analisis Data.....	64
4.2.3.1 Analisis Satu (intervensi).....	65
4.2.3.2 Analisis Dua (Sosial).....	66
4.2.3.2.1 Elemen Peran ( <i>Role</i> ).....	66
4.2.3.2.2 Elemen Norma ( <i>Norms</i> ).....	71
4.2.3.2.3 Elemen Nilai ( <i>Values</i> ).....	71
4.2.3.3 Analisis Tiga (Politik).....	72
4.2.3.3.1 <i>Disposition of power</i> .....	72
4.2.3.3.2 <i>Nature of power</i> .....	74
4.2.3.4 <i>Rich Picture</i> .....	74
4.2.3.5 <i>System Thinking</i> Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Pemda Bantul dalam meningkatkan budaya maritim.....	76
4.2.3.5.1 <i>Root Definition</i> Budaya Maritim yang ada di Masyarakat Pesisir Bantul.....	77
4.2.3.5.2 Model Konseptual.....	83
4.2.3.5.3 Model Konseptual dan Situasi Problematik Dunia Nyata..	88
4.3 Pembahasan.....	97

4.3.1 Meningkatkan Kesadaran Budaya Maritim Masyarakat Pesisir Bantul.....	98
4.3.1.1 Meningkatkan Kesadaran Nilai Maritim Masyarakat.....	100
4.3.1.1.1 Meningkatkan Kesadaran Nilai Material .....	100
4.3.1.1.2 Meningkatkan Kesadaran Nilai Rohani .....	106
4.3.1.1.3 Meningkatkan Kesadraran Nilai Vital .....	111
4.3.1.2 Meningkatkan Kesadaran Norma Maritim .....	112
4.3.1.2.1 Meningkatkan Kesadaran Norma Kesopanan.....	113
4.3.1.2.2 Meningkatkan Kesadaran Norma Kesusilaan.....	113
4.3.1.2.3 Meningkatkan Kesadaran Norma Agama.....	114
4.3.1.2.4 Meningkatkan Kesadaran Norma Hukum.....	115
4.3.1.2.5 Meningkatkan Kesadaran Norma Kebiasaan.....	116
4.3.2 Meningkatkan Fungsi Pemda Bantul Dalam Memperkuat Budaya Maritim Masyarakat Bantul.....	117
4.3.2.1 Kemampuan Meningkatkan Nilai Maritim Masyarakat .....	119
4.3.2.1.1 Kemampuan Meningkatkan Nilai Material .....	119
4.3.2.1.2 Kemampuan Meningkatkan Nilai Rohani .....	122
4.3.2.1.3 Kemampuan Meningkatkan Nilai Vital .....	126
4.3.2.2 Kemampuan Meningkatkan Norma Maritim Masyarakat.....	127
4.3.2.2.1 Kemampuan Meningkatkan Norma Kesopanan.....	127
4.3.2.2.2 Kemampuan Meningkatkan Norma Kesusilaan.....	127
4.3.2.2.3 Kemampuan Meningkatkan Norma Agama.....	128
4.3.2.2.4 Kemampuan Meningkatkan Norma Hukum.....	129
4.3.2.2.5 Kemampuan Meningkatkan Norma Kebiasaan.....	129

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	132
5.1.1 Meningkatkan Kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul.....	132
5.1.2 Meningkatkan Fungsi Pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul.....	.133

5.2 Saran .....	134
5.2.1 Saran Teoritis.....	134
5.2.2 Saran Praktis.....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 SLOC/SLOT di Indonesia.....	1
Gambar 1.2 4 <i>Choke Point</i> yang ada di Indonesia .....	3
Gambar 1.3 Potensi Ekonomi Maritim Indonesia.....	4
Gambar 2.1 Pemanfaatan Sumber Daya Maritim sebagai Praktik Sosial. Diolah dari Inspirasi Praktik Sosial skema Gidden (Octavian, Yulianto. 2014).....	20
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	30
Gambar 3.1 Kerangka <i>Soft Sistem Methodology</i> oleh Peter Checkland...	38
Gambar 4.1 Proses memasukkan data wawancara ke dalam <i>software</i> NVivo.....	60
Gambar 4.2 Proses pembentukan kategori sesuai dengan rumusan masalah, pertanyaan penelitian1 dan 2 serta pertanyaan operasional.....	60
Gambar 4.1 Proses <i>Coding</i> terhadap sumber data penelitian (hasil wawancara).....	61
Gambar 4.4 Proses Triangulasi dengan melihat berapa banyak <i>coverage</i> Dari salah satu pertanyaan operasional atas seluruh informan dalam bentuk persentase.....	61
Gambar 4.5 Aplikasi NVivo dalam Triangulasi Pertanyaan Penelitian 1 terhadap Informan.....	62
Gambar 4.6 Aplikasi NVivo dalam Triangulasi Pertanyaan Penelitian 2 terhadap Informan.....	62
Gambar 4.7 Aplikasi NVivo dalam triangulasi rumusan masalah terhadap informan.....	63
Gambar 4.8 <i>Rich Picture</i> .....	75
Gambar 4.9 Model Konseptual dan Aktivitas <i>Root Definition</i> 1.....	85
Gambar 4.10 Model Konseptual dan Aktivitas <i>Root Definition</i> 2.....	87
Gambar 4.11 Pemanfaatan Sumber Daya Maritim sebagai Praktik Sosial	

Diolah dari Inspirasi Praktik Sosial skema Gidden (Octavian,  
Yulianto. 2014)..... 99

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1	Data Narasumber Penelitian.....	33
Tabel 4.1	Pilar Kebijakan Poros Maritim Dunia.....	42
Tabel 4.2	Produksi Ikan di Wilayah Kabupaten Bantul dalam Kg.....	45
Tabel 4.3	Jumlah Pengunjung Objek Wisata dan Pendapatan Retribusi Objek Wisata.....	46
Tabel 4.4	Data Narasumber Penelitian.....	56
Tabel 4.5	Analisa Satu (Intervensi): <i>Clients, Partitioners, and Owners</i> ....	65
Tabel 4.6	Kelompok Peran.....	68
Tabel 4.7	<i>Root Definition</i> 1 dan Analisis CATWOE.....	80
Tabel 4.8	<i>Root Definition</i> 2 dan Analisis CATWOE.....	82
Tabel 4.9	Jumlah Nelayan di Kabupaten Bantul.....	112
Tabel 4.10	Perkembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Laut .....	120

## ABSTRAK

Nama : Ridwan  
NIM : 120160205020  
Program Studi : Keamanan Maritim  
Judul Tesis : Pembangunan Budaya Maritim Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Studi Masyarakat Pesisir Bantul)

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas perairan lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Hal ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa dimungkiri bahwa identitas Indonesia adalah negara maritim. Kejayaan Indonesia sebagai negara maritim sudah ada sejak jaman nenek moyang bangsa Indonesia dan terdegradasi sejak jaman kolonial hingga sekarang. Masyarakat Indonesia sudah meninggalkan laut, sumber daya maritim tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Begitu juga Bantul, salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki pantai belum menjadikan laut sebagai sumber penghidupan, sehingga nilai dan norma maritimnya masih rendah. Dalam penelitian ini kesadaran masyarakat dan kemampuan pemda Bantul harus ditingkatkan sebagai pemikiran baru tentang budaya maritim masyarakat Bantul, serta dapat memberikan solusi dan rekomendasi terhadap kalangan regulator dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksana pemanfaatan sumber daya maritim. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang dipertajam dengan *Soft System Methodology* yang dipadukan dengan teori nilai dan norma serta budaya maritim sebagai pisau analisis utama. *Software* Nvivo juga digunakan dalam pengolahan data dengan melakukan koding serta pembentukan kategori dan tema.

**Kata Kunci : Negara maritim, Budaya Maritim, Nilai dan Norma Maritim.**

## **ABSTRACT**

*Name* : Ridwan  
*NIM* : 120160205020  
*Study Program* : *Maritime Security*  
*Thesis Title* : *Development of Maritime Culture in Support of Indonesia as Global Maritime Fulcrum Study on the Coastal Community of Bantul Regency*

*As an archipelagic state, the waters of Indonesia are vaster compared to its land area. Thus, it is only natural to imply that Indonesia's true identity is a maritime nation. Its glory as a maritime state was evident in its long history; nevertheless largely degraded since colonialism until today. For long Indonesians have turned their back from the sea, hardly utilize existing maritime resources, and therefore the maritime has yet to contribute significantly to the prosperity of the people. These also apply in Bantul, one of Indonesia's regencies blessed with coastal lines, yet the sea has not become the people's source of living; thus scarce maritime norms and values. This study found the need to bolster the people's awareness as well as the local government's capacity as a new thinking on Bantul's maritime culture, providing solution and recommendation to the policy makers as well as operators. The study uses qualitative method, supported by Soft System Methodology. Theories on norms and values were applied for the study's analysis process. The Nvivo software was used for data processing through coding and development of categories and themes.*

**Keywords: Maritime State, Maritime Culture, Maritime Norms and Values**

## KATA PENGANTAR

Latar belakang peneliti sebagai Sarjana Sosial mempengaruhi di dalam penulisan ini. Penelitian berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap dunia kemasyarakatan yang saya kaitkan dengan isu maritim di Indonesia, di mana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia sudah lama membelakangi laut dan menganggap laut sebagai penghalang sehingga pemanfaatan sumber daya lau/maritim oleh masyarakat masih rendah.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang dilaksanakan dengan kesanggupan dan harapan dapat memberikan kontribusi tidak hanya terhadap perkembangan studi keamanan maritim Indonesia, namun juga ke kancah regional dan global. Penelitian ini pun tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang secara khusus penulis sampaikan terimakasih dalam kata pengantar ini:

1. Orang tua kami Toto Sudito dan Nani Sumarni yang selalu mendoakan dan semangat serta keyakinan untuk segera menyelesaikan tesis ini serta selalu mengingatkan untuk selalu taat beribadah.
2. Istri, Faridah Tri Maryani serta anak-anakku Alif Rizky Ramandhika, Rasyad Ibad Irsaddudin dan Anaya Nur Azizah yang bangga dengan ayah karena kuliah S2 di Universitas Pertahanan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Letnan Jenderal TNI Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A selaku Rektor Universitas Pertahanan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus ini dengan segala pengalamannya yang luar biasa.
4. Laksamana Muda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D sebagai pembimbing I yang selalu menjadi inspirasi saya dalam menjalani dunia akademis, menjadi penyemangat, pembimbing, dan

pendidik tidak hanya dalam dunia akademis namun juga teladan dalam kedisiplinan dan etika.

5. Ir. Bayu Yulianto, M.Si sebagai pembimbing II juga sebagai sosok muda yang cerdas yang menjadi contoh untuk menjadi akademisi, teman diskusi yang membangun, menjadi inspirasi saya dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Letnan Jenderal TNI Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A. selaku rektor Universitas Pertahanan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus ini dengan segala pengalamannya yang luar biasa.
7. Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT. selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional, Kolonel Purwanto, S.E., M.M., M.Si selaku Sesprodi Keamanan Maritim, dan seluruh staff prodi dan fakultas yang selalu menyemangati mahasiswanya untuk segera menyelesaikan penelitian tesis tepat waktu.
8. Rekan-rekan Universitas Pertahanan Cohort VIII yang sangat luar biasa, kompak semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, dan sukses untuk kehidupan kedepannya.
9. Rekan-rekan mahasiswa prodi Keamanan Maritim Cohort IV yang sudah menjadi teman, saudara dan menjadi keluarga baru selama perkuliahan baik suka maupun duka dengan kenangan yang sangat mengesankan dan menyenangkan, serta sukses dalam profesinya di masa yang akan datang
10. Dan kepada seluruh rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, dan terakhir kepada seluruh pembaca.

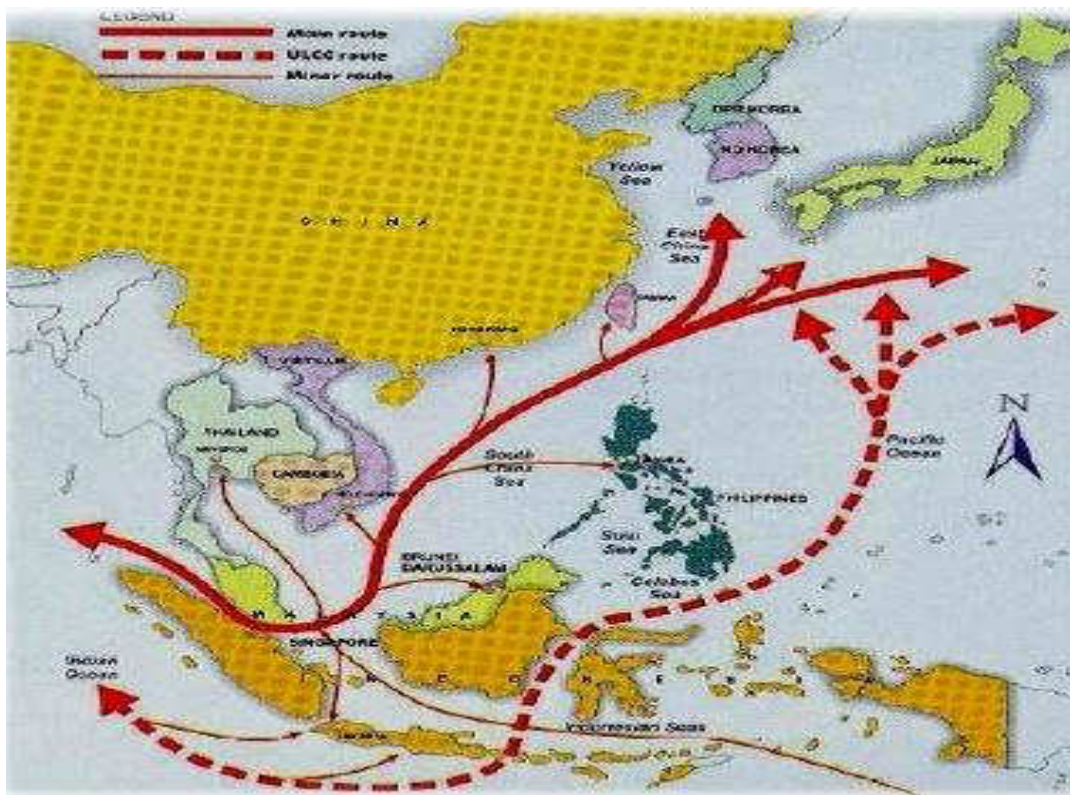
Bogor, September 2018

Ridwan

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.500 pulau (Pushidrosal, 2017). Hal ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa dimungkiri bahwa identitas Indonesia adalah negara maritim. Secara letak geografis Indonesia juga sangat strategis yang berada diantara dua benua dan dua samudera, di mana setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia melalui *Sea Lanes of Communication* (SLOC) serta *Sea Lines of Trade* (SLOT), seperti pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.1 SLOC/SLOT di Indonesia**  
(Sumber: Sridewikuntarti, 2015)

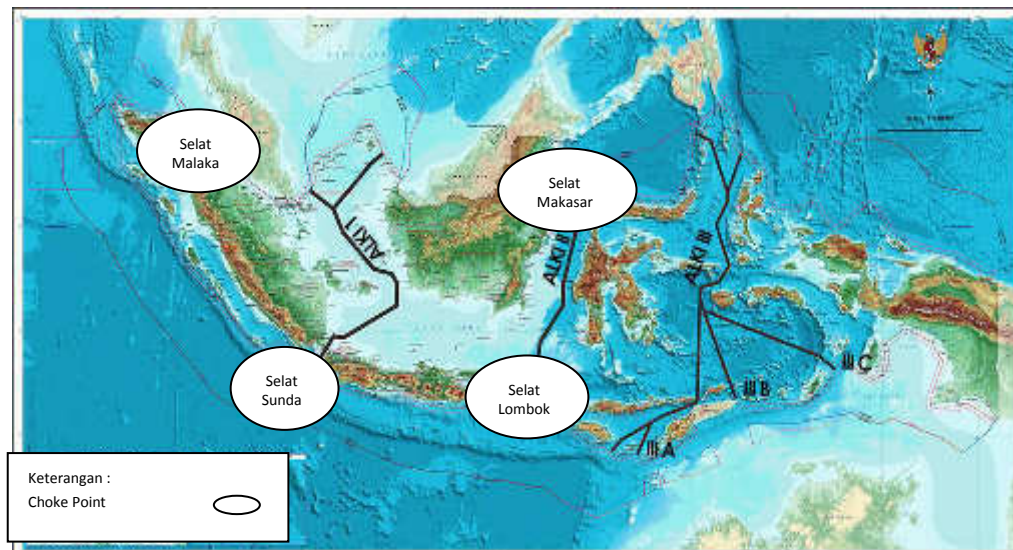
Terdapat tiga prospek peluang emas bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, makmur, aman dan sejahtera bahkan bisa menjadi

negara *superpower* dunia apabila luas wilayah yang dimiliki dan letak strategis dikelola dengan baik dan benar, diantaranya:

**Pertama** pengakuan negara kepulauan (*Archipelagic State*) oleh dunia internasional yang dideklarasikan pada tahun 1982 dalam konvensi hukum laut PBB ke-III tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam kondisi tertentu, UNCLOS menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di suatu negara sejauh 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. maka terjadi perubahan luas laut Indonesia jika digabungkan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hampir 2/3 luas keseluruhan wilayahnya atau  $\pm 5.877.879 \text{ km}^2$  (Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin, 2013) di mana di dalamnya merupakan hak secara hukum untuk mengelola atas kekayaan alamnya. Dari pengakuan ini tentu akan berimplikasi kepada aspek ekonomi di mana nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat beserta sumber daya laut lainnya, dari aspek politik dengan diakuiinya Indonesia sebagai negara kepulauan maka banyak negara-negara di dunia yang menginginkan melakukan hubungan baik dan kerjasama dengan Indonesia dan aspek keamanan pertahanan Laut merupakan alat pemersatu bangsa, bukannya pemisah antar pulau-pulau, karena laut dapat digunakan untuk komunikasi dan transportasi. Selain itu, laut juga bisa dijadikan pertahanan negara yang kuat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada hak kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, serta pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

**Kedua** prespektif geopolitik, geostrategi dan geoekonomi pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Amerika dan Eropa berpindah ke poros Asia Pasifik (Timur Tengah, Asia Tenggara dan Asia Timur), di mana Amerika

Serikat dan Eropa sudah tidak lagi mendominasi perekonomian di dunia tetapi sudah mulai muncul negara-negara super power di Asia terutama Cina, India dan Rusia yang pada masa perang dingin merupakan pesaing dari Amerika dan Eropa. Dengan beralihnya poros ini tentu sangat menguntungkan Indonesia jika mampu memainkan dengan keuntungan posisi strategisnya di mana 9 dari SLOC dan SLOT yang menjadi *choke point* di dunia terdapat 4 di Indonesia diantaranya Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makasar, pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.2 4 Choke Point yang ada di Indonesia  
(Sumber : Diolah Penulis)**

Dengan adanya 4 *choke point* ini merupakan bagian penting dari jalur ekonomi dunia di mana ribuan kapal membawa aset ekonomi hampir senilai USD 13.000 trilyun per tahun.

Untuk menghadapi tantangan ini maka presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan Indonesia sebagai negara maritim di mana negara-negara di dunia mempunyai kepentingan vital Indonesia. Kewajiban Indonesia sebagai negara yang menjadi jalur perdagangan dunia berkewajiban (*Littoral State*) menjamin terciptanya stabilitas keamanan di laut Indonesia. Untuk menjamin terciptanya stabilitas keamanan laut di Indonesia diperlukan TNI Angkatan Laut yang besar, kuat dan profesional.



kesejahteraan yang harus kita manfaatkan dan dikelola dengan baik serta harus kita jaga keamanannya.

Sayangnya dari keuntungan negara kita sebagai negara kepulauan dan memiliki posisi yang sangat strategis tidak dikelola dan dipelihara dengan baik dan benar bahkan dirusak, dicuri dan dicemari dengan melibatkan bangsa lain. Dari data sensus penduduk tahun 2010, dari 237.566.363 penduduk hanya 2.313.006 penduduk yang bergelut di bidang maritim dan sampai saat ini masih belum ada perubahan yang signifikan. Kualitas dan kuantitas sumber daya maritim mempunyai pengetahuan dan menguasai teknologi masih jauh dari cukup, rendahnya tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan oleh nelayan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan daerah terpencil lainnya mengindikasikan kurangnya kesungguhan bangsa Indonesia menjadikan laut sebagai hari depan bangsa, begitu juga pariwisata maritim belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal.

Dari aspek sejarah perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan sendiri diawali dari nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dulu sudah menggunakan dan memanfaatkan laut untuk mendukung kepentingannya. Hal ini dapat dilihat masa awal (abad I-XIII) pergerakan manusia Austronesia ke Asia tenggara karena melewati laut maka dapat dikatakan bahwa bangsa Asia Tenggara merupakan pelaut yang ulung (Ricklefs et al, 2013). Kerajaan Sriwijaya (Abad VII-XIII) menguasai lalu lintas perdagangan antara India dan Cina, serta menduduki Semenanjung Malaya, Jawa, dan Borneo di mana abad ke-8 Sriwijaya sudah mewajibkan setiap kapal yang melalui Selat Malaka untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan bawahan Sriwijaya. Majapahit (Abad XIII-XV) mencapai masa kejayaannya abad ke-14, dibawah kepemimpinan Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada (Wolters, 2011). Politik ekspansi Gajah Mada yang meliputi wilayah Indocina sampai India bisa dilakukan dengan dimilikinya armada laut yang kuat. Samudera Pasai (Abad XV-XVI) adalah masa kejayaan kerajaan Islam Nusantara (Reid, 2011)

Sejak zaman Kolonial (Abad XVI-XX) di sinilah awal mulai degradasi kemaritiman di Indonesia. pada tahun 1670 VOC kota-kota pelabuhan di

pesisir utara Jawa dikuasai dan dikontrol oleh mereka dan akhir abad ke-17 hampir semua pelabuhan di Nusantara dikuasai oleh kolonial Eropa diantaranya Belanda, Portugis, Inggris dan Spanyol. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bercocok tanam, tetapi ada segi positifnya yang didapat dari Kolonial Belanda yaitu *transfer of technology* terutama teknologi perkapalan.

Setelah kemerdekaan di mana Indonesia lepas dari kolonial Belanda, Wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Setelah itu muncullah ide Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km<sup>2</sup> menjadi 5.193.250 km<sup>2</sup> dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS* 1982). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (Negara Kesatuan Republik Indonesia) .

Dengan pengakuan Internasional Indonesia sebagai negara kepulauan maka seharusnya pemerintah segera mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim, tetapi kenyataannya tidak demikian pemerintah masih belum memberikan perhatian terhadap laut, bahkan sampai saat ini. Adapun kebijakan terhadap maritim era penguasa pemerintahan di Indonesia

diantaranya: era Presiden Sukarno dibentuk ALRI dan Menko Maritim dengan menterinya Ali Sadikin. BJ Habibie sebagai Menristek 1996 di Makasar membacakan pidato presiden Suharto yang dikenal dengan pembangunan “Benua Maritim Indonesia”. Setelah menjadi tahun 1998 Presiden Habibie mendeklarasikan visi pembangunan kelautan Indonesia dalam deklarasi “Bunaken” serta membentuk Dewan Kelautan Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid 1999 menyatakan komitmennya pembangunan di bidang kelautan diwujudkan dengan dibentuk Departemen Eksplorasi Laut dan pada tahun 2001 berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Presiden Abdurrahman Wahid juga mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai hari Nusantara berdasarkan Keppres No. 126 tahun 2001 oleh Presiden Megawati. Presiden Megawati juga pada tahun 2001 yaitu Seruan Sunda Kelapa menyatakan azas *Cabotage* adalah kebijakan fundamental bagi pembangunan industri maritim nasional (Limbong, 2015). Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan cita-cita Indonesia sebagai negara maritim dengan strateginya Poros Maritim Dunia (PMD).

Ide Indonesia menjadi negara maritim diawali dari visi pemerintahan Joko Widodo yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” dengan 7 misi, diantaranya misi no.3 yaitu “Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan misi no.6 mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dengan program prioritasnya yaitu Nawacita. Prioritas pembangunan no.3 dari nawacita adalah “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” dari sini sudah jelas bahwa pembangunan dimulai dari masyarakat pesisir.

Untuk memperkuat tujuan Indonesia sebagai negara maritim maka dibuatlah Visi PMD dan disampaikan oleh presiden Joko Widodo ke dunia internasional di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) di Nay Pyi Taw, Myanmar. Sebagai visi pemerintahan, dengan

menjadikan sektor maritim sebagai faktor utama, panduan, atau penentu, sekaligus tujuan pembangunan kabinet kerjanya. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD maka dibuatlah lima pilar utama yaitu: Membangun kembali budaya maritim Indonesia; menjaga dan mengelola sumber daya laut; memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; melaksanakan diplomasi maritim; dan membangun kekuatan pertahanan maritim.

Berdasarkan sejarah di atas budaya maritim bangsa Indonesia menjadi pokok permasalahan di mana kita ketahui mulai memudar sejak pendudukan kolonial Eropa dan sejak kemerdekaan pemerintah melalui kebijakannya belum ada yang secara serius mengelola sumber daya maritim secara baik dan benar. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi (Tubbs, Steward L, .2001). Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tidak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Budiman Joko Said (2016) mengatakan maritim adalah merupakan nomenklatur yang sangat luas jika dibandingkan dengan nomenklatur kelautan atau bahari. Nomenklatur bahari sangat identik dengan budaya atau orientasi suatu bangsa yang menggantungkan diri pada laut sedangkan nomenklatur kelautan sangat identik dengan fisik atau sumber daya dari laut sedangkan nomenklatur maritim seluruh proses pemanfaatan sumber daya, infrastruktur, budaya, aktivitas ekonomi, pertahanan, keamanan, serta seluruh hal yang memiliki korelasi dengan air sehingga tidak hanya terbatas dengan laut tetapi meliputi pula danau dengan sungai (Mardani, 2017).

Budaya maritim adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang berkiblat kepada laut/air/maritim

Budaya maritim merupakan pilar pertama dan merupakan pondasi bagi pilar-pilar lainnya. Budaya maritim merupakan identitas dari bangsa Indonesia di mana laut dapat memberi kebanggaan semangat dan jiwa maritim untuk mengelola, mengolah, mengamankan dan melestarikan laut yang kaya menjadi ruang hidup dan ruang juang rakyat Indonesia demi kedamaian dan kesejahteraan rakyatnya. Jika kita lihat hubungan pilar pertama yaitu budaya maritim dengan pilar lainnya dapat dilihat sebagai berikut budaya maritim menjadi pilar utama dari pilar-pilar lainnya di mana pilar ini menjadikan pondasi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dan PMD. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, maka cara hidup dan pola hidup yang berkembang dalam masyarakat yang berhubungan dengan kemaritiman sehingga menimbulkan sistem nilai yang positif dan norma yang mengatur untuk bertingkah laku peduli terhadap laut itu sendiri serta pemanfaatannya.

Pilar kedua yaitu pemanfaatan sumber daya laut. Dengan membangun budaya maritim maka masyarakat Indonesia menganggap dan menilai bahwa laut adalah sumber penghidupannya karena memiliki kekayaan yang sangat luar biasa di dalamnya harus dimanfaatkan dengan baik, oleh karena itu pemerintah harus membuat norma, aturan dan kebijakan yang mendorong untuk pemanfaatan sumber daya laut secara maksimal.

Pilar ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut terbangunnya budaya maritim maka masyarakat Indonesia menilai laut bukan sebagai penghalang tetapi sebagai pemersatu dengan pulau lainnya sehingga terjadi konektivitas yang erat dan rutin dalam melakukan hubungan baik perdagangan maupun kerja sama dengan pulau lainnya.

Pilar keempat yaitu diplomasi maritim terutama dengan negara-negara lain yang berkepentingan dengan Indonesia lewat laut maka harus dibangun terlebih dahulu kepedulian atau *mind-set* baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia bahwa laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi Indonesia dalam hal kedaulatan, keamanan negara dan sumber daya yang ada di dalamnya. Karena hal ini bisa menimbulkan konflik baik dengan negara lain seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.

Pilar kelima adalah sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menangkal segala ancaman baik militer maupun nir militer maka dengan budaya maritim maka akan mengutamakan bahwa kekuatan pertahanan dan keamanan di laut untuk menangkal ancaman terhadap NKRI harus diutamakan sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah keamanan dan pertahanan di laut menjadikan prioritas yang paling utama.

Untuk mendukung kebijakan PMD, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan HB X dengan Visi dan Misinya menjadikan Pantai Selatan Yogyakarta sebagai halaman depan DIY dari sini dapat dilihat bahwa pembangunan kedepan diutamakan dilaksanakan di wilayah selatan Yogyakarta yang secara langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia, dan akan menselaraskan dengan kebijakan pusat yaitu pembangunan di sektor maritim. Fasilitas akses jalan yang telah dibuat oleh pemda Bantul bekerjasama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar memudahkan akses masyarakat dengan sumber daya maritimnya yaitu pembangunan infrastruktur jalan di jalur selatan baru selesai dibuat dan pembuatan jembatannya yang masih dalam proses, begitu juga pembangunan lapangan terbang di Kulon Progo diharapkan mampu mendorong berkembangnya pariwisata dan perikanan yang ada di Bantul (Bappeda Bantul. 2017). Oleh karena itu untuk mendukung Yogyakarta Selatan sebagai etalase DIY Pemda Bantul mengeluarkan Perda nomor 04 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Bantul tahun 2010–

2030, wilayah selatan Bantul diperuntukkan wilayah pertanian dan ekowisata. Pariwisata di pesisir selatan Bantul terutama pantainya menjadi tujuan utama pembangunan sektor maritim dalam mendukung PMD.

Undang-undang no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditindaklanjuti dengan Program pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Bantul diarahkan untuk mencakup aspek: (1) keterpaduan tata ruang daratan dengan wilayah pesisir dan kelautan dengan pilar program kawasan lindung, konservasi dan pemanfaatan, (2) pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan pada sumber daya alam dan berbasis masyarakat, dan (3) pembentukan kelembagaan yang kuat (Bappeda Bantul, 2017).

Kabupaten Bantul adalah suatu kabupaten di bawah provinsi Yogyakarta dengan garis pantai sekitar 17 km dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki potensi sumber daya perikanan dan keindahan alamnya, serta budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Masyarakat Bantul juga merupakan masyarakat yang berada di bawah kekuasaan keraton Yogyakarta yang sangat memegang teguh budaya sedekah laut (labuhan), tetapi budaya sedekah laut yang dilakukan oleh keraton tidak menunjukkan bahwa mereka sebagai masyarakat pelaut tetapi cenderung membuat masyarakat pesisirnya takut untuk pergi ke laut, hal ini diduga pengaruh propaganda kolonial Belanda dalam mendegradasi jiwa maritim bangsa Indonesia dengan mitos Nyi Roro Kidul sebagai penguasa laut selatan yang jahat dengan sering meminta tumbal manusia, yang sangat berbeda dengan kabupaten tetangganya yaitu Cilacap yang mempunyai tradisi melaut yang cukup kuat.

Nilai masyarakat pesisir Bantul terhadap laut harus dirubah di mana di laut tidak ada lagi istilah penguasa laut yang menakutkan tetapi di laut terdapat sumber daya yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga penguasa laut (Tuhan) merupakan sosok yang baik di mana memberikan rezeki, keselamatan dan keindahan alam. Dengan

demikian masyarakat pesisir Bantul mempunyai budaya maritim baru dengan nilai dan norma baru yang ada di dalamnya.

Untuk mengembalikan budaya maritim yang sudah ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia yang terdegradasi sejak jaman kolonialisme Belanda sampai sekarang maka bangsa Indonesia harus membangun kembali budaya maritimnya, Begitu juga di pantai selatan Bantul. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti telah meneliti tentang budaya maritim yang ada di masyarakat pesisir Bantul dengan kebijakan pemerintahnya yang berjudul "Pembangunan Budaya Maritim Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Studi Masyarakat Pesisir Bantul)."

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mencermati masalah di atas yakni degradasi budaya maritim masyarakat dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung dalam pembangunan budaya maritim dikarenakan nilai mereka terhadap maritim masih sangat rendah baik secara material maupun rohani sehingga aturan-aturan yang dibuat tidak mendukung terhadap pemanfaatan sumber daya maritim, oleh karena itu yang menjadikan objektif penelitian ini adalah mencoba mencari nilai dan norma maritim yang ada di masyarakat pesisir Bantul. Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut "Bagaimana membangun budaya maritim masyarakat pesisir Bantul sehingga sumber daya maritim mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat baik jasmani maupun rohani dan memberikan dukungan terhadap kebijakan Poros Maritim Dunia"

Saran terbaik dengan merumuskan bagaimana memilih untuk pertanyaan riset menjadi panduan dalam proses pencarian data dan analisis penelitian, diturunkan dengan pertanyaan penelitian:

- a. Bagaimana meningkatkan kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul?
- b. Bagaimana meningkatkan fungsi pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul?

### **1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini penting dilakukan sebagai rekomendasi dan pemikiran baru bagi budaya maritim di Indonesia (khususnya di Bantul), melihat masyarakatnya belum sadar akan manfaat dari sumber daya maritimnya.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan dari penelitian dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir Bantul terhadap sumber daya maritimnya sehingga mampu memberikan nilai yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Untuk menganalisa cara meningkatkan kemampuan pemda Bantul sesuai fungsinya dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara spesifik yang terdiri dari dua aspek, yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemikiran baru dalam bidang sosiologi maritim yang ada di Indonesia. Budaya maritim merupakan salah satu aspek keamanan maritim di mana karakteristik dari masyarakat dan karakteristik pemerintahnya harus berorientasi maritim. Kesadaran masyarakat pesisir Bantul terhadap pemanfaatan sumber daya maritim harus tinggi sehingga budaya maritim dapat tercipta, begitu juga kemampuan pemda Bantul sesuai fungsinya harus mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kontribusi akademis juga sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan tentang budaya maritim masyarakat pesisir Bantul serta dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat praktis kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemda Bantul tentang bagaimana membangun budaya maritim di wilayahnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui laut.

## 1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

Uraian ruang lingkup dan gambaran desain penelitian ini, sebagai berikut:

### 1.5.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dibatasi membahas mengenai meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir Bantul terhadap pemanfaatan sumber daya laut serta meningkatkan kemampuan pemda Bantul sesuai fungsinya harus mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya lautnya oleh masyarakat pesisir Bantul sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian (bab) meliputi:

**Bab 1 Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.

**Bab 2 Tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran**, berisi uraian tinjauan pustaka berupa uraian konsep dan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan yang terdiri dari konsep *sea power*, nilai dan norma, teori budaya maritim, konsep fungsi pemda, konsep PMD, teori masyarakat pesisir, teori kesadaran dan teori kemampuan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dan kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini.

**Bab 3 Metodologi penelitian**, berisi uraian tentang metode penelitian yang meliputi sumber data/subjek/objek penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian yaitu teknik pengumpulan melalui informan

penelitian dan tinjauan pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan *soft system methodology* (SSM) dan aplikasi NVivo serta menjabarkan hasil wawancara dan temuan melalui cara reduksi data, penyajian data dan untuk penarikan kesimpulan.

**Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan**, berisi uraian data hasil penelitian dan pembahasan atau analisis berdasarkan teori, kebijakan dan peraturan Bupati tentang perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, penelitian sumber daya maritim, nilai dan norma maritim masyarakat pesisir Bantul.

**Bab 5 Kesimpulan dan Saran**, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi sebagai upaya membangun budaya maritim yang dilakukan oleh pemda Bantul untuk mendukung PMD.

### 1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan kualitatif yang dipertajam dengan *Soft System Methodology* (SSM). Penelitian dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir Bantul dalam memanfaatkan sumber daya maritimnya serta meningkatkan fungsi pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul sehingga bernilai bagi masyarakatnya.

Sumber data, subjek dan objek penelitian dengan penjelasan mengenai jenis data yang diambil baik primer yaitu melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait penelitian ini ataupun data sekunder yang berupa data dan dokumen terkait yang membahas tentang kesadaran masyarakat Bantul terhadap pemanfaatan sumber daya maritimnya serta fungsi pemda Bantul dalam memperkuat kesadaran pemanfaatan sumber daya maritimnya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen kualitatif, dan materi audio visual

kualitatif, serta analisis data melalui tahapan SSM yang juga dibantu dengan menggunakan NVivo dalam pengolahan data. NVivo mempermudah kategori data, triangulasi data, dan penyajian data dalam grafik. Penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data dan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data dan jadwal penelitian.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam memahami dan mengetahui penelitian yang dilakukan selanjutnya peneliti berusaha menyampaikan kerangka atau landasan teori, konsep dan peraturan daerah yang digunakan terkait topik pembahasan, mengkaitkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan serta menggambarkan kerangka pemikiran penelitian.

##### 2.1.1 Teori Sea Power

Poros Maritim Dunia (PMD) dengan lima pilarnya diantaranya membangun budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim dan membangun kekuatan pertahanan maritim sesuai dengan terminologi “*sea power*” dari Alfred Thayer Mahan dalam bukunya yang berjudul *The Influence of Sea Power Upon History: 1660-1783*. Mahan menjelaskan terdapat 6 elemen pokok yang menjadikan modal utama suatu negara untuk mengembangkan kekuatan lautnya (Marsetio, 2014). Kekuatan tersebut diantaranya:

- a. Letak geografis (*geographical position*) merupakan elemen yang paling signifikan di mana letak geografis yang strategis dapat memberikan keuntungan terutama sebagai jalur perdagangan lewat laut.
- b. Bangun muka bumi (*physical conformation*), negara yang memiliki bangun berpulau-pulau mampu memberikan kesejahteraan jika dibangun pelabuhan-pelabuhan untuk sarana perdagangan antar pulau.
- c. Luas dan panjang wilayah (*extent of territory*), dengan luas dan panjang wilayah tentu sangat menguntungkan karena terdapat lebih banyak sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan, bukan

saja untuk kepentingan komersial saja tetapi untuk kepentingan penetrasi musuh dalam memasuki negara tersebut.

- d. Karakter penduduk (*character of the people*), penduduk suatu negara harus menilai bahwa laut adalah sumber kesejahteraan dan pertahanan negara maka warga negaranya harus memiliki visi maritim yang kuat merupakan budaya maritim.
- e. Jumlah penduduk (*number of population*), jumlah penduduk yang besar dengan pendidikan, keterampilan dan pengetahuan bidang maritim karena jika tidak mempunyai kemampuan bisa menjadi ancaman keamanan.
- f. Karakter pemerintahan (*character of the government*), pemerintahan juga harus mempunyai visi maritim yang kuat hal ini termasuk budaya maritim.

Dari enam elemen dari teori ini dapat dilihat bahwa pentingnya budaya maritim dalam membuat kekuatan di laut diantaranya karakteristik dari masyarakat dan karakteristik dari pemerintahannya, begitu juga dalam mendukung PMD, budaya maritim dapat terbentuk jika karakteristik penduduk dan pemerintahannya harus berorientasi ke laut/maritim.

### **2.1.2 Teori Budaya Maritim**

Bicara masalah budaya maka bicara tentang masyarakat termasuk masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Demikian pula jenis mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani ikan, dan pemilik atau pekerja industri maritim.

Untuk budaya sendiri setiap ahli tidak ada yang sama didalam mengartikan tentang budaya. Secara harfiah, budaya ialah cara hidup yang dimiliki sekelompok masyarakat yang diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya. Koentjaraningrat (1979) menyebutkan budaya

merupakan sebuah sistem atau gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia didalam kehidupannya yang bermasyarakat yang dijadikan kepunyaanya dengan belajar. Budaya atau kebudayaan menurut Koentjaraningrat mempunyai 3 wujud. Pertama wujud kebudayaan yang tidak terlihat yaitu ide, gagasan, nilai, atau norma. Kedua wujud kebudayaan sebagai aktifitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat seperti nelayan pergi ke laut atau tradisi larung. Ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia seperti candi, kapal Phinisi dan yang lainnya.

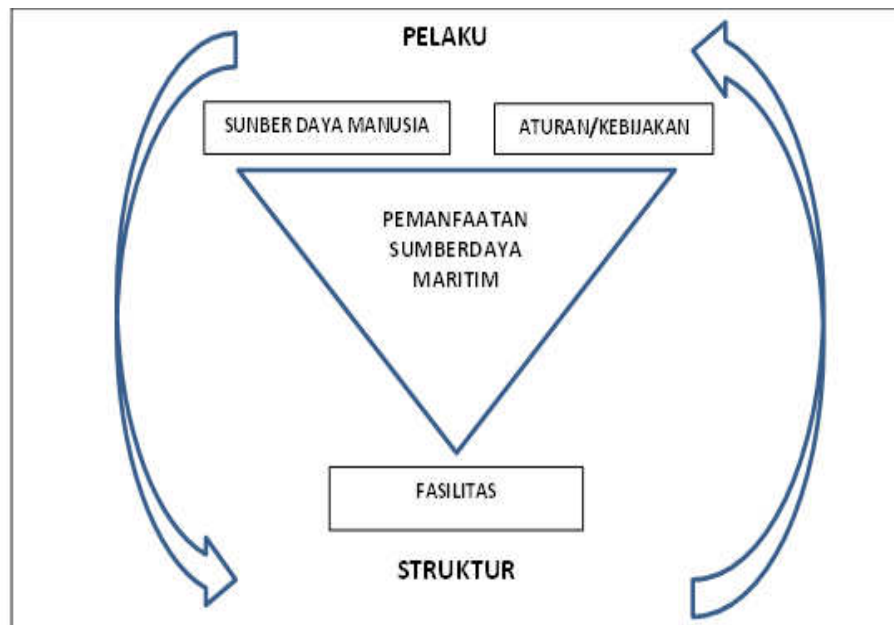
Budaya menurut Giddens bisa dimaknai sebagai suatu arena sosial di mana terjadi interaksi antara manusia, aturan dan fasilitas yang ada sehingga membuat struktur (nilai, norma) yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan sosial (Octavian dan Yulianto, 2014).

Budiman Joko Said (2016) mengatakan maritim adalah merupakan nomenklatur yang sangat luas jika dibandingkan dengan nomenklatur kelautan atau bahari. Nomenklatur bahari sangat identik dengan budaya atau orientasi suatu bangsa yang menggantungkan diri pada laut sedangkan nomenklatur kelautan sangat identik dengan fisik atau sumber daya dari laut sedangkan nomenklatur maritim seluruh proses pemanfaatan sumber daya, infrastruktur, budaya, aktivitas ekonomi, pertahanan, keamanan, serta seluruh hal yang memiliki korelasi dengan air sehingga tidak hanya terbatas dengan laut tetapi meliputi pula danau dengan sungai (Mardani, 2017).

Dengan demikian budaya maritim suatu arena sosial di mana terjadi interaksi antara manusia, aturan dan fasilitas yang ada sehingga membuat struktur yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan sosial (pemanfaatan sumber daya maritim) dalam domain maritim/laut/air.

- a. Sumber daya manusia yang memiliki karakter maritim yaitu fungsi seseorang untuk memanfaatkan sumber daya maritim merupakan level yang paling tinggi, tentang sesuatu yang melibatkan pengetahuan yang berkenaan dengan air, laut.

- b. Aturan/kebijakan berupa norma-norma yang mengatur individu untuk patuh dengan memberikan sanksi dan institusi sosial yang ada dalam satu masyarakat maritim atau kebijakan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang berkenaan dengan air.
- c. Fasilitas yang dimiliki yang bisa dikategorikan sebagai sumber daya yang menjadi modalitas seseorang untuk memanfaatkan sumber daya maritim. Sumber daya tersebut dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alokatif yang berkaitan dengan ekonomi dan sumber daya otoritatif yang berkaitan dengan kekuasaan (Octavian dan Yulianto 2014)



**Gambar 2.1 Pemanfaatan Sumber Daya Maritim sebagai Praktik Sosial diolah dari Inspirasi Praktik Sosial skema Gidden (Sumber: Octavian dan Yulianto, 2014)**

Dengan demikian di dalam membangun budaya maritim aspek yang harus dilakukan terhadap sumber daya manusianya yang mempunyai karakter maritim, norma dan aturan-aturannya harus mendukung serta fasilitas yang mendukung ekonomi baik permodalan maupun sarana prasarana dalam suatu masyarakat.

Fungsi dan peran budaya maritim dalam pembangunan bangsa Indonesia sudah jelas bahwa budaya maritim sebagai pondasi utama dalam membangun negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan sumber daya yang ada di dalamnya. Cara hidup yang bangsa Indonesia harus berorientasi kepada laut baik masyarakat maupun pemerintahannya dalam mengelola sumber dayanya untuk kesejahteraan rakyatnya.

### **2.1.3 Teori Nilai dan Norma**

Dari teori Giddens yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan sosial (pemanfaatan sumber daya maritim) adalah nilai dan norma yang ada di masyarakat, dengan demikian diharapkan nilai dan norma yang ada di masyarakat Indonesia (Bantul) mendorong masyarakatnya untuk memanfaatkan sumber daya laut/maritimnya. Nilai adalah suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk (Giddens, 1995). Fungsi dari nilai adalah alat untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertindak laku masyarakat. Sebagai pembatas dan penekan individu untuk selalu berbuat yang dianggap baik. Selain itu sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat. Nilai-nilai merupakan penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya (Tim Sosiologi, 2007).

- a. Nilai sebagai penunjuk arah anggota masyarakat dalam cara berpikir dan bertindak, umumnya diarahkan oleh nilai-nilai sosial yang berlaku. Jika ada anggota masyarakat pendatang baru pun secara moral diwajibkan mempelajari aturan sosio budaya lingkungannya sehingga dia dapat beradaptasi dengan norma dan dapat menjauhi perilaku yang tidak diinginkan masyarakat sekitar.
- b. Nilai sebagai pendorong, dengan adanya nilai sosial yang dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai cita-cita manusia yang berbudi luhur serta bangsa yang beradab itulah manusia menjadi manusia yang sungguh-sungguh berbudi luhur sehingga menjadikan suatu bangsa yang

sungguh-sungguh berada. Hal ini dapat terwujud berkat keberhasilan manusia merealisasikan nilai sosial yang bermutu tinggi.

- c. Nilai sebagai pemersatu orang berkumpul dan bekerja sama di sekitar, nilai sosial yang disukai bersama dengan demikian kepentingan mereka bersama terpenuhi. Berdasarkan fenomena tersebut dalam kehidupan dapat disimpulkan bahwa nilai sosial dapat menciptakan dan meningkatkan solidaritas antar manusia.
- d. Nilai sebagai benteng perlindungan nilai-nilai sosial yang dapat dianggap sebagai benteng perlindungan adalah nilai-nilai inti.

Menurut Notonogoro pada (Nurseno, 2007) jenis-jenis nilai dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, contohnya manusia menilai karena berguna untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- b. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. contohnya bagi nelayan laut merupakan kebutuhan vital.
- c. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
  - 1. Nilai kebenaran (rasio) bersumber pada unsur akal manusia
  - 2. Nilai keindahan (estetika) bersumber pada perasaan manusia
  - 3. Nilai moral (etika) bersumber pada kehendak atau kemauan
  - 4. Nilai Ketuhanan (religius) nilai yang tertinggi, sifatnya mutlak dan abadi.

Di dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan adanya istilah norma-norma atau kaidah, yaitu suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap tindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Patokan atau pedoman tersebut sebagai norma (*norm*) atau kaidah yang merupakan standar yang harus ditaati atau dipatuhi (Soekanto: 1989).

Tujuan dari norma ini adalah mengatur setiap orang bertingkah laku sebagai pedomannya. Karena setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda tetapi harus diatur agar adanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai aturan yang telah disepakati bersama. Norma sendiri ada yang berisi perintah tetapi ada juga yang berupa larangan (Kansil, 1989) dan norma sendiri jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi.

Norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai sumber berbeda-beda, dilihat dari sumbernya norma sosial dibedakan menjadi lima pengertian, yaitu sebagai berikut (Tim Sosiologi, 2007):

- a. Norma Agama adalah peraturan berasal dari Tuhan yang sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar atau diubah ukurannya. Norma ini berisikan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Sebagian besar norma agama bersifat umum (universal). Sanksinya adalah rasa berdosa dan sanksinya masuk neraka.
- b. Norma Kebiasaan adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku menjadi kebiasaan individu. Sanksinya berupa celaan, pengucilan secara batin. contohnya: bersalaman.
- c. Norma Kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Sanksinya dapat dipenjara, diusir atau dijauhi.
- d. Norma Kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada tingkah laku wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran norma mendapatkan celaan, kritik, dan pengucilan
- e. Norma Hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, seperti pemerintah sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan aturan. Norma

hukum ada 2, yaitu tertulis dan tak tertulis. Sanksi bagi norma hukum tertulis adalah denda, penjara bahkan hukuman mati.

#### **2.1.4 Konsep Poros Maritim Dunia**

Sebelum berbicara mengenai PMD, perlu dipahami tentang Negara maritim. Indonesia dipandang belum menjadi Negara Maritim meskipun Indonesia memiliki sejumlah prasyarat kekuatan maritim, seperti yang telah ditetapkan oleh para ahli strategi maritim seperti Alfred Thayer Mahan dan Geoffrey Till. Status Indonesia hanya sebatas negara kepulauan setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Menurut pakar Hukum Laut Hasjim Djalal, negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan. Negara maritim merupakan negara yang mampu memanfaatkan laut dan mempunyai fungsi teknologi, ilmu pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut, baik ruang maupun kekayaan alam dan letaknya yang strategis. Oleh karena itu, banyak negara kepulauan atau negara pulau yang belum menjadi negara maritim karena Negara tersebut belum mampu memanfaatkan lautnya (Muhamad, 2014)

PMD merupakan ketetapan visi pemerintah (Presiden Joko Widodo) di mana hal ini menjadi dasar dalam pembangunan nasional dengan membangun bidang kemaritiman di Indonesia. Perkembangan kemaritiman dunia mengarah pada industrialisasi sumber daya maritim dan edukasi masyarakat agar menyadari bahwa potensi maritim sangatlah besar. Proses industrialisasi sumber daya maritim diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya maritim. Proses industrialisasi ini memerlukan inovasi dan pemanfaatan teknologi yang bersifat berkelanjutan. Peningkatan edukasi kemaritiman bertujuan untuk mengarahkan setiap individu sadar bahwa wilayah laut merupakan tempat yang potensial untuk beraktivitas. Dampak positif yang ingin dicapai adalah adanya perkembangan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan maritim seperti bisnis, konservasi, rekreasi dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan bergerakinya perekonomian di sektor maritim (BIG, 2015).

Modal dasar yang dimiliki oleh negara Indonesia untuk mencapai tujuan ini adalah dominasi wilayah laut daripada wilayah daratan di Indonesia. Kemudian sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim dan posisi strategis Negara Indonesia di dalam konstelasi pembangunan Asia Pasifik. Maka dari itu, pemerintah membuat arah kebijakan pembangunan ke dalam 7 pilar (Perpres No. 16 Tahun 2017) meliputi:

- a. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut.
- c. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut.
- d. Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan.
- e. Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut.
- f. Budaya Bahari.
- g. Diplomasi Maritim.

Dengan dibuatnya kebijakan PMD maka diharapkan bahwa masyarakat dan pemerintah bekerjasama memanfaatkan sumber daya laut/maritimnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyatnya, dengan konsep bahwa budaya maritim harus dibangun terlebih dahulu sehingga pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam membangun bangsanya harus berorientasi kepada maritim/laut, setelah itu secara otomatis timbul kegiatan ekonominya dan harus diamankan agar berjalan lancar dan stabil.

### **2.1.5 Konsep Fungsi Pemda**

Pemerintah daerah Fungsi pemerintahan daerah ini dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Adapun fungsinya tertuang didalam UU Nomor 32 tahun 2004 yakni:

- a. Pengertian Pemda mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Di mana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pemanfaatan sumber daya maritim merupakan fungsi dari pemda Bantul di mana merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan laut Samudera Indonesia di mana pemanfaatannya belum maksimal, begitu juga pengaturan masalah terkait penganggaran, dan kebijakan dengan bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemampuan (*ability*) berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. (Stephen P. Robbins & Timonhy A. Judge, 2009).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan seorang individu atau organisasi dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

Meningkatkan Fungsi Pemda Bantul berarti meningkatkan kemampuannya dalam mengatur dan mengurus sendiri pemanfaatan sumber daya maritim untuk kesejahteraan masyarakatnya.

### **2.1.6 Teori Kesadaran masyarakat**

Dalam membangun budaya maritim yang sudah sejak lama terdegradasi maka diperlukan mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa laut kita belum dimanfaatkan dan dikelola dengan maksimal sehingga belum

mampu mensejahterakan masyarakat. Adapun kesadaran menurut Hasibuan (2012), “kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya”. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi di mana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Kesadaran budaya maritim masyarakat berarti masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya terhadap pemanfaatan sumber daya maritim yang ada sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

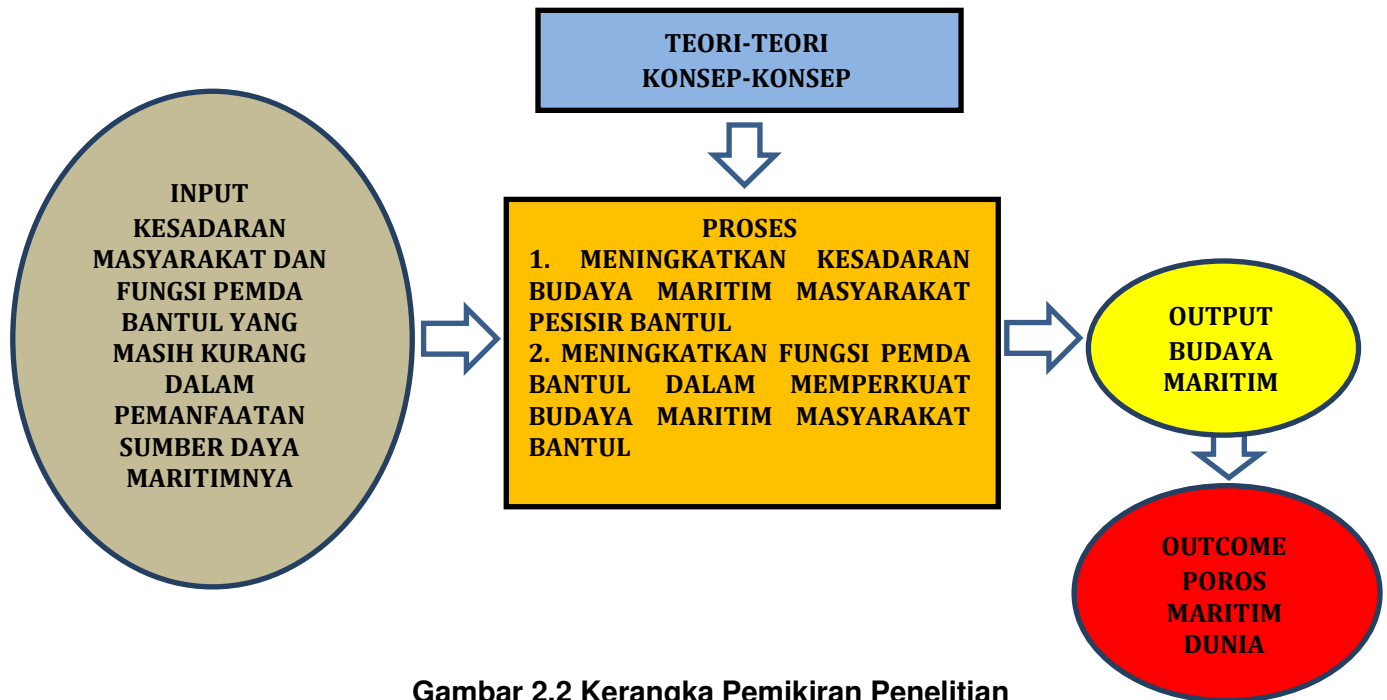
1.Nama Peneliti	Amarulla Octavian dan Bayu A. Yulianto
Judul	Degradasi Kebudayaan Maritim: Sejarah, Identitas, dan Praktik Sosial Melaut di Banten.
Jenis	Buku
Metodologi	Kualitatif
Hasil	Degradasi kebudayaan maritim disebabkan masuknya Kolonial Eropa yang menguasai perdagangan di pelabuhan dan memaksa rakyat Indonesia untuk bercocok tanam. Begitu juga pasca kemerdekaan keadaannya tidak berubah sampai sekarang, tetapi nilai positif yang didapat dari kolonial Eropa yaitu ilmu tentang teknologi perkapalannya. Dalam buku ini juga menggambarkan praktik melaut yang dilakukan oleh masyarakat Banten.
Persamaan	Meneliti budaya maritim, sejarah degradasi budaya maritim serta kondisi budaya maritim di salah satu masyarakat pesisir Indonesia.

Perbedaan	<p>Penelitian terdahulu meneliti sejarah degradasi budaya maritim dan praktek melaut masyarakat Banten.</p> <p>Penelitian ini meneliti tentang meningkatkan kesadaran nilai dan norma maritim masyarakat pesisir Bantul serta bagaimana pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakatnya, metodologi yang digunakan yaitu kualitatif dengan analisis <i>Soft System Methodology</i> dan pengolahan data dengan pengolahan data menggunakan <i>software NVivo</i>.</p>
2>Nama Peneliti	Yulianti (Universitas Negeri Malang 2014)
Judul	Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim (Jalesveva Jayamahe)
Jenis	Jurnal
Metodologi	Kualitatif
Hasil	Teori yang dibangun oleh Alfred Thayer Mahan, ada 6 unsur yang dapat dikategorikan sebuah negara menjadi kekuatan laut, dan Nusantara telah memenuhi kriteria tersebut sehingga Indonesia sebagai negara maritim sangat mungkin terwujud jika ada keinginan yang kuat
Persamaan	Meneliti tentang Indonesia seharusnya negara maritim
Perbedaan	<p>Penelitian terdahulu dengan menggunakan teori AT. Mahan dengan 6 aspeknya bahwa Indonesia sudah memenuhi kriteria sebagai negara yang mempunyai kekuatan di laut, tetapi karakteristik masyarakat dan pemerintahnya tidak mendukung.</p> <p>Penelitian ini meneliti tentang meningkatkan kesadaran nilai dan norma maritim masyarakat pesisir Bantul serta bagaimana pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakatnya, Metodologi yang digunakan yaitu</p>

	kualitatif dengan analisis <i>Soft System Methodology</i> dan pengolahan data dengan pengolahan data menggunakan <i>software NVivo</i>
3.Nama Peneliti	Todd Ames ( <i>University Of Guam 2013</i> )
Judul	<i>Maritime Culture In The Western Pacific</i>
Jenis	Jurnal
Metodologi	Kualitatif
Hasil	Rakyat Mikronesia telah lama meninggalkan laut sehingga terjadi krisis ekonomi. Untuk mengembalikan kejayaannya mereka harus kembali ke laut dengan memanfaatkan sumber daya maritimnya, kebudayaannya, serta hubungan sosial antar pulau di wilayah Mikronesia
Persamaan	Meneliti degradasi budaya maritim
Perbedaan	Penelitian ini budaya maritim yang sudah mulai hilang di rakyat Mikronesia Penelitian ini meneliti tentang meningkatkan kesadaran nilai dan norma maritim masyarakat pesisir Bantul serta bagaimana meningkatkan kemampuan pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakatnya, metodologi yang digunakan yaitu kualitatif dengan analisis <i>Soft System Methodology</i> dan pengolahan data dengan pengolahan data menggunakan <i>software Nvivo</i>

Sumber: Diolah oleh Peneliti

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Input dalam kerangka pemikiran penelitian ini adalah bahwa masyarakat dan pemda Bantul sejak zaman kolonialisme sampai sekarang menilai laut bukan sumber penghidupannya sehingga sumber daya maritim tidak mempunyai nilai vital bagi masyarakat pesisir Bantul. Di dalam proses meningkatkan kesadaran budaya masyarakat pesisir Bantul untuk meningkatkan nilai mereka terhadap maritim dan meningkatkan kemampuan pemda Bantul sesuai fungsinya dalam memperkuat budaya masyarakat Bantul serta didukung teori dan konsep tentu menjadi acuan apakah proses sesuai dengan teori dan konsep agar terbentuk budaya maritim di masyarakat Bantul sebagai *output* dan PMD dunia dapat terwujud sebagai *outcome*.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Creswell dalam bukunya *Research Design* metode penelitian dibagi menjadi tiga jenis rancangan penelitian yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif dan metode campuran. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menciptakan gambaran secara menyeluruh dan kompleks yang disajikan kedalam kata-kata, melaporkan semua data-data dan informasi dengan terperinci dan dilakukan dalam keadaan yang alamiah. (Creswell, 2016)

Peneliti menggunakan pendekatan pengolahan data *software* NVivo dan metodologi *Soft System Methodology* (SSM). Pendekatan metode kualitatif yaitu suatu proses penelitian untuk memahami suatu fenomena sosial dan masalah sosial. Kelebihan menggunakan metode kualitatif adalah deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam, penelitian dapat berjalan efektif untuk mencari tanggapan dan pandangan terhadap permasalahan, bersifat fleksibel terhadap analisis dengan temuan di lapangan.

Dalam penelitian ini pengumpulan data untuk diambil karakteristiknya yang dapat membantu peneliti untuk mengulas atau membahas suatu permasalahan. Karakteristik tersebut terdiri dari keberadaan lingkungan alamiahnya, peran dari si peneliti mempunyai peran sebagai instrumen kunci di dalam penelitiannya dan tersusun atas keberagaman dari sumber data. Analisis data yang digunakan bersifat deduktif, berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi atau pandangan yang menyeluruh mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang

telah disampaikan maka penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul.
- b. Untuk mengetahui fungsi pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul.

### **3.2 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian**

Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan di beberapa satuan kerja pemda kabupaten Bantul yang menangani bidang maritim serta masyarakat pesisir Bantul terkait kesadarannya terhadap nilai dan norma maritim serta meningkatkan kemampuan pemda Bantul dalam meningkatkan nilai dan norma maritim masyarakat Bantul.

#### **3.2.1 Sumber Data**

Sumber data merupakan uraian keterangan secara tepat dan jelas. Sumber data disertai dengan kriteria sumber data, yaitu rincian dari karakteristik subjek atau objek yang dianggap mempunyai kesesuaian sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian. Adapun sumber data penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **3.2.1.1 Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dari narasumber. Data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber yang berkompeten, melalui audio atau video dari informan-informan terkait dengan nilai dan norma (budaya maritim) yang ada di masyarakat Bantul dan kemampuan pemda Bantul dalam meningkatkan nilai dan norma maritim masyarakatnya sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Data Narasumber Penelitian**

<b>No</b>	<b>Instansi/Masyarakat</b>	<b>Fungsi</b>	<b>Bagian</b>
1	Bappeda Bantul	Kelompok Regulator	Kabid Ekonomi Sarana dan Prasarana
2	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan perikanan Bantul	Kelompok Regulator	Kabid Kelautan dan Perikanan
3	Dinas Pariwisata Bantul	Kelompok Regulator	Staf Pengembangan Destinasi
4	SMKN 1 Sanden	Kelompok Pendukung	Staf Pengajar
5	Dinas Lingkungan Hidup	Kelompok Regulator	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan peningkatan kapasitas
6	Posal Samas	Kelompok Pendukung	Komandan Posal Samas
7	Masyarakat Pesisir	Kelompok Pelaksana	Tokoh Adat
8	Masyarakat Pesisir	Kelompok Pelaksana	Tokoh Agama
9	Masyarakat Pesisir	Kelompok Pelaksana	Nelayan Patihan
10	Masyarakat Pesisir	Kelompok Pelaksana	Nelayan Depok
11	Masyarakat Pesisir	Kelompok Pelaksana	Nelayan Samas
12	Masyarakat Pesisir	Kelompok Pelaksana	Penjual Kuliner
13	Masyarakat Pesisir	Kelompok Pelaksana	Ketua Pokdarwis
14	Masyarakat Pesisir	Kelompok Pelaksana	Pemuda Sakabahari
15	Akademisi	Triangulasi Data	Mantan Kemenko Maritim
16	Akademisi	Triangulasi Data	Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Menristekdikti

Sumber: Diolah peneliti

### **3.2.1.2 Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data dari narasumber kepada pengumpul data peneliti, data yang diperoleh bisa lewat orang lain atau dokumen.

### **3.2.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung sebagai pemberi informasi dan data. Data dan informasi yang didapat kemudian didokumentasikan dalam bentuk transkrip, rekapitulasi atau catatan mentah di lapangan. Selanjutnya subjek penelitian dalam tesis ini adalah masyarakat pesisir Bantul, beberapa SKPD terkait kabupaten Bantul, serta pakar akademisi budaya maritim.

### **3.2.3 Objek Penelitian**

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016), objek penelitian adalah suatu obyek sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Adapun objek penelitian yang diteliti dalam tesis ini adalah tentang kesadaran masyarakat pesisir Bantul terhadap nilai dan norma maritimnya dan meningkatkan fungsi pemda Bantul dalam memperkuat nilai dan norma maritim masyarakat Bantul.

## **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti dalam melakukan penelitiannya dengan melakukan pengumpulan data di mana merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan dengan langkah-langkah untuk membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi empat jenis strategi yaitu (Creswell, 2016):

- a. Observasi kualitatif adalah peneliti langsung turun ke lapangan atau lokasi untuk mengamati secara langsung perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat terbuka di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan dan mereka secara bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.
- b. Wawancara kualitatif adalah peneliti melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan dan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.
- c. Dokumen kualitatif, dokumen dapat berupa dokumen publik (koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (buku harian, surat, e-mail).
- d. Audio dan visual kualitatif, adalah data yang didapatkan berupa foto, objek seni, video tape atau segala jenis suara atau bunyi.

Dari teknik pengumpulan data yang dilakukan di atas maka data yang didapatkan dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu data utama dan data sekunder. Data utama didapatkan langsung dari sumber pertama (dalam hal informan) dengan melakukan wawancara secara mendalam di lokasi, pemilihan informan sebagai *key informant*. Wawancara dilakukan sesuai topik penelitian yang telah ditentukan dan berdasarkan pedoman wawancara yang telah ditentukan. Sedangkan data sekunder didapatkan dari data-data yang diberikan instansi dan studi literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk sumber data dapat didapatkan dari: perpustakaan, akses internet, jurnal-jurnal maupun buku-buku yang membahas mengenai maritim Indonesia baik dari segi kesejahteraan, ekonomi, budaya maupun keamanannya.

### 3.4 Teknik Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian dilaksanakan pengolahan data yang akan dibantu dengan menggunakan aplikasi atau *software* NVivo. *Software* ini di desain agar peneliti dapat melakukan pengorganisasian, penganalisisan dan mencari wawasan dari suatu data kualitatif yang tidak terstruktur dari hasil wawancara, survey, artikel, sosial media dan website. Dengan demikian dengan NVivo ini dapat mempermudah proyek penelitian secara efisien, hemat waktu, dengan cepat mengorganisir, menyimpan dan menerima data. Fungsi NVivo ini juga dapat melakukan *coding* berdasarkan data nyata (hidup) yang dialami partisipan di lapangan dan memberikan proses analisis yang konsisten dan akurat (Bandur, 2016).

Menurut Badur (2016) dalam NVivo, sumber data yang dianalisis dibagi menjadi:

- a. Sumber data penelitian internal, adalah semua sumber data penelitian yang bisa dimasukkan secara langsung ke dalam NVivo seperti rekaman wawancara, transkrip wawancara, catatan penelitian, tabel data survey, foto, isi *website* dan video rekaman.
- b. Sumber data penelitian eksternal adalah materi-materi penelitian yang tidak bisa dimasukkan secara langsung ke dalam NVivo
- c. Sumber data memos adalah sumber data penelitian berupa catatan-catatan yang dibuat peneliti selama proses pengumpulan data.
- d. Kerangka matriks adalah merupakan ringkasan hasil observasi terhadap partisipan tertentu dengan tema-tema yang sudah dibuat dalam tabel matriks.

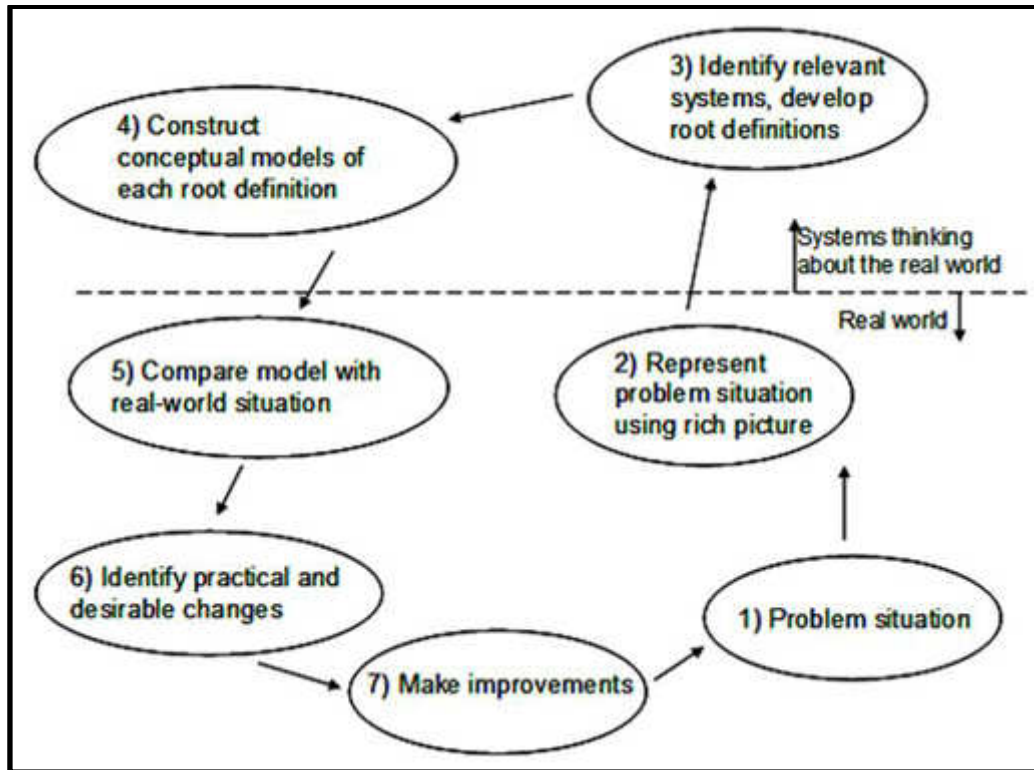
### 3.5 Teknik Analisis dan Interpretasi Data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Soft System Methodology* (SSM). Teknik ini diuraikan oleh Peter Checkland, di mana secara ringkas, Checkland dan Poulter (Hardjosoekarto, 2012) mengemukakan bahwa teknik SSM adalah suatu proses mencari tahu dengan berorientasi terhadap suatu aksi atas situasi problematis dari

kehidupan nyata sehari-hari. Para pengguna SSM pertama-tama melakukan pembelajaran dengan cara menemu-kenali situasi sampai merumuskan selanjutnya mengambil tindakan guna memperbaiki situasi permasalahan atau problematis yang ada. Pada dasarnya teknik analisis ini secara keseluruhan menghubungkan antara dunia nyata (*real world*) dengan berpikir serba sistem (*system thinking*). Skema yang dijelaskan oleh Checkland Siklus dalam proses SSM terdiri dari 7 (tujuh) tahap kegiatan diantaranya:

- a. Tahap pertama, proses penetapan situasi dunia nyata dengan permasalahan yang dianggap problematis dan belum terstruktur.
- b. Tahap kedua, permasalahan sudah mulai dinyatakan kedalam bentuk penyajian tertentu.
- c. Tahap ketiga, permasalahan sudah mulai dipilih dan penamaan *root definition* dari sistem yang relevan.
- d. Tahap keempat, membuat model konseptual berdasarkan *root definition* yang sudah dipilih dan diberi nama pada tahap sebelumnya.
- e. Tahap kelima, perbandingan antara situasi dunia nyata yang telah dinyatakan dengan model konseptual.
- f. Tahap keenam, perubahan yang dapat dilaksanakan berdasarkan saran tindak untuk perbaikan, penyempurnaan, dan perubahan situasi dunia.
- g. Tahap ketujuh, langkah tindakan yang dilakukan untuk perbaikan, penyempurnaan, dan perubahan situasi yang sedang berlangsung.

Dari ketujuh tahap ini selanjutnya dirangkai menjadi suatu sistem pemecahan masalah yang diurutkan secara runtun yang dilakukan oleh peneliti. Adapun skema tahapan SSM seperti gambar berikut:



Gambar 3.1 Kerangka *Soft Sistem Methodology* oleh Peter Checkland

### 3.6 Prosedur Penelitian

#### 3.6.1 Instrumen Penelitian

Yang dijadikan instrumen penelitian di mana sebagai alat bantu utama yang digunakan seperti panduan wawancara, program komputer dan yang lainnya.

#### 3.6.2 Data Primer

Adalah data yang didapat atau diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak partisipan atau narasumber. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan siapa dan bagaimana data primer diperoleh.

#### 3.6.3 Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data yang terbuka yang telah ada dan tersedia seperti dokumen publik, jurnal, pustaka terpilih

dan sumber lainnya. Peneliti juga menjelaskan dengan jelas apa saja dan bagaimana data sekunder ini dapat diperoleh.

#### **3.6.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data**

Hal terpenting dalam penelitian kualitatif adalah menentukan validitas dan reabilitas dari data yang didapat dengan akurat dari sudut pandang peneliti (Creswell dan Miller,2000). Creswell (2016) menyatakan beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam menentukan validitas dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

- a. Triangulasi, NVivo membantu proses triangulasi data dengan memunculkan model triangulasi dari masalah, pertanyaan penelitian dan pertanyaan operasional terhadap masing-masing informan. Dilakukan *cross-checked* terhadap masing-masing informan setiap pertanyaan penelitian bahkan pertanyaan operasional. NVivo sangat mempermudah proses triangulasi terhadap penelitian yang memiliki banyak informan terhadap penelitian karena hasil *coding* yang dilakukan dapat ditunjukkan dalam persentase dibahas oleh informan mana saja.
- b. Membuat deskripsi yang padat dan dalam tentang hasil penelitian.
- c. Jika ada hal yang bias lakukanlah klarifikasi.
- d. Jika peneliti melakukan penyajian informasi yang berbeda atau negatif maka akan mendapatkan perlawanan pada tema tertentu.
- e. Melakukan tanya jawab dengan peneliti lainnya sebagai pembandingan (*peer debriefing*).

### **3.8 Jadwal Penelitian**

Penelitian Pembangunan Budaya Maritim dalam Mendukung Poros Maritim Dunia (Studi Masyarakat Pesisir Kabupaten Bantul) telah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2017 hingga Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Proses penyiapan draft proposal sampai dengan sidang ujian proposal telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2017, sedangkan perbaikan proposal telah dilaksanakan pada bulan September 2017.
- b. Proses pengumpulan dan pengolahan data primer dengan melakukan wawancara dengan narasumber utama dan data sekunder yang didapatkan berupa telaah dokumen yang tersedia dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Februari 2018.
- c. Proses penyusunan tesis dilakukan secara bertahap sesuai dengan data primer dan data sekunder yang telah didapat dan selanjutnya diolah. Proses penyusunan ini berjalan dari bulan Maret sampai juli 2018.
- d. Tahap terakhir dari penelitian ini adalah sidang ujian tesis pada bulan Agustus 2018 dan dilanjutkan perbaikan tesis.

## **BAB 4**

### **ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kebijakan Poros Maritim Dunia**

Visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia (PMD), yaitu; menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, kuat, maju, mandiri serta mampu memberikan kontribusi yang positif bagi keamanan dan perdamaian dikawasan Asia dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun dengan mengacu pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan RPJMN ke-3 (ketiga) sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-2, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk *“memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat”*.

Pemerintah Presiden Joko Widodo telah menyusun RPJMN 2015- 2019 dengan mengangkat Visi: *“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, dalam 7 misi diantaranya misi ketiga yaitu *“Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dengan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.”* Dan misi keenam yaitu *“Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang berdaulat, kuat, maju, mandiri, dan berbasiskan kepentingan nasional.”* Di sini sudah jelas bahwa masa

pemerintahan presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia sebagai negara maritim, yang kemudian diejawantahkan dengan mengeluarkan Perpres nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

PMD pertama diinisiasi ke dunia internasional di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) di Nay Pyi Taw, Myanmar cenderung mengarah ke perkembangan sektor maritim dengan mempertimbangkan lima pilar kebijakan PMD yaitu :

**Tabel 4.1 Pilar Kebijakan Poros Maritim Dunia**

<b>No</b>	<b>Pilar Kebijakan PMD</b>	<b>Keterangan</b>
1	Membangun Budaya Maritim	Indonesia menyadari sebagai negara kepulauan dengan luas laut 2/3 dari daratan, identitas budaya maritim yang menguntungkan kemakmuran dan masa depannya melalui pemanfaatan maritimnya.
2	Tata Kelola maritim (Ekonomi Maritim)	Indonesia harus memiliki komitmen bahwa kekayaan sumber daya maritim dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat yang diikuti dengan aksi menjaga kelestarian lingkungan dalam mengelolanya
3	Infrastruktur dan konektivitas Maritim	Indonesia harus memiliki komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun jalan tol laut, meningkatkan fasilitas pelabuhan, logistik, industri

		perkapalan serta pariwisata maritim
4	Diplomasi Maritim	Indonesia harus memiliki komitmen untuk menghilangkan konflik-konflik di laut seperti: IUUF, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran lingkungan laut.
5	Penguatan Keamanan dan Pertahanan Maritim	Indonesia berkewajiban untuk membangun kekuatan, pertahanan maritim untuk menjaga kekuatan dan kekayaan sumber daya maritimnya

Sumber : (Suropati, 2016)

Dari lima pilar yang terdapat dalam kebijakan PMD, budaya maritim merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Identitas bangsa maritim yang memanfaatkan sumber daya maritimnya memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Adapun budaya maritim menurut Candra Motik (2017) adalah paradigma suatu bangsa yang berorientasi kepada pemanfaatan dan pembangunan sumber daya maritim sebagai landasan kehidupan perekonomiannya. Kenyataannya budaya maritim saat ini telah hilang, yang terindikasi antara lain dari sekitar 240 juta penduduk nasional, ternyata hanya 2,3 juta warga yang bergelut di bidang kemaritiman (BPS 2010) dan baru 4 % sektor perikanan laut menyumbang kepada APBN.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2015, Tugas Kemenko Maritim menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dengan membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pariwisata.

Kementerian perhubungan yang berperan dalam membangun infrastruktur, konektivitas dan sistem logistik maritim pada kenyataannya mendapatkan hambatan di mana disparitas harga masih tetap tinggi walaupun keberadaan barang ada tetapi tidak mampu dibeli oleh masyarakat terutama di wilayah timur Indonesia.

#### **4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Bantul**

##### **4.1.2.1 Letak dan Batas Wilayah**

Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selain Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km<sup>2</sup> (15,90% dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari 60% daerah perbukitan yang kurang subur.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

##### **4.1.2.2 Luas dan Wilayah Administrasi**

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 50.585 ha atau 506,85 km<sup>2</sup> yang lebih dari setengahnya merupakan daerah perbukitan yang subur. Secara administratif Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur, Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat, dan samudera Indonesia di sebelah selatan. Kabupaten Bantul dari 17

Kecamatan, 75 Desa dan 933 Pedukuhan. Dari 17 kecamatan hanya memiliki 3 kecamatan yang berhubungan secara langsung dengan laut, yaitu; kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek dengan panjang pantai  $\pm 17$ km. Pada kecamatan pemanfaatan sumber daya maritim dilakukan oleh masyarakatnya.

#### 4.1.2.3 Perikanan

Jumlah produksi budidaya ikan kolam pada tahun 2015 tercatat 10.714.622 kg sedangkan jumlah ikan tangkap di perairan sungai sebesar 349.226 kg dan produksi ikan tangkap laut sebesar 376.690 kg. Sebagian penduduk kecamatan melakukan budidaya ikan kolam atau budidaya ikan air tawar, kecamatan Piyungan merupakan kecamatan yang memiliki produksi ikan kolam yang paling tinggi. Untuk ikan tangkap laut hanya di kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek karena ketiga kecamatan ini yang berhubungan langsung dengan laut.

**Tabel 4.2 Produksi Ikan di Wilayah Kabupaten Bantul dalam Kg**

No	Kecamatan	Kolam	Tambak	Tangkap Laut
1	Srandakan	170,225	353,708	104,479
2	Sanden	1,078,261	229,334	58,904
3	Kretek	711,824	67,560	213,307
4	Pundong	401,296	-	-
5	Bambanglipuro	491,748	-	-
6	Pandak	282,938	-	-
7	Bantul	825,534	-	-
8	Jetis	639,166	-	-
9	Imogiri	201,889	-	-
10	Dlingo	234,700	-	-
11	Pleret	183,894	-	-
12	Piyungan	2,039,399	-	-
13	Banguntapan	1,478,221	-	-
14	Sewon	733,135	-	-
15	Kasihan	442,839	-	-
16	Pajangan	371,445	-	-
17	Sedayu	428,076	-	-
	<b>jumlah</b>	<b>10,714,620</b>	<b>650,602</b>	<b>376,690</b>

Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka 2016

#### 4.1.2.4 Pariwisata

Kabupaten Bantul mempunyai banyak potensi yang sangat prospektif untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan bagi daerah, salah satu yang paling terlihat jelas adalah sektor pariwisata, jarak kabupaten Bantul yang tidak terlalu jauh dengan pusat kota Jogja membuat kota ini ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun asing. Potensi pariwisata di kabupaten Bantul adalah wisata alam berupa pantai. Pantai yang paling terkenal di kabupaten Bantul adalah pantai Parangtritis. Tahun 2014 hampir 2 juta orang berkunjung ke pantai tersebut pendapatan yang diterima lebih dari 2 miliar rupiah. Pada tahun 2015 pantai Parangtritis masih tetap menjadi primadona, yang telah dikunjungi hampir 2 juta pengunjung dan menghasilkan pendapatan lebih dari 9 miliar rupiah. Adapun objek wisata lain di wilayah Bantul adalah: pantai Depok, pantai Parangendog, pantai Parangkusumo, pantai cemara sewu, pantai Samas, pantai Patihan, pantai Pandansimo, pantai Kuwaru dan pantai Goa Cemara.

Total pengunjung dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan dari sebelumnya 2,2 juta pengunjung menjadi 2,5 juta pengunjung dan menghasilkan pendapatan dari 9,5 miliar menjadi 11,1 miliar. Adapun objek wisata lain di wilayah Bantul adalah: pantai Depok, pantai Parangendog, pantai Parangkusumo, pantai cemara sewu, pantai Samas, pantai Patihan, pantai Pandansimo, pantai Kuwaru dan pantai Goa Cemara.

**Tabel 4.3 Jumlah Pengunjung Objek Wisata dan Pendapatan Retribusi Objek Wisata**

<b>Tahun 2014</b>		
<b>Objek Wisata</b>	<b>Pengunjung</b>	<b>Pendapatan</b>
Pantai Parangtritis	1,879,000	8,318,950,000
Pantai Samas	6,065	169,987,500
Pantai Pandansimo	141,573	400,798,750
Pantai Kuwaru	77,732	218,803,000
Goa Cemara	88,909	250,699,750
Goa Selarong	38,731	102,776,500
Tirtatamansari	52,585	107,355,000
Goa Cerme	13,756	37,829,000
<b>Jumlah</b>	<b>98,351</b>	<b>9,607,199,500</b>

<b>Tahun 2015</b>		
<b>Objek Wisata</b>	<b>Pengunjung</b>	<b>Pendapatan</b>
Pantai Parangtritis	1,979,870	9,478,437,500
Pantai Samas	140,850	425,837,500
Pantai Pandansimo	163,169	486,234,750
Pantai Kuwaru	67,585	201,333,750
Goa Cemara	95,260	285,265,000
Goa Selarong	39,925	118,264,750
Tirtatamansari	20,000	112,000,000
Goa Cerme	13,455	39,259,250
<b>Jumlah</b>	<b>2,520,114</b>	<b>11,146,632,500</b>

Sumber : Kabupaten Bantul dalam Angka 2016

Selain wisata pantai beberapa objek wisata yang sering dikunjungi dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah dataran tinggi Gumbirowati, Goa Selarong, Goa Cerme, Gumuk pasir, Pemandian Parangwedang, Pasarean/patilasan, taman rekreasi Tirto Tamansari, Goa Gajah, Goa Jepang, Argowisata Mangunan dan Argowisata Argorejo.

#### **4.1.3 Gambaran Umum Kebijakan Pemda Bantul Dalam Bidang Maritim dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Bantul (SKPD) yang terkait Dengan Laut**

Visi dan Misi dari Gubernur Yogyakarta Sri Sultan HB X menjadikan pantai selatan Yogyakarta sebagai halaman depan DIY dari sini dapat dilihat pembangunan diutamakan di wilayah selatan Yogyakarta yang secara langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia dan diselaraskan dengan kebijakan pusat, yaitu; pembangunan di sektor maritim. Fasilitas akses jalan yang dibuat oleh pemda Bantul bekerjasama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, memberikan kemudahan masyarakat. Akses sumber daya maritimnya yaitu pembangunan infrastruktur jalan di jalur selatan baru selesai dibuat sedangkan pembuatan jembatannya yang masih

dalam proses, begitu juga pembangunan lapangan terbang di Kulon Progo. Diharapkan pembangunan infrastruktur mampu mendorong berkembangnya pariwisata dan perikanan yang ada di Bantul (Bappeda Bantul, 2017). Oleh karena itu untuk mendukung Yogyakarta Selatan sebagai etalase DIY Pemda Bantul mengeluarkan Perda nomor 04 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Bantul tahun 2010–2030, wilayah selatan Bantul diperuntukkan wilayah pertanian dan ekowisata. Pariwisata di pesisir selatan Bantul terutama pantainya menjadi tujuan utama pembangunan sektor maritim dalam mendukung PMD.

Undang-undang no. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditindaklanjuti dengan Program pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Bantul diarahkan untuk mencakup aspek: (1) keterpaduan tata ruang daratan dengan wilayah pesisir dan kelautan dengan pilar program kawasan lindung, konservasi dan pemanfaatan, (2) pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan pada sumber daya alam dan berbasis masyarakat, dan (3) pembentukan kelembagaan yang kuat (Bappeda Bantul, 2017).

#### **4.1.3.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bantul**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor Peraturan Bupati Bantul No. 127 Tahun 2016 mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

##### **a. Kedudukan**

Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang merupakan unsur penunjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan.

c. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pemerintah Daerah, diantaranya:

1. Kepala Bandan.
2. Sekertariat.
3. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
4. Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana.
5. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan.
6. UPT.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Fungsi:

Bappeda dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
5. Pelaksanaan kesekretariatan Bappeda.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan kemampuannya.

Peraturan daerah kabupaten bantul nomor 11 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, yang diturunkan Peraturan Bupati Bantul nomor 38 tahun 2016 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul 2017.

Kebijakan pemda Bantul dalam potensi pengembangan wilayah yang terkait dengan laut yaitu sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi pantai Selatan, pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo. Kawasan strategis lingkungan hidup yaitu diperuntukan agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo, Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

#### **4.1.3.2 Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Bantul**

Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul. Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

a. Kedudukan

Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan.

c. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, diantaranya :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat.
3. Bidang Ketahanan Pangan.
4. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
5. Bidang Pertenakan dan Kesehatan Hewan.
6. Bidang Kelautan dan Perikanan.
7. UPT.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan.

Dengan program terwujudnya kebutuhan perikanan masyarakat dengan intensifikasi kolam, tambak dan ikan tangkap. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, program peningkatan kegiatan, budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat, program pengembangan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, program pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan kelautan perikanan.

#### **4.1.3.3 Dinas Pariwisata Bantul**

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Sedangkan bila dikaitkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, kemampuan serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

a. Kedudukan

Dinas Pariwisata merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Pariwisata adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya.

c. Struktur organisasi Dinas Pariwisata diantaranya:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
3. Bidang Pengembangan Destinasi.
4. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Bidang Pemasaran.
6. UPT.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang pariwisata.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam

jangka waktu tahunan. Dalam rencana pembangunan lima tahunan ini, sasarannya adalah:

- a. Meningkatkan destinasi pariwisata.
- b. Meningkatkan daya tarik wisata.
- c. Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

Program Kerja :

- a. Pengembangan obyek wisata unggulan.
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksana program pengembangan destinasi pariwisata.
- c. Pengembangan daerah tujuan wisata.
- d. Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana obyek wisata.
- e. Peningkatan pelayanan kepariwisataan.

Bidang Pemasaran dan Kemitraan, terdiri atas :

- a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri.
- b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.
- c. Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata.

Kabupaten Bantul mempunyai banyak potensi yang sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah, salah satu yang paling terlihat jelas adalah sektor pariwisata. Jarak kabupaten bantul yang tidak terlalu jauh dengan pusat kota Jogja membuat kota ini ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun asing. Sebagian besar potensi pariwisata di kabupaten Bantul adalah wisata alam berupa pantai. Adapun objek wisata lain di wilayah Bantul adalah: pantai Depok, pantai Parangendog, pantai Parangkusumo, pantai cemara sewu, pantai Samas, pantai Patihan, pantai Pandansimo, pantai Kuwaru dan pantai Goa Cemara.

Jogja Air Show merupakan *event* tahunan Dinas Pariwisata DIY yang diselenggarakan sejak tahun 2005 bekerjasama dengan Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Pengda DIY, Lanud Adisucipto Yogyakarta, Dispar Kabupaten Bantul dan stakeholders pariwisata DIY. Kegiatan ini menyuguhkan atraksi dari berbagai macam cabang olahraga dirgantara yang

ada di bawah naungan FASI seperti paralayang, gantolle, paramotor, pesawat swayasa, aeromodelling yang berlokasi di kawasan Pantai Parangtritis, Pantai Depok di Kabupaten Bantul dan sebagai lokasi penyelenggaraan Jogja Air Show mampu menjadi salah satu *event* kepariwisataan berskala besar di DIY.

#### **4.1.3.4 Dinas Lingkungan Hidup Bantul**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemda di bidang lingkungan hidup.
- c. Membina dan melaksanakan tugas bidang lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai kemampuannya.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, diantaranya :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis, terdiri atas:

Laboratorium Lingkungan Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Program kerja dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- c. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- d. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- e. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- f. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
- g. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- h. Program peningkatan pengendalian polusi.
- i. Program pengelolaan ruang terbuka hijau.
- j. Program kerjasama informasi dengan media masa.

Penanaman pohon bakau di wilayah pesisir Bantul terutama di pantai Baros bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk mencegah kerusakan areal pertanian dan perikanan dari abrasi, penanaman kembali pohon cemara udang di sekitar pantai Patihan sepanjang 1,4 km dan konservasi penyu di pantai Samas, Patihan. Penanganan sampah di tempat-tempat wisata dengan melaksanakan daur ulang dan membuat rumah sampah, serta pelestarian penyu.

## **4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil**

### **4.2.1 Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan teknik purposive sampling kepada subjek penelitian atau informan seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab 3.2.1 sebelumnya.

Berkaitan dengan objek yang diteliti merupakan kesadaran nilai dan norma maritim masyarakat pesisir Bantul serta meningkatkan kemampuan

pemda Bantul dalam memperkuat nilai dan norma maritim masyarakat Bantul. Informan kunci dalam penelitian ini adalah masyarakat Bantul yang memiliki nilai dan norma maritim serta SKPD pemda Bantul yang berwenang untuk memperkuat nilai dan norma maritim masyarakat Bantul. Namun untuk memperdalam informasi dan kebutuhan triangulasi data, peneliti juga melakukan wawancara dengan ahli dan akademisi yang pakar di bidang budaya maritim Indonesia. Sedangkan untuk data sekunder dapat dilakukan dengan; studi pustaka pada buku, jurnal, dokumen, berita, perundang-undangan, dan situs internet yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

#### 4.2.1.1 Pengumpulan Data Primer

Data primer dalam Tesis ini dikumpulkan menggunakan teknik wawancara kepada subjek penelitian dalam penelitian ini terdapat 16 Narasumber yang diwawancarai berasal dari Badan Perencanaan Daerah Bantul, Dinas Pariwisata Bantul, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan perikanan Bantul, Dinas Lingkungan Hidup, SMKN 1 Sanden, Posal Samas, nelayan Samas, nelayan Depok, nelayan Patihan, penyewaan tikar, pedagang kuliner, tokoh adat, tokoh agama, pemuda sakabahari dan akademisi/pakar. Di bawah ini adalah rincian dari narasumber yang berhasil diwawancarai.

**Tabel 4.4 Data Narasumber Penelitian**

No	Nama	Instansi/Masyarakat	Jabatan
1	Priyanto, ST	Bappeda	Staf Ekonomi Sarana dan Prasarana
2	Istriyani, M.sc	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan perikanan	Kabid Kelautan dan Perikanan
3	Ratni Negsih, M.sc	Dinas Pariwisata	Staf Pengembangan Destinasi
4	Agus Sutardi M.Pd	SMKN 1 Sanden	Staf Pengajar

5	Mujahid	Dinas Lingkungan Hidup	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
6	Peltu Usman Udin HS	Lanal Yogyakarta	Komandan Posal Samas
7	Sarijan	Masyarakat Pesisir	Tokoh Agama
8	Sadino	Masyarakat Pesisir	Tokoh Adat dan Ketua Pokwasnas
9	Subagyo	Masyarakat Pesisir	Nelayan Patihan
10	Parwanto	Masyarakat Pesisir	Nelayan Depok
11	Sutarman	Masyarakat Pesisir	Nelayan Samas/tambak
12	Suranto	Masyarakat Pesisir	Penjual kuliner
13	Oky Setiawan	Masyarakat Pesisir	Ketua Pokdarwis
15	Kevin	Masyarakat Pesisir	Pemuda Sakabahari
15	Dr. Ir. Indriyono Soesilo, M. Sc	Akademisi	Mantan Kemenko Maritim
16	Prof Intan Ahmad	Akademisi	Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Menristekdikti

Sumber : Diolah oleh peneliti

Adapun pembuatan panduan wawancara dalam penelitian ini ditentukan secara disiplin berdasarkan matrix penelitian yang dibuat sebelum penelitian ini dilaksanakan sebagai panduan penelitian agar tetap terarah dan fokus mengikuti tahap-tahap dalam SSM. Matrix penelitian tersebut berangkat dari penjabaran latar belakang permasalahan yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut kemudian dibuat dugaan sementara atau hipotesis operasional, maka berdasarkan hipotesis operasional tersebut ditentukan pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut menjadi dasar peneliti untuk mengajukan wawancara secara mendalam dengan subjek penelitian.

#### 4.2.1.2 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini didapat melalui telaahan dokumen dari subjek penelitian, studi pustaka dan hasil seminar. Untuk pencarian data sekunder di perpustakaan peneliti mencari buku-buku referensi yang relevansi dengan objek penelitian baik yang dapat ditemukan di perpustakaan maupun yang didapatkan dari pengaksesan *online*. Selanjutnya untuk telaah dokumen peneliti membaca dan menganalisa dokumen yang didapatkan untuk kemudian diarahkan, sesuai dengan pertanyaan penelitian. Untuk seminar-seminar peneliti mendapatkan pendapat narasumber yang disesuaikan dengan objek yang akan diteliti. Adapun dokumen-dokumen yang didapat dan dapat mendukung data primer yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut;

- a. Kebijakan kelautan Indonesia.
- b. Peraturan daerah kabupaten Bantul nomor 11 tahun 2016 tentang rencana kerja pembangunan jangka menengah (RKPJM) Kabupaten Bantul 2016-2021.
- c. Peraturan bupati Bantul nomor 38 tahun 2016 rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten Bantul 2017.
- d. Kabupaten Bantul Dalam Angka 2016.
- e. Undang-undang no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditindaklanjuti dengan program pengembangan wilayah pesisir.
- f. Peraturan kabupaten Bantul , Peraturan Bupati Bantul No. 127 Tahun 2016 mengatur Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Bantul.
- g. Peraturan bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pertanian, pangan, kelautan dan perikanan kabupaten Bantul.

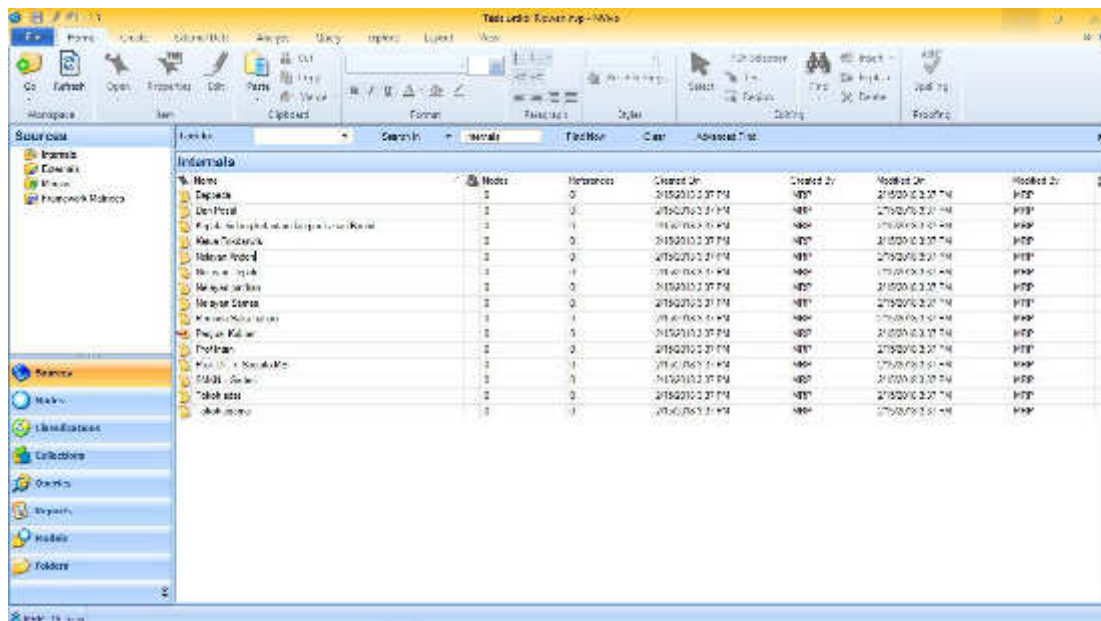
- h. Peraturan daerah Nomor 72 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja badan lingkungan hidup kabupaten Bantul, tugas pokok badan lingkungan hidup kabupaten Bantul.
- i. Peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang kewenangan dan urusan kabupaten Bantul

#### **4.2.2 Pengolahan Data**

Data primer dan data skunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan *software* Nvivo. Data primer dan data sekunder kemudian dibuat kategori dengan menggunakan *coding* terhadap data-data tersebut untuk membantu menyusun pemikiran penelitian pada pembuatan *root definition*, model konseptual dan pembahasan. *Coding* dilakukan secara terstruktur berdasarkan turunan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian, studi litelatur, telaahan dokumen, dan hasil wawancara dengan narasumber. Dalam NVivo, data primer dan data skunder dikode sesuai dengan kategori tema yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian menjadi bahan acuan untuk proses analisis data. Keunggulan NVivo adalah seluruh data terekam, hasil *coding* per kategori dapat dilihat secara langsung berupa kutipan-kutipan hasil wawancara yang relevan dan sesuai dengan kategori, presentase pandangan narasumber terhadap kategori-kategori, tema dan juga triangulasi data. Di mana seluruh narasumber memberikan pandangan terhadap pertanyaan-pertanyaan wawancara. Di dalam NVivo diperjelas mekanisme triangulasi tersebut, di mana dapat dilihat alur dari distribusi transkrip wawancara tersebut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.

Proses pembuatan *coding* dilakukan secara sederhana dengan membuat *nodes* yang berisi tema besar dan tema umum yang disesuaikan

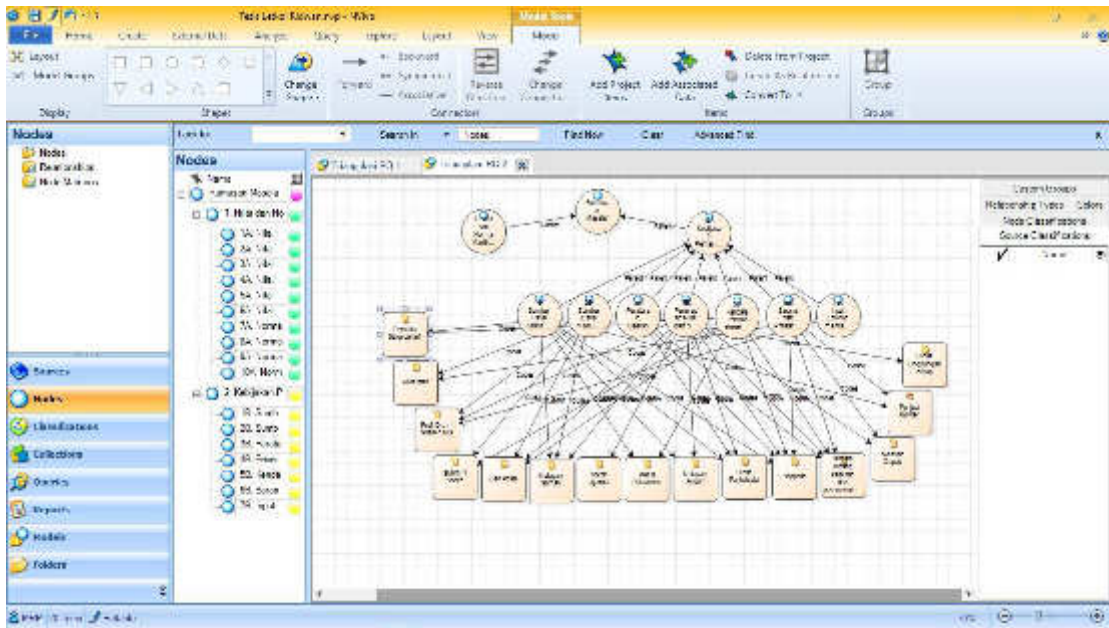
dengan pertanyaan penelitian. Sumber data dapat langsung tersimpan secara utuh di dalam tempat penyimpanan NVivo dan dapat diakses kapan saja. Selain itu untuk mendukung analisis dari penelitian ini, NVivo dapat membuat berbagai macam diagram, chart, skema-skema yang telah disusun berdasarkan sumber data dan nodes-nodes *coding* yang sebelumnya telah dibentuk.



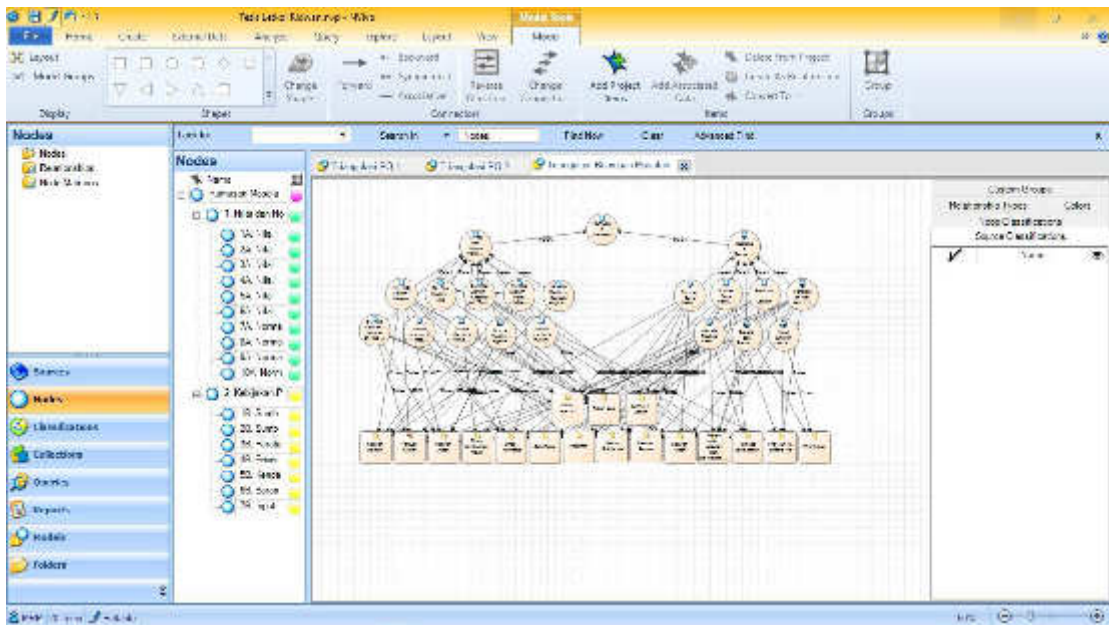
Gambar 4.1 Proses memasukkan data wawancara ke dalam *software* NVivo







**Gambar 4.6. Aplikasi NVivo dalam Triangulasi Pertanyaan Penelitian 2 terhadap Informan**



**Gambar 4.7. Aplikasi NVivo dalam triangulasi rumusan masalah terhadap informan**

### **4.2.3 Analisis Data**

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi negara maritim dengan strateginya PMD. PMD merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Dari lima pilar PMD, adapun pilar pertama; pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau lebih, bangsa Indonesia seharusnya menyadari melihat identitas dirinya sebagai bangsa besar yang mampu memanfaatkan sumber daya maritim untuk menyejahterakan rakyatnya.

Kabupaten Bantul salah satu kabupaten yang memiliki garis dan pesisir pantai tentu harus memiliki budaya maritim yang kuat untuk mendukung Indonesia sebagai PMD. Pada penelitian ini yang akan menjadi fokus pembahasan adalah mengenai pembangunan budaya maritim di Kabupaten Bantul dengan melihat nilai dan norma maritim serta bagaimana meningkatkan nilai dan norma maritim sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan budaya maritim begitu juga kemampuan pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim di dalam SSM yang diperkenalkan oleh Checkland, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh peneliti. Tahapan pertama dari keseluruhan proses tersebut adalah untuk menetapkan situasi yang dianggap problematik. Proses ini menjadi hal yang sangat penting karena memiliki hubungan dengan seluruh aktor yang terlibat. Selain itu tahapan ini menjadi tahapan kunci untuk bisa menjelaskan situasi problematis yang mendorong dilakukannya suatu penelitian untuk melakukan perubahan, perbaikan ataupun penyempurnaan terhadap kondisi yang dianggap problematik tersebut (Hardjosoekarto, 2012) Checkland dan scholes (1990) Hardjosoekarto, menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap analisis yang dapat dilakukan untuk memahami situasi di dunia nyata, Analisis satu (Intervensi), Analisis dua (Sosial) dan Analisis tiga (politik). (Hardjosoekarto, 2012).

#### 4.2.3.1 Analisis Satu (intervensi)

Analisis satu mempunyai fungsi untuk menentukan tiga (3) pihak yang memiliki peranan penting dalam kajian untuk memahami suatu problematis. Pihak tersebut terdiri dari Klien (*Clients*), yaitu pihak yang menyebabkan terjadinya suatu intervensi terhadap suatu problematis. Kedua praktisi (*Practitioners*), yaitu pihak yang melakukan kajian dengan SSM. Terakhir atau pihak ketiga adalah pihak yang berperan sebagai pemilik isu (*Owners of the Issues Addressed*). Pihak yang memiliki kepentingan atau mendapatkan dampak dari suatu situasi ataupun hasil upaya perbaikan yang dilakukan terhadap situasi problematis tersebut (Hardjosoekarto, 2012), Dari ketiga pihak ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 4.5 Analisa Satu (Intervensi): *Clients, Partitioners, and Owners***

<b><i>Clients</i></b>	Peneliti	Ridwan
	Pembimbing	Laksamana Muda TNI. Dr. Amarulla Octavian, S.T., MSc., D.E.S.D
		Bayu A. Yulianto, M.Si.
<b><i>Practitioners</i></b>	Peneliti	Ridwan
<b><i>Owners</i></b>	Kelompok Regulator	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup
	Kelompok Pelaksana	Masyarakat Pesisir Bantul
	Kelompok Pendukung	SMKN 1 Sanden, Posal Samas

Sumber : Diolah oleh Peneliti

#### **4.2.3.2 Analisis Dua (Sosial)**

Analisis dua merupakan analisis yang dilakukan menggunakan sudut pandang sosial. Proses ini dilakukan untuk memahami situasi sosial secara umum, dengan maksud dapat memberikan suatu gambaran yang semakin komprehensif berkenaan dengan situasi di dunia maya. Menurut Checkland dan Poulter (2006) dalam Hardjosoekarto, menerangkan bahwa terdapat tiga elemen sosial yang dapat dijadikan fokus tahap analisis dua (*Sosial*), yaitu; elemen peran (*roles*), norma (*norms*) dan nilai-nilai (*values*).

- a. Elemen peran (*roles*) merupakan posisi sosial yang menandai perbedaan antara kelompok ataupun organisasi.
- b. Elemen norma (*norms*) merupakan perilaku yang diharapkan terkait dengan peran.
- c. Elemen nilai (*values*) merupakan standar atau kriteria di mana perilaku sesuai dengan peran.

Ketiga elemen tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya, bersifat dinamis dan dapat selalu berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan di dunia nyata.

##### **4.2.3.2.1 Elemen Peran (*Role*)**

Sesuai definisi yang telah dijelaskan oleh Checkland dan Poulter, elemen peran atau *role* memiliki fungsi untuk menjelaskan posisi sosial suatu kelompok atau organisasi. Keutamaan dari elemen peran ini adalah untuk melihat pandangan dari setiap orang atau organisasi yang menyikapi terhadap nilai dan norma maritim yang ada.

Budaya maritim merupakan salah satu pilar kebijakan PMD yang harus disikapi oleh seluruh elemen bangsa baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Semua elemen bangsa harus mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya maritim yang dimiliki Indonesia untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten Bantul sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang mempunyai sumber daya maritim harus mampu mengelola memanfaatkan tentu untuk

memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya baik jasmani maupun rohani. Masalah pembangunan budaya maritim di Kabupaten Bantul yang terlibat adalah Bappeda Bantul, Dinas Pariwisata Bantul, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Bantul, Dinas Lingkungan Hidup merupakan kelompok yang memiliki tugas memperkuat nilai dan norma maritim masyarakat Bantul, kelompok pelaksana adalah masyarakat pesisir Bantul sebagai pelaksana dalam memanfaatkan sumber daya maritim sehingga mempunyai nilai dan ada norma yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani dan kelompok pendukung, SMKN 1 Sanden, Posal Samas adalah kelompok yang secara langsung tidak dibawah bupati Bantul tetapi mempunyai tugas di bidang maritim.

Proses yang dilewati langsung meneliti nilai dan norma maritim yang ada di masyarakat pesisir Bantul dengan meneliti kesadaran masyarakat pesisir Bantul, setelah itu meneliti kemampuan pemda Bantul dalam meningkatkan nilai dan norma maritim yang ada di Bantul.

Dalam melakukan analisis sosial khususnya peran dalam mendefinisikan elemen peran yang terlibat, dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok regulator yaitu pihak yang berdasarkan fungsi meningkatkan nilai dan norma maritim masyarakat Bantul, kelompok pelaksana yaitu kelompok yang melaksanakan pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani, sedangkan kelompok pendukung adalah kelompok yang mendukung terhadap pelaksanaan pemanfaatan sumber daya maritim.

**Tabel 4.6 Kelompok Peran**

<b>Kelompok Regulator</b>	<b>Kelompok Pelaksana</b>	<b>Kelompok Pendukung</b>
Bappeda Bantul, Dinas Pariwisata Bantul, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Bantul, Dinas Lingkungan Hidup Bantul	Masyarakat pesisir Bantul.	SMKN 1 Sanden, Posal Samas

Sumber : Diolah oleh Peneliti

**a. Kelompok Regulator**

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat melimpah. Problematik yang sekarang adalah kurangnya kesadaran masyarakat maupun pemerintah terhadap lingkungan maritim. Sumber daya kelautan Indonesia yang berlimpah dimanfaatkan dengan cara dicuri bahkan dirusak oleh negara lain. Kemampuan bangsa Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya maritimnya masih sangat minim, karena sumber daya manusia yang rendah. kebijakan pemerintah yang berorientasi pada daratan menjadi kendala tersendiri begitu juga yang terjadi di Kabupaten Bantul. Oleh karena pemda Bantul harus meningkatkan kemampuan dalam memperkuat nilai dan norma maritim. Budaya maritim masyarakat Bantul harus dilaksanakan agar dapat segera terwujud. Kelompok regulator ini membuat perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan pemanfaatan sumber daya maritim. Telah diidentifikasi adapun SKPD yang terlibat adalah Bappeda Kabupaten Bantul, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup serta didukung oleh SMKN 1 Sanden dan Posal Samas.

### **1) Bappeda Kabupaten Bantul**

Berdasarkan peraturan Bupati Bantul no. 127 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kemampuan serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Maka disini jelas bahwa Bappeda merumuskan rencana pemanfaatan dan pengeloaan sumber daya alam yang ada di Bantul termasuk sumber daya Lautan.

(Bappeda.bantulkab.go.id).

### **2) Dinas Pariwisata Bantul**

Berdasarkan peraturan Bupati no. 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, kemampuan dinas Pariwisata adalah : “melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.” Dari sini dapat kita lihat bahwa pengelolaan dan pemanfaatan pariwisata merupakan tugas dan tanggung jawabnya begitu juga pariwisata maritim yang didalamnya sedekah laut yang termasuk agenda wisata di pantai selatan Bantul, termasuk tradisi sedekah laut sendiri merupakan agenda dari dinas Pariwisata (pariwisata.bantulkab.go.id, 2016)

### **3) Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Bantul.**

Berdasarkan peraturan bupati bantul nomor 115 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pertanian, pangan, kelautan dan perikanan Kabupaten bantul bertugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, mengembangkan usaha, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan.(bantulkab.go.id, 2017)

#### **4) Dinas Lingkungan Hidup Bantul**

Perda Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bertugas mengelola lingkungan hidup, menumbuhkan kesadaran masyarakat, melestarikan dan memelihara lingkungan hidup termasuk di bidang maritim yang sudah dilakukan yaitu penanganan dan pengelolaan sampah di tempat wisata pantai, pelestarian penyu, mangrove dan lain sebagainya.

(dlh.bantulkab.go.id 2017)

#### **b. Kelompok Pelaksana**

Kelompok pelaksana merupakan pihak-pihak yang memiliki kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya maritim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani. Kelompok pelaksana lebih terfokus kepada pelaksanaan program-program dari pemda Bantul di sektor maritim. Hasil identifikasi adalah masyarakat pesisir Bantul.

#### **c. Kelompok Pendukung**

Kelompok pendukung adalah kelompok yang secara struktur tidak berada dibawah pemda Bantul tetapi mempunyai tugas dan fungsi dibidang maritim, seperti pertahanan, keamanan, penyiapan sumber daya manusia, pendayagunaan potensi maritim. Kelompok pendukung di kabupaten Bantul diantaranya:

#### **1) Sekolah Menengah Kejuruan 1 Sanden (Kelautan dan Perikanan).**

Peraturan gubernur daerah Istimewa Yogyakarta nomor 56 Tahun 2016 “tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian kemampuan serta tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga”. Pasal 47 (1) SMKN mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan termasuk kelautan dan perikanan di wilayah Bantul. (peraturan.bpk.go.id.2017)

## 2) Posal Samas

Tugas pokok TNI/TNI AL berdasarkan Undang-Undang no. 34 tahun 2004 tugasnya sebagai pelaksana tugas TNI matra laut serta pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang didalamnya termasuk pembinaan potensi maritim. (tnial.mil.id,2017)

### 4.2.3.2.2 Elemen Norma (*Norms*)

Berdasarkan dari pemikiran Checkland dan Poulter (2006), yang dimaksud dengan norma adalah suatu perilaku yang diharapkan dan memiliki asosiasi terkait dengan peran. Norma sendiri dapat berwujud pada aturan atau pedoman, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pada pemanfaatan sumber daya maritim yang ada di Kabupaten Bantul terdapat tiga kelompok, yaitu; kelompok regulator, kelompok pelaksana dan kelompok pendukung. Ketiga Kelompok tersebut sama pentingnya dalam memanfaatkan sumber daya maritim sehingga menghasilkan nilai jasmani dan rohani yang baik serta norma yang mengaturnya.

Norma yang berlaku untuk kelompok regulator adalah aktor-aktor yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam memperkuat nilai dan norma maritim masyarakat Bantul. Sementara kelompok pelaksana adalah merupakan pihak-pihak yang memiliki kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya maritim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani, sedangkan kelompok pendukung adalah kelompok yang membantu pemda Bantul dan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

### 4.2.3.2.3 Elemen Nilai (*Values*)

Checkland dan Poulter (2006) mendefinisikan elemen nilai (*Values*) sebagai standar atau kriteria kedalam mana perilaku sesuai dengan peran dapat dinilai. Maksud dari elemen nilai ini sendiri adalah tentang apa yang diyakini informan terhadap (1) Kesadaran nilai dan norma maritim

masyarakat pesisir Bantul dan (2) Kemampuan sesuai fungsi pemda Bantul dalam memperkuat nilai dan norma maritim masyarakat Bantul.

a. Kesadaran Nilai dan norma maritim di masyarakat pesisir Bantul

- Masyarakat pesisir Bantul menyadari bahwa sumber daya maritim belum dimanfaatkan secara maksimal.
- Masyarakat pesisir Bantul belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkan sumber daya maritim yang ada.

b. Fungsi pemda Bantul dalam memperkuat nilai dan norma maritim masyarakat Bantul.

- Pemda Bantul menyadari bahwa kebijakannya belum mendukung secara maksimal dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul.
- Pemda Bantul belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mencukupi dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul.

#### **4.2.3.3 Analisis Tiga (Politik)**

Analisis politik merupakan langkah ketiga dalam tahap pengenalan situasi problematis. Politik diyakini menentukan banyak hal, termasuk dalam memutuskan sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Fokus dari analisis politik adalah untuk mempelajari struktur *power* pada situasi dan bagaimana kemudian mengontrolnya (Hardjosoekanto, 2012:77). Analisis politik ini kemudian terdiri dari *disposition of power* dan *nature of power* yang dimiliki oleh tiap-tiap struktur organisasi setiap institusi atau satuan kerja, baik dalam kelompok regulator maupun kelompok pelaksana yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya maritim yang ada di Kabupaten Bantul.

#### **4.2.3.3.1 *Disposition of power***

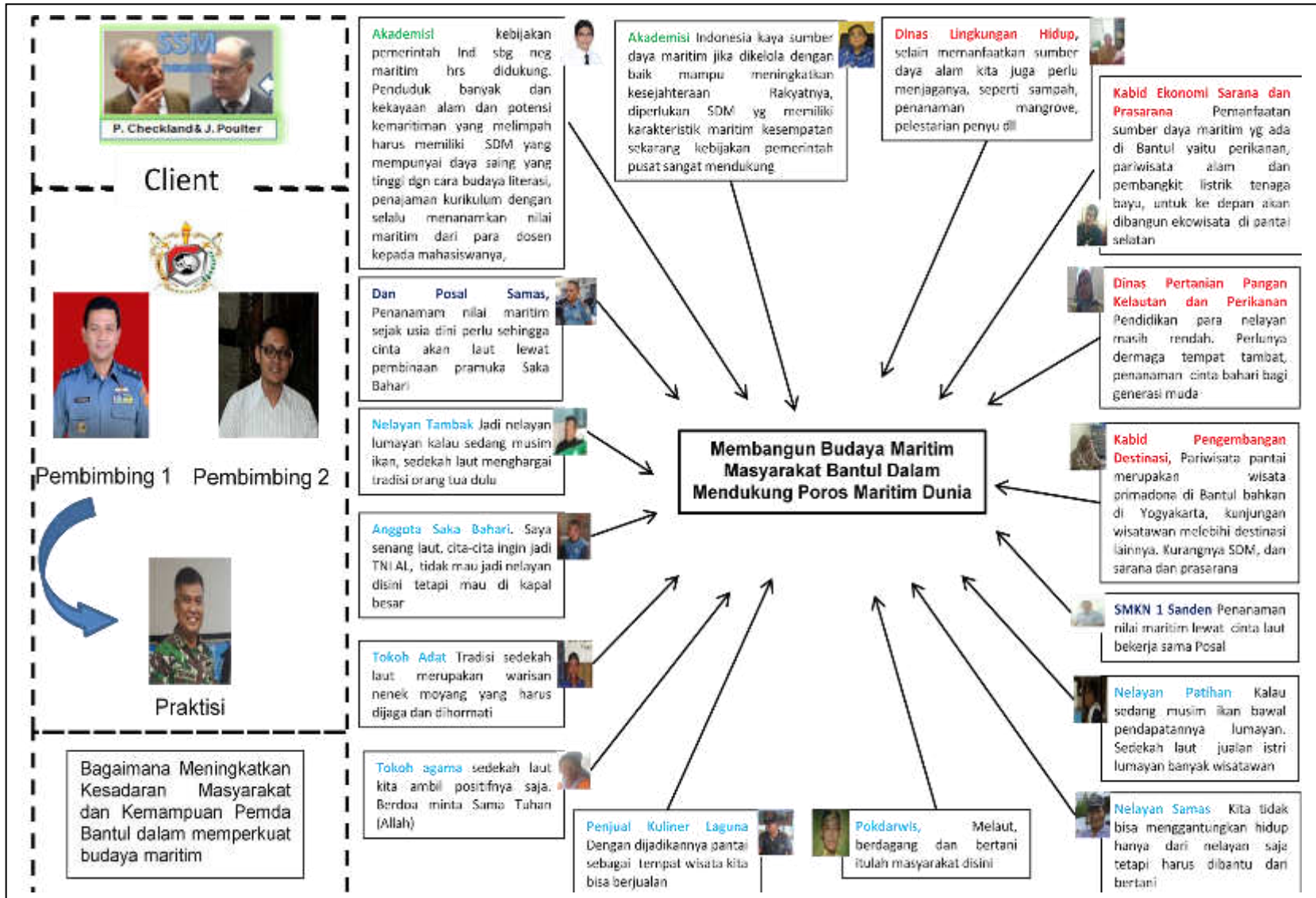
- a. Komitmen politik ditunjukkan oleh bupati Bantul sebagai kepala pemerintah daerah, ditekankan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka harus memanfaatkan dan mengelola seluruh sumber daya maritim yang dimilikinya. Pemerintah daerah dalam hal ini direpresentasikan oleh Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Instansi tersebut memiliki kaitan langsung dalam menentukan dan meningkatkan nilai dan norma maritim di Bantul.
- b. Bappeda yang dipimpin oleh Kepala Bappeda, merupakan leading sektor dalam perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan di kabupaten Bantul.
- c. Dinas pertanian pangan kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh kepala dinas pertanian, merupakan leading sektor dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul pada sektor perikanan.
- d. Dinas pariwisata yang dipimpin oleh kepala dinas pariwisata merupakan leading sektor dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul sektor pariwisata.
- e. Dinas lingkungan hidup yang dipimpin oleh kepala dinas lingkungan hidup merupakan leading sektor dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul bidang pelestarian lingkungan hidup maritim.
- f. SMKN 1 Sanden merupakan sekolah *vokasi* bidang perikanan dan kelautan tingkat menengah yang menyiapkan sumber daya manusia bidang maritim.
- g. Posal Samas yaitu Intitusi di bawah pemerintahan pusat yang bertugas untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara di laut dari batas pantai sampai laut teritorial dan medayagunakan potensi maritim.

#### **4.2.3.3.2 Nature of power**

- a. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menentukan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat pesisir Bantul dengan kebijakan dan kewenangannya.
- b. Kemampuan untuk meningkatkan nilai dan norma maritim dengan memanfaatkan sumber daya maritim yang ada sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

#### **4.2.3.4 Rich Picture**

*Rich picture* merupakan tahap lanjutan dari SSM. Pembuatan *rich picture* bertujuan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, struktur, sudut pandang *rich picture* dari suatu proses yang sedang berjalan, isu yang coba dikenali dan potensi-potensi isu lainnya secara informal (Checkland and Poulter, 2010; 210). Secara umum adalah suatu gambaran besar dari tahapan-tahapan SSM yang sebelumnya telah dilakukan dan dituangkan kedalam sebuah bentuk rancangan gambar yang didapat dari hasil *interview* dengan para narasumber yang bisa diwawancarai. Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa poin yang dapat diambil dari narasumber, khususnya menurut pandangan mereka tentang nilai dan norma yang menyebabkan mereka memanfaatkan sumber daya maritim serta bagaimana kebijakan pemda Bantul dalam meningkatkan nilai dan norma maritim sehingga mampu mendukung budaya maritim.



Gambar 4.8 Rich Picture

Penjelasan awal dimulai dari nilai dan norma yang ada di masyarakat pesisir Bantul serta kebijakan pemda Bantul dalam meningkatkan nilai dan norma maritim, di mana aktor yang terlibat sekaligus pemilik isu (O). Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup selaku kelompok regulator sedangkan masyarakat pesisir Bantul selaku kelompok pelaksana, SMKN 1 Sanden dan Pasal Samas sebagai kelompok pendukung

Adapun pemilik isu dari kesadaran nilai dan norma maritim adalah masyarakat pesisir Bantul sedangkan pemilik isu peningkatan nilai dan norma maritim adalah pemerintah yang direpresentasikan oleh Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, SMKN 1 Sanden dan Pasal Samas.

Selain itu, untuk lebih memahami situasi yang problematis di dunia nyata (*real world*), peneliti juga melakukan penelitian (wawancara) terhadap praktisi, mantan praktisi dan akademisi yang memahami masalah budaya maritim, yaitu Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc. mantan Kemenko Maritim serta Prof. Intan Ahmad, Ph.D sebagai Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi selaku sumber data dan triangulasi data.

#### **4.2.3.5 *System Thinking* Kesadaran Masyarakat dan Kemampuan Pemda Bantul dalam meningkatkan budaya maritim**

Di dalam *Soft System Methodology* (SSM) tahap ketiga dan keempat merupakan tahapan yang digolongkan *system thinking*. Tahapan ini terdiri dari pembuatan *root definition* dari sistem yang relevan dan pembuatan model konseptual yang berdasarkan *root definition* yang telah dipilih dan diberi nama pada tahap sebelumnya. Model konseptual yang diciptakan berdasarkan sudut pandang tertentu. Model ini bukan merupakan perwujudan dari dunia nyata itu sendiri, karena merupakan hasil berfikir serba sistem sesuai dengan dunia nyata (Harjosoekarto, 2012)

#### 4.2.3.5.1 *Root Definition* Budaya Maritim yang ada di Masyarakat Pesisir Bantul

*Root Definition* merupakan suatu deskripsi secara terstruktur dari suatu sistem aktivitas manusia yang relevan dengan situasi problematis. Di dalam SSM yang dirumuskan adalah sistem mana yang relevan dengan situasi problematis dunia nyata yang akan digunakan sebagai alat untuk membantu merumuskan langkah perbaikan, penyempurnaan atau perubahan situasi dunia nyata. Di dalam *root definition* tergambar tentang apa (*what*), mengapa (*why*) dan bagaimana (*how*) (Hardjosoekarto, 2012)

- a. Apa (*what*) menggambarkan tujuan atau sasaran jangka pendek bekerjanya sistem aktivitas yang dimaksud.
- b. Bagaimana (*How*) menggambarkan cara untuk mewujudkan tujuan atau sasaran jangka pendek
- c. Mengapa (*why*) menggambarkan tujuan atau sasaran jangka panjang

*root definition* ditulis berdasarkan semua informasi tentang data yang telah dikumpulkan, di eksplorasi dan dibahas. Checkland (2006) dalam menjelaskan rumus umum dalam menyusun sebuah *root definition*, yaitu; mengerjakan P dengan Q untuk R. di mana PQR menjawab pertanyaan apa, bagaimana dan mengapa.

**“Melakukan (*do*) P, dengan (*by*) Q, untuk mencapai (*in order to Achieve*)”**

Untuk membuat *root definition* secara benar dan dapat digunakan sebagai dasar model konseptual, maka perlu diuji dengan menggunakan analisis CATWOE. CATWOE merupakan suatu alat bantu pengingat untuk menggambarkan sebuah sistem aktivitas manusia yang relevan. CATWOE tersebut sebagai berikut :

- **C: Customers**

Adalah orang atau sekelompok orang yang langsung atau hampir langsung menjadi subjek yang dirugikan atau diuntungkan oleh terjadinya proses transformasi

- **A: Actors**

Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan proses transformasi (T)

- **T: Transformation**

Proses perubahan *input* menjadi *output*, baik yang bersifat konkret atau abstrak

- **W: Worldview (Weltanschauungs)**

Sudut pandang, kerangka pikir atau citra yang menjadikan *root definition* atau T memiliki makna yang berarti dalam konteks

- **O: Owners**

Pihak-pihak yang mengontrol sistem; memiliki kemampuan untuk merubah atau menghentikan proses transformasi (proses T dapat diubah dan dicegah oleh O).

- **E: Environmental Constrains**

Lingkungan (sistem) yang dikategorikan menjadi hambatan dan kendala dari proses transformasi.

Pengidentifikasian melalui alat bantu CATWOE ini dilakukan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan model konseptual. Model Konseptual dibuat untuk menjawab situasi problematis yang telah dijabarkan melalui *root definition*. Selanjutnya, berdasarkan CATWOE yang telah ditetapkan tersebut akan ditetapkan kriteria “5E” untuk mengukur kinerja bekerjanya sistem aktivitas tersebut, adapun kriteria “5E” yang dimaksud dalam SSM merujuk pada definisi Hardjosoekarto (2012) sebagai berikut:

- a. *Efficacy* (apakah proses transformasi benar-benar dapat berlangsung atau mewujudkan hasil yang diinginkan),

- b. *Efficiency* (apakah dapat berlangsung efisien atau berlangsung dengan penggunaan sumber daya yang minimal),
- c. *Effectiveness* (apakah dapat membantu tercapainya tujuan jangka panjang/R dalam rumus PQR),
- d. *Elegance* (apakah dapat berlangsung elegan),
- e. *Ethicality* (apakah dapat dibenarkan secara moral).

Adapun dari kelima kriteria tersebut tidak diwajibkan untuk menggunakan keseluruhannya, tergantung dari situasi dan konteks penelitian. Terdapat kecenderungan hanya menggunakan 3E yaitu: *Efficacy*, *Efficiency* dan *Effectiveness*. Berhubung konteks yang dibahas dalam penelitian ini adalah masalah nilai dan norma maritim yang ada di masyarakat Bantul dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai dan norma maritim karena keterbatasan dalam menjabarkan *Elegance* dan *Ethicality*, maka penelitian ini hanya menggunakan kriteria 3E.

Terkait dengan pertanyaan penelitian, maka akan dijawab dalam kerangka SSM yaitu melalui dua *root definition*. Kedua *root definition* ini tidak menjawab satu per satu atau secara terpisah pertanyaan penelitian namun saling mengelaborasi. Dalam penelitian ini kedua *root definition*, CATWOE dan Kriteria 3E, sebagai berikut:

### ***Root Definition 1 (RD1)***

**Meningkatkan kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul (P) dengan meningkatkan nilai dan norma masyarakat terhadap sumber daya maritimnya(Q) guna memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani (R).**

**Tabel 4.7 *Root Definition 1 dan Analisis CATWOE***

<b>RD1</b>	<b>Meningkatkan kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul (P) dengan meningkatkan nilai dan norma masyarakat terhadap sumber daya (Q) guna memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani (R)</b>
<i>C (Customer)</i>	Masyarakat pesisir Bantul
<i>A (Actor)</i>	Pemda Bantul
<i>T (Transformation)</i>	Rendahnya kesadaran masyarakat pesisir Bantul bahwa laut mampu memberikan kesejahteraan menjadi sadar
<i>W (Worldview)</i>	Nilai dan norma masyarakat Bantul terhadap sumber daya maritimnya
<i>O (owner)</i>	Bupati Bantul
<i>E (Environmental Constraints)</i>	Pembangunan di darat yang pesat dan orientasi darat tertanam sejak lama

Sumber : Diolah oleh Peneliti

### **Kriteria 3 E**

*Efficacy* : Meningkatkan kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul dengan meningkatkan nilai dan norma maritimnya.

*Efficiency* : Meningkatkan kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai materialnya.

*Effectiveness* : Meningkatkan dan mempertahankan kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai dan norma maritimnya secara maksimal.

### ***Root Definition 2 (RD2)***

**Meningkatkan fungsi pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul (P) dengan meningkatkan kemampuannya untuk memperkuat nilai dan norma maritim masyarakatnya (Q) sehingga mampu mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia (R)**

**Tabel 4.8 *Root Definition 2* dan Analisis CATWOE**

<b>RD2</b>	<b>Meningkatkan fungsi pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul (P) dengan meningkatkan kemampuannya untuk memperkuat nilai dan norma maritim masyarakatnya (Q) sehingga mampu mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia (R)</b>
<i>C (Customer)</i>	Bappeda, Dinas Pariwisata Bantul, Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, SMKN 1 Sanden dan Posal Samas
<i>A (Actor)</i>	Bupati Bantul
<i>T (Transformation)</i>	Kemampuan pemda Bantul yang masih kurang dalam memanfaatkan dan menjaga sumber daya maritimnya untuk kesejahteraan masyarakatnya menjadi mampu
<i>W (Worldview)</i>	Pemda Bantul membuat kebijakan yang mendukung pembangun budaya maritim
<i>O (owner)</i>	Bupati Bantul
<i>E (Environmental Constraints)</i>	Pembangunan sektor maritim belum menjadi prioritas

Sumber : Diolah oleh Peneliti

### **Kriteria 3 E**

*Efficacy* : Meningkatkan fungsi Pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat pesisir Bantul dengan meningkatkan kemampuannya untuk memperkuat nilai dan norma maritim masyarakatnya.

*Efficiency* : Meningkatkan fungsi Pemda Bantul dalam memperkuat Budaya maritim masyarakat pesisir Bantul dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya dalam memanfaatkan sumber daya maritim.

*Effectiveness* : Membangun budaya maritim masyarakat pesisir Bantul dengan meningkatkan kemampuan Pemda Bantul dan peran serta masyarakatnya.

#### **4.2.3.5.2 Model Konseptual**

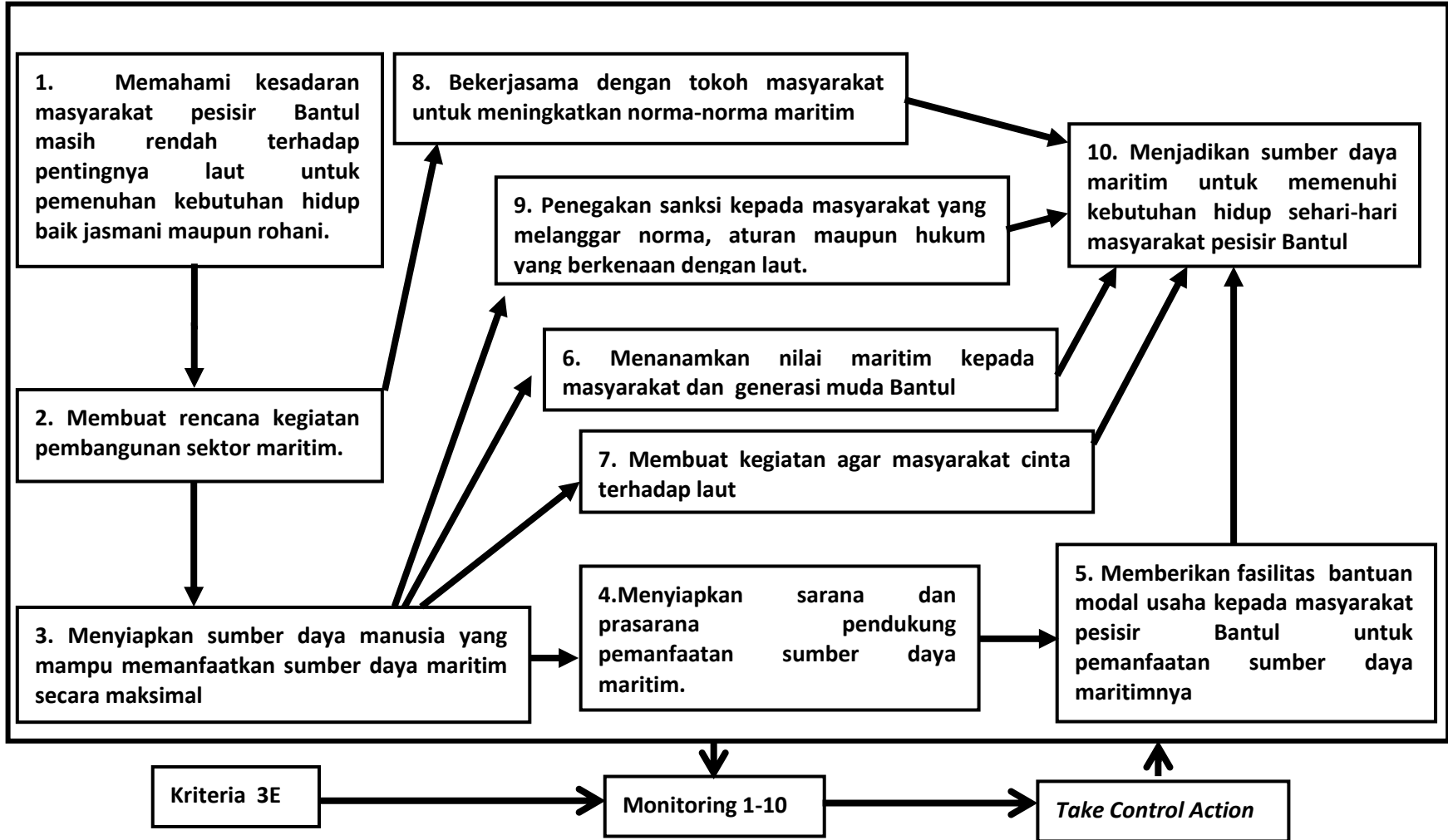
Pembentukan model konseptual adalah tahap keempat dari tujuh tahapan SSM yang telah disebutkan sebelumnya. Pembentukan model konseptual dilakukan dengan menggabungkan semua langkah pada tahap ketiga untuk menentukan sistem relevan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau situasi problematis dunia nyata. Dengan kata lain, tahap ini akan menghubungkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka proses T sehingga menjadi suatu sistem kegiatan (sistem aktivitas) yang utuh.

Terdapat beberapa langkah untuk membuat sistem aktivitas untuk menjadi Model Konseptual. Menurut Checkland dan Poulter (2010) adapun urutan langkah membuat model konseptual, yaitu; pertama mengumpulkan seluruh garis pedoman PQR, CATWOE, *root definition*, dan Kriteria 5E (dalam penelitian ini 3E). Kedua, menuliskan tiga kelompok aktivitas yang memuat tentang hal yang diubah, pelaku yang mengubah serta yang mengalami perubahan. Ketiga, membuat anak panah yang menghubungkan ketiga kluster aktivitas tersebut. Terakhir, membuat tiga aktivitas untuk melakukan monitoring, kontrol serta kriteria pengukuran performa T. Dalam

konteks penelitian ini, di mana langkah ketiga telah dilakukan, maka dapat dituliskan semua aktivitas yang sesuai dengan ketiga Kluster tersebut, yaitu:

***Root Definition 1 (RD1)***

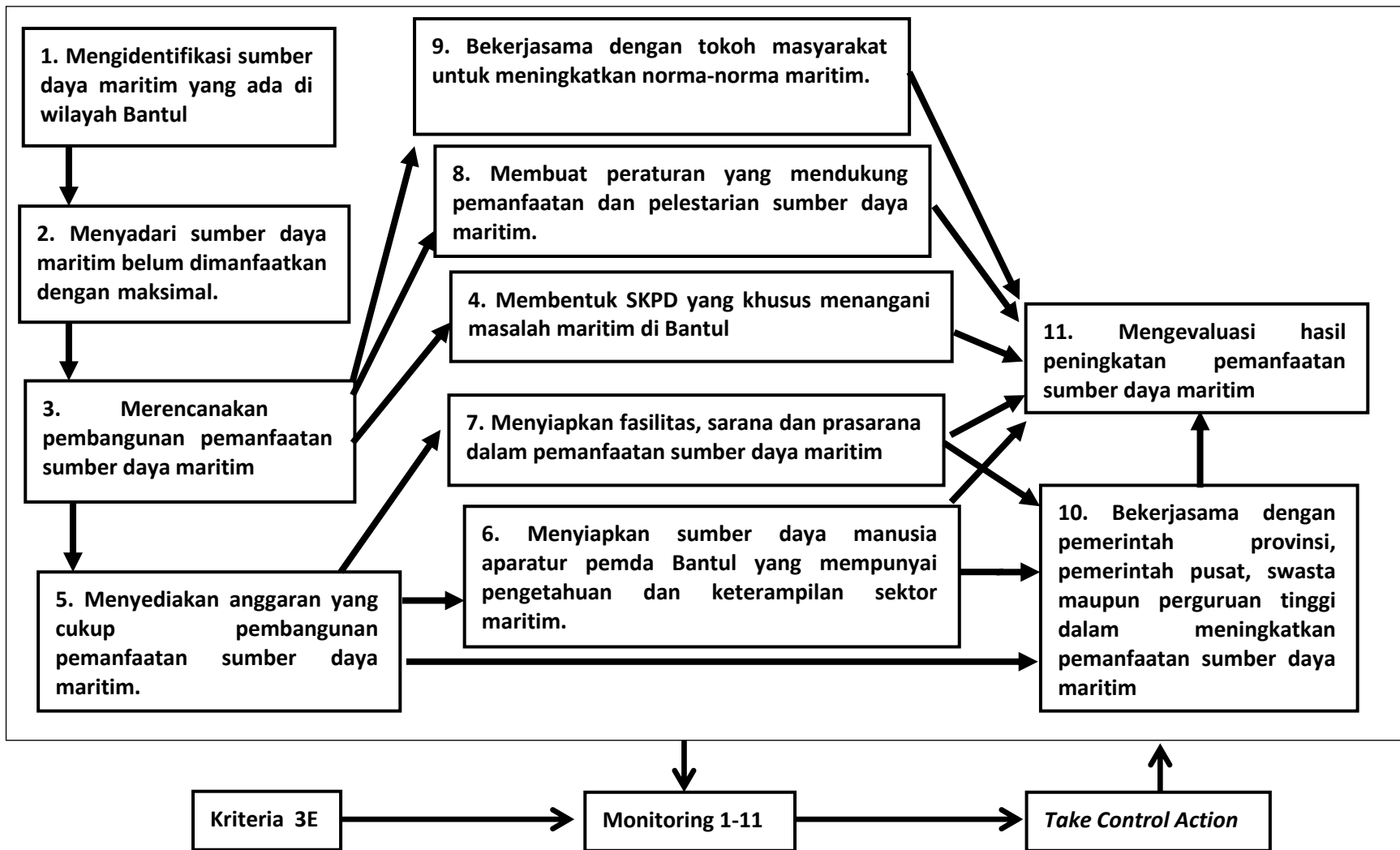
1. Memahami kesadaran masyarakat pesisir Bantul masih rendah terhadap pentingnya sumber daya maritim untuk pemenuhan kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani.
2. Membuat rencana kegiatan pembangunan sektor maritim.
3. Menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan sumber daya maritim secara maksimal.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan sumber daya maritim.
5. Memberikan fasilitas bantuan modal usaha kepada masyarakat pesisir Bantul dalam pemanfaatan sumber daya maritimnya.
6. Menanamkan nilai maritim kepada masyarakat dan generasi muda Bantul.
7. Membuat kegiatan agar masyarakat cinta terhadap laut.
8. Bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan norma-norma maritim.
9. Penegakan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma, aturan maupun hukum yang berkenaan dengan laut.
10. Menjadikan sumber daya maritim untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat pesisir Bantul.



Gambar 4.9 Model Konseptual dan Aktivitas *Root*

### ***Root Definition 2 (RD2)***

1. Mengidentifikasi sumber daya maritim yang ada di wilayah Bantul.
2. Menyadari sumber daya maritim belum dimanfaatkan dengan maksimal.
3. Merencanakan pembangunan pemanfaatan sumber daya maritim.
4. Membentuk SKPD yang khusus menangani masalah maritim di Bantul.
5. Menyediakan anggaran yang cukup pembangunan untuk pemanfaatan sumber daya maritim.
6. Menyiapkan sumber daya manusia aparatur pemda Bantul yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sektor maritim.
7. Menyiapkan fasilitas, sarana dan prasarana dalam pemanfaatan sumber daya maritim.
8. Bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta maupun perguruan tinggi dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim.
9. Bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan norma-norma maritim.
10. Membuat aturan-aturan untuk menjaga kelestarian sumber daya maritim.
11. Mengevaluasi hasil peningkatan fungsi pemda Bantul dalam pemanfaatan sumber daya maritim.



Gambar 4.10 Model Konseptual dan Aktivitas *Root Definition*

#### 4.2.3.5.3 Model Konseptual dan Situasi Problematik Dunia Nyata

Pada Sub bab ini merupakan tahapan ke lima dalam kerangka SSM, yaitu; perbandingan model konseptual yang telah dibuat pada tahap empat dengan situasi yang terjadi pada dunia nyata (objek penelitian). Berangkat dari Sub-bab 4.3.5.2 Model Konseptual yang dibuat berdasarkan *root definition* dan telah diperjelas dengan analisis CATWOE untuk mengidentifikasi proses T yang akan digunakan guna melakukan perbaikan situasi problematis dunia nyata.

Berdasarkan Checkland dan Poulter (2010), Model Konseptual yang dibuat bukan digunakan untuk mencari kekurangan dari situasi dunia nyata tersebut tetapi lebih sebagai dasar atau sumber untuk bertanya mengenai situasi dunia nyata tersebut. Model Konseptual hanya sebuah model buatan yang dipengaruhi oleh pandangan umum yang murni (*pure world view*) sedangkan situasi dunia nyata dipengaruhi oleh banyak faktor dan perspektif (dari para pelaku yang terlibat/*issue owners*). Hal ini akan membuat timbulnya pertanyaan apakah model tersebut benar terjadi dalam dunia nyata?, apakah ada cara lain untuk melakukan aktivitas tersebut dan sebagainya (Hardjosoekarto, 2012).

Mengacu pada kedua Model Konseptual yang telah dibuat, terdapat proses transformasi (T) yang berisi nilai dan norma maritim yang ada di masyarakat Bantul serta kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai dan norma maritim dalam kondisi internal dan eksternal. Peneliti selanjutnya menentukan pertanyaan yang digunakan untuk meninjau ulang situasi problematis dunia nyata berdasarkan sistem aktivitas dalam Model Konseptual tersebut. Pertanyaan dibentuk berdasarkan pemikiran logis (*logical thinking*) dari peneliti sebagai praktisi SSM. Adapun pertanyaannya sebagai berikut:

- a. Apakah kegiatan di dalam Model Konseptual terjadi juga di dunia nyata?
- b. Apakah mampu memberikan solusi?
- c. Siapa saja yang melaksanakan kegiatan tersebut?

- d. Apakah proses dalam model ini dapat terus berlangsung?
- e. Adakah cara lain (alternatif) dalam melakukan kegiatan tersebut?

Kelima pertanyaan tersebut didasarkan pada kemungkinan unsur E (lingkungan) dan O (pemilik isu) pada CATWOE yang menghambat atau mengubah proses transformasi (T). Setelah pertanyaan tersebut dibuat, peneliti akan menerapkannya ke dalam tabel perbandingan beserta kesimpulan dari hasil komparasi tersebut. Berikut tabel perbandingannya:

**a. Perbandingan Model Konseptual RD1**

No	Aktivitas	Apakah sudah terjadi Apakah memberikan solusi	Siapa yang melakukan	Usulan solusi lain
1	Memahami kesadaran masyarakat pesisir Bantul masih rendah terhadap pentingnya sumber daya maritim untuk pemenuhan kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani	Sudah dipahami sudah ada keinginan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim	Bupati Bantul, Bappeda, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup	Dibuat program peningkatan pemanfaatan sumber daya maritim untuk kesejahteraan masyarakat
2	Membuat rencana kegiatan pembangunan sektor maritim	Sudah ada rencana Dibuat rencana pembangunan sektor maritim diutamakan sektor pariwisata karena mampu menyerap banyak tenaga kerja	Bupati Bantul, Bappeda	Dibuat rencana tidak hanya pada sektor pariwisata tetapi sumber perikanan yang sudah ada perlu dikembangkan
3	Menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan sumber	Belum sepenuhnya dilaksanakan terkendala dengan sumber daya manusia aparat pemda Bantul yang	Bappeda, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan,	Bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat, BUMN maupun

	daya maritim secara maksimal	tidak memiliki keahlian bidang maritim dan hasil lulusan sekolah menengah <i>vokasi</i> bidang maritim belum tersalurkan lapangan kerjanya	Dinas Pariwisata, SMKN 1 Sanden	pihak swasta
4	Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan sumber daya maritim.	Belum sepenuhnya dilaksanakan terkendala dengan anggaran yang terbatas	Bupati Bantul, Bappeda, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata	Bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat, BUMN
5	Memberikan fasilitas bantuan modal usaha kepada masyarakat pesisir Bantul untuk pemanfaatan sumber daya maritimnya.	Belum maksimal dengan anggaran yang terbatas hanya mampu melaksanakan usaha kecil	Bupati, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata	Bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat, BUMN maupun pihak swasta
6	Menanamkan nilai maritim kepada masyarakat dan generasi muda Bantul.	Belum sepenuhnya dilaksanakan Banyak masyarakat yang belum peduli dengan kebersihan pantai, selain itu perburuan daging penyu dan telurnya masih dilakukan,	Bappeda, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas lingkungan hidup, SMKN	Perlu dilaksanakan lebih <i>massive</i>

		pembalakan pohon cemara dan pengrusakan pohon mangrove untuk menjaga abrasi pantai	1 Sanden, Posal Samas	
7	Membuat kegiatan agar masyarakat cinta terhadap laut.	Belum maksimal dengan diadakan <i>event-event</i> yang menarik masyarakat untuk mengunjungi laut	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata	Kegiatan bertema laut lebih diperbanyak dan lebih atraktif
8	Bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan norma-norma maritim	Belum maksimal masih banyak perusakan gumukan pasir, sampah, pencurian daging dan telur penyu, pembalakan pohon cemara di pantai untuk kepentingan tambak	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Posal Samas	Sanksi harus ditegakkan baik sosial maupun hukum
9	Penegakkan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma, aturan maupun hukum yang berkenaan dengan laut.	Belum dilakukan	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Posal Samas	Sanksi harus ditegakkan baik sosial maupun hukum
10	Menjadikan sumber daya maritim untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-	Belum dilaksanakan	Bupati Bantul, Bappeda, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan,	Ditingkatkan lagi pemanfaatannya secara maksimal

	hari masyarakat pesisir Bantul		Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat pesisir Bantul	sehingga sumber daya maritim mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pesisir Bantul
--	--------------------------------	--	---	---

**b. Perbandingan Model Konseptual RD2**

No	Aktivitas	Apakah sudah Terjadi Apakah Memberikan Solusi	Siapa yang melakukan	Apakah ada solusi lain
1	Mengidentifikasi sumber daya maritim yang ada di wilayah Bantul	Belum sepenuhnya diidentifikasi baru pariwisata dan perikanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir Bantul	Bupati Bantul, Bappeda, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat pesisir Bantul	Kesadaran harus ditingkatkan bahwa laut merupakan sumber daya yang belum digali secara maksimal
2	Menyadari sumber daya maritim belum dimanfaatkan dengan maksimal	Belum sepenuhnya disadari hanya perikanan dan pariwisata yang baru dimanfaatkan	Bappeda Bantul, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan perikanan, Dinas Pariwisata Dinas Lingkungan Hidup, dan Posal Samas.	Dilakukan penelitian untuk mencari sumber daya maritim yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Bantul

3	Merencanakan pembangunan pemanfaatan sumber daya maritim	Belum maksimal lebih diarahkan ke sektor pariwisata	Bappeda, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya perikanan
4	Membentuk SKPD yang khusus menangani masalah maritim di Bantul	Belum dilaksanakan	Bupati Bantul	Dimaksimalkan dan integrasikan dengan SKPD yang ada
5	Menyediakan anggaran yang cukup pembangunan pemanfaatan sumber daya maritim	Belum dilaksanakan	Bupati Bantul	Bekerja sama dengan pemerintah provinsi, Pusat maupun pihak swasta
6	Menyiapkan sumber daya manusia aparatur pemda Bantul yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sektor maritim.	Belum disiapkan	Bupati Bantul, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata Dinas Lingkungan Hidup, SMKN 1 Sanden	Bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan bea siswa bagi aparaturnya

7	Menyiapkan fasilitas, sarana dan prasarana dalam pemanfaatan sumber daya maritim	Belum maksimal dibutuhkan kapal yang mampu berlayar lebih jauh dan kepelabuhan, untuk pariwisata baru sebatas standar minimal tujuan wisata baru Parangtritis	Bupati Bantul, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata Dinas Lingkungan Hidup	Kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pihak swasta
8	Bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta maupun perguruan tinggi dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim	Sudah mulai dilakukan Sarana dan prasarana jalan maupun lapangan terbang sedang dibuat, maupun dengan perguruan tinggi untuk menjaga abrasi pantai melalui gumukan pasir	Bupati Bantul	Mencari penanam modal swasta yang lebih banyak
9	Bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan norma-norma maritim.	Sudah dilakukan Norma-norma sosial sudah mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya maritim	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas kerjasama

10	Membuat aturan-aturan untuk pemanfaatan dan pelestarian sumber daya maritim	Belum maksimal Masih banyak perusakan gumukan pasir, sampah, pencurian daging dan telur penyu, pembalakan pohon cemara di pantai untuk kepentingan tambak	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup	Aturan harus tegas dalam memberikan sanksi
11	Mengevaluasi hasil peningkatan fungsi pemda Bantul dalam pemanfaatan sumber daya maritim	Sudah dievaluasi Kekurangan anggaran, pemanfaatan sumber daya maritim bukan prioritas pembangunan pemda Bantul	Bupati Bantul, Bappeda, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup	Bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan swasta

### **4.3 Pembahasan**

Setelah melakukan perbandingan kedua model konseptual dengan situasi dunia nyata, di mana setiap sub tema yang diturunkan dari pertanyaan penelitian 1 dan 2. Pembahasan akan dilakukan dengan menggunakan tinjauan pustaka yang telah dilakukan sebelumnya serta menyesuaikan dengan data primer dan data sekunder yang didapatkan selama penelitian di lapangan. Sub tema 4.3.1 menjawab penelitian 1, sub tema 4.3.2 menjawab pertanyaan penelitian 2.

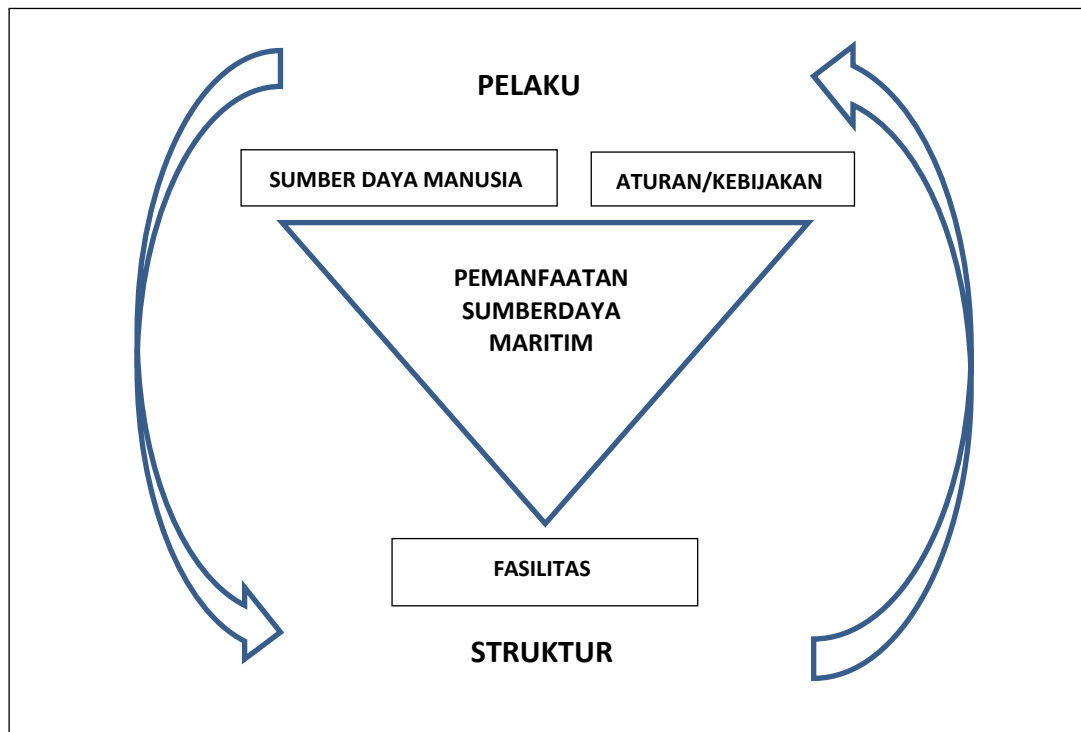
Terdapat banyak aspek dalam mewujudkan budaya maritim. Aspek tersebut harus terintegrasi dan bersama-sama dalam pembangunannya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Masyarakat kabupaten Bantul yang sudah lama takut terhadap laut karena pengaruh kolonial Belanda yang lama menjajah Indonesia dengan membuat cerita-cerita mitos bahwa di laut terdapat sosok jahat yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat pesisir Bantul. Kebijakan pemerintah pusat dalam membangun budaya maritim merupakan dasar dan menjadi langkah pertama dalam pembangunan budaya maritim secara nasional dan pemerintah daerah harus mendukungnya. Kerjasama pembangunan pusat dan daerah harus sejalan dan terintegrasi. Beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pembangunan budaya maritim yang akan dianalisa secara mendalam.

Budaya maritim di kabupaten Bantul dapat diketahui dari manfaat sumber daya maritimnya bagi masyarakat maupun pemerintah daerah sehingga dapat bernilai. Benhard Limbong (2015) menjelaskan pentingnya tujuh tantangan sumber daya maritim Indonesia sebagai negara maritim. Sumber daya maritim yang dimiliki Indonesia antara lain perikanan, energi dan sumber daya mineral kelautan, pelayaran, pariwisata bahari, dan industri jasa maritim. Ada dua sumber daya maritim yang dimanfaatkan di kabupaten Bantul diantaranya perikanan dan pariwisata Bahari, serta tradisi maritim yang masih dipegang teguh oleh masyarakat pesisir yaitu sedekah laut. (Kabid Ekonomi Sarana dan Prasarana Bappeda Bantul, 2017)

“sumber daya maritim yang ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemda Bantul adalah perikanan dan pariwisata, selain itu di pantai Pandansimo Tahun 2010 Kemenristek bekerjasama dengan LAPAN mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya. Begitu juga rencana pembangunan wilayah Bantul dibagi tiga diantaranya bagian timur diperuntukkan untuk pariwisata pantai, bagian tengah diperuntukkan untuk ekowisata dan bagian timur untuk pembudidayaan udang (perikanan tambak)”.

#### **4.3.1 Meningkatkan Kesadaran Budaya Maritim Masyarakat Pesisir Bantul**

Menurut praktek sosial skema Giddens, budaya maritim bisa dimaknai sebagai suatu arena sosial di mana terjadi interaksi antara manusia, aturan dan fasilitas yang ada sehingga membuat nilai/manfaat yang mendorong/memaksa seseorang/pelaku untuk melakukan tindakan sosial/pemanfaatan sumber daya maritim. Dari ketiga aspek ini diharapkan sumber daya maritim dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga mempunyai nilai yang baik untuk kesejahteraan masyarakat (pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani), sesuai gambar di bawah ini :



**Gambar 4.11 Pemanfaatan Sumber Daya Maritim sebagai Praktik Sosial diolah dari Inspirasi Praktik Sosial skema Gidden (Octavian, Yulianto. 2014)**

Kesadaran adalah kondisi di mana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Meningkatkan Kesadaran Budaya Maritim adalah kondisi di mana seseorang atau masyarakat mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya hak untuk memanfaatkan dan kewajibannya menjaga kelestarian sumber daya maritimnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani masyarakat.

Hak untuk memanfaatkan sumber daya maritim yang dimiliki oleh masyarakat Bantul harus dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga menjadi bernilai bagi masyarakat. Adapun nilai menurut Notonogoro (Nurseno, 2007) jenis-jenis nilai dibagi menjadi 3 yaitu: nilai material, nilai kerohanian dan nilai vital.

### **4.3.1.1 Meningkatkan Kesadaran Nilai Maritim**

#### **4.3.1.1.1 Meningkatkan Nilai Material**

Nilai material yaitu nilai yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia secara jasmani, tentu saja untuk memenuhi kebutuhan jasmani seseorang harus mampu memanfaatkan sumber daya ekonominya. Kesadaran masyarakat pesisir Bantul bahwa laut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani dengan memanfaatkan sumber daya maritimnya, yaitu; dengan mencari ikan di laut dan pariwisata maritim.

Pemanfaatan sumberdaya ikan tangkap laut di pantai selatan kabupaten Bantul baru berkembang ditandai dengan penggunaan perahu motor pada tahun 1996. Secara umum aktivitas nelayan di pesisir Kabupaten Bantul baru dimulai pada tahun 1997. Nelayan Bantul banyak dipengaruhi oleh aktivitas nelayan asal Cilacap yang datang di pesisir Bantul dengan membawa hasil tangkapan yang banyak. Tangkapan ikan yang banyak oleh nelayan asal Cilacap mempengaruhi warga masyarakat pesisir Bantul untuk beralih profesi dari petani menjadi nelayan untuk mengikuti jejak para nelayan asal Cilacap tersebut. Sadino (2017) nelayan Samas mengatakan bahwa:

“Masyarakat pesisir di sini awalnya tidak mengerti bagaimana mencari ikan di laut, mereka hanya menggunakan jaring eret jika mau makan ikan. Hal ini dikarenakan ombaknya yang besar dan ada mitos bahwa di laut ada kekuatan gaib yang selalu meminta korban, tetapi pada tahun 2000an ketika mengetahui nelayan cilacap yang menjual ikan kepada wisatawan dengan harga yang lumayan maka banyak yang tertarik untuk mencari ikan di laut dengan belajar kepada mereka.”

Hasil tangkapan ikan di laut ikan bawal, lobster, udang, kepiting, tenggiri, hiu, layur, kakap, tongkol dan pari harganya lumayan mahal. Hal ini mendorong para petani atau nelayan eret untuk pergi melaut. dan mengesampingkan mitos bahwa di laut terdapat penguasa laut yang sering meminta korban di mana selama ini menjadi penghalang bagi mereka untuk pergi mencari ikan di laut. Dari peristiwa ini dapat dikatakan bahwa nilai masyarakat pesisir Bantul dengan keyakinannya terhadap penguasa laut

yang sering meminta tumbal mulai berkurang sehingga timbul keberanian untuk mencari ikan di laut dan merubah nilai masyarakat yang sebelumnya laut merupakan sesuatu yang menakutkan menjadi sumber pendapatan baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perikanan tangkap tersebar di wilayah pesisir Bantul, lokasi yang dikembangkan meliputi Pantai Depok, Samas, Kuwaru dan Pantai Pandansimo. Di sektor perikanan nelayan-nelayan Bantul hanya menggunakan perahu motor tempel 40 PK dengan kemampuan menangkap hanya di zona 1a dan 1b (sekitar 4 mil) dari garis pantai, di mana ikan di zona ini sangat tergantung kepada musim. Mereka mencari ikan di laut pada saat musim ikan, bulan Mei sampai akhir bulan Agustus kegiatan penangkapan ikan menurun atau bahkan tidak melakukan penangkapan sama sekali, sehingga para nelayan Bantul menangkap ikan di laut sangat tergantung kepada musim dan kondisi alam. Selain dari bulan tersebut musim paceklik mereka berdagang di tempat wisata pantai, menjadi pekerja di tambak udang dan menggarap lahan pertanian bahkan menjadi tukang bangunan.

Restrukturisasi armada nelayan kecil pernah dilakukan pemda Bantul dengan mendapat bantuan dari pemerintah pusat yang menjadi program kerja kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2011 mengadakan satu unit kapal (INKA MINA 165) dengan alat tangkap jaring lingkar (purse seine) berbobot 30 Gross Tone yang dihibahkan kepada kelompok nelayan Bantul. INKA MINA berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2010 bertujuan sebagai percepatan pembangunan nasional dengan menghibahkan 1000 kapal perikanan kepada kelompok nelayan yang tersebar di Indonesia.

Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) yang bertugas dan berfungsi untuk melakukan pembinaan nelayan mengalami kesulitan untuk menyiapkan pelatihan nelayan selama tiga bulan yang akan mengawaki kapal hibah tersebut. Ketika kapal melakukan operasional penangkapan ikan perdana pada Agustus tahun

2012 hanya dapat menyiapkan empat anggota nelayan yang berasal dari Bantul sementara mayoritas lainnya berasal dari luar Bantul. Sebagaimana diketahui untuk mendukung operasional kapal penangkapan ikan dengan alat tangkap jaring lingkaran membutuhkan awak kapal sebanyak 25-30 orang.

Rendahnya tingkat keikutsertaan nelayan Bantul sebagai nelayan kapal INKA MINA berkaitan dengan faktor nilai internal individu nelayan. Kesadaran untuk mendapatkan ikan lebih banyak dengan sarana yang mampu berlayar lebih jauh tidak membuat mereka tertarik. Faktor nilai rohani seperti adanya dorongan kebutuhan untuk berinteraksi sosial dengan keluarga dan tetangga sehingga enggan untuk menjadi awak kapal seperti pada INKA MINA yang setiap kali melakukan penangkapan ikan membutuhkan 5-7 hari. Lamanya waktu operasional penangkapan ikan membuat nelayan lebih memilih untuk tetap menjadi nelayan harian saja yang memudahkan mereka dapat berkumpul dengan keluarga setelah selesai melaut menangkap ikan, selain itu harus mempunyai pengetahuan dan teknologi yang tinggi, beresiko tinggi (Istriyani, 2012). Selain itu tempat tambat kapal 30 GT tidak dimiliki oleh pemerintah Bantul. Para nelayan juga enggan untuk melakukan perjalanan selama 2 jam menuju Gunung Kidul yang memiliki pelabuhan untuk tambat kapal.

Pariwisata maritim merupakan sebagai salah satu sektor penghasil devisa utama senantiasa terus ditingkatkan. Pengembangan pariwisata bahari dapat mempunyai efek berganda (*multiplier effect*) di mana di sektor ini banyak menyerap tenaga kerja yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan devisa bagi negara dan dapat mendorong konservasi lingkungan serta mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Ketua Pokdarwis Oki Setiawan (2017) mengatakan :

“Berkembangnya wisata pantai memang memberi berkah bagi masyarakat sekitar. Mereka bisa menjadi pedagang kuliner, souvenir, juru parkir, penyewaan motor ATV dan masih banyak lagi. Begitu juga bagi nelayan mereka bisa menjual hasil tangkapannya langsung ke wisatawan dengan harga jauh lebih mahal dibanding dijual di TPI.”

Pengelolaan pariwisata oleh masyarakat Bantul tergabung dalam kelompok sadar wisata yang melibatkan masyarakat pesisir pantai tanpa melihat keahlian yang dimiliki, sehingga mereka hanya sebagai pedagang makanan maupun souvenir, penjaga parkir, pemandu wisata, penyewaan motor ATP, penyewaan tikar maupun perahu layar di laguna. Pengelolaan pariwisata yang ada di Bantul diserahkan kepada masyarakat, masyarakat sendiri membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pada kenyataannya pokdarwis dan masyarakat yang terlibat dalam sektor pariwisata ini belum optimal dalam mendukung kepariwisataan kawasan pantai di mana mereka belum memiliki kemampuan dan pengetahuan kepariwisataan yang rendah, kemampuan bahasa asing yang rendah, tingkat sadar wisata dan pengembangan potensi kewirausahaan.

Sektor pariwisata maritim Bantul masih standar kelayakan minimal daerah tujuan wisata, diantaranya :

- a. Objeknya yaitu pantai dan budaya sedekah laut.
- b. Akses jalan sudah ada sampai langsung ke lokasi bahkan sekarang sudah dibuat jalan nasional jalur selatan dan sedang dibuat lapangan terbang di Kulon Progo.
- c. Akomodasi ada sekitar 229 penginapan.
- d. Fasilitas kesehatan, ibadah, pembuangan sampah, kamar mandi.
- e. Transportasi bis, kendaraan umum.
- f. *Carering service* yaitu restoran maupun warung makan, tempat pembelanjaan souvenir.
- g. Aktivitas rekreasi seperti kolam renang, tempat permainan anak-anak, voli pantai, moda wisata transportasi andong, wisata rally mobil dan sepeda motor mini, wisata terbang layang, festival layang-layang, olah raga voli, parade band, berlayar di laguna, motor ATV (*All terrain vehicle*) dan masih banyak lagi.
- h. Keamanan adanya penjaga pantai dan SAR laut.

Permasalahan di atas dapat dikatakan faktor penyebabnya diantaranya sumber daya manusia masih kurang kemampuan dan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber daya maritim, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta fasilitas modal untuk mengembangkan usaha di sektor maritim. Akademisi Prof. Dr. Ir. Soesilo MS (2017) mengatakan :

“Membangun budaya maritim diperlukan sumber daya manusia karakteristik maritim yang khas dengan mentalitas yang independen, pragmatik, mobile, egaliter, bersaing, membutuhkan keahlian teknis, harga diri, kemampuan individu tinggi, daya adaptasi tinggi dan mental bangsa modern. membentuk budaya melalui pendidikan sehingga mampu bermanfaat bagi kehidupan dirinya dan orang lain, budaya maritim dibangun sesuai letak geografis yang strategis. Membangun budaya maritim harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi karena tanpa iptek laut hanyalah hamparan air yang berwarna biru.”

Lemahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang maritim diduga berkaitan dengan sistem pendidikan kita selama ini. Secara terminologis, seluruh rakyat Indonesia dapat dikatakan sebagai SDM maritim, di mana perlu dirubah paradigmanya dari *land sosio economic development* menjadi *marine sosio economic development* (Limjong, 2015). Sekolah-sekolah yang mampu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya maritim sangat mendesak dibutuhkan.

Sumber daya manusia nelayan Bantul menjadi kendala dalam memanfaatkan sumber daya maritimnya. Diharapkan para nelayan pesisir Bantul bisa melakukan pencarian ikan lebih jauh lagi sehingga setiap saat bisa mencari ikan dengan tidak tergantung kepada musim dan hasil tangkapan jauh lebih banyak dan ikan yang didapat memiliki nilai ekonomi yang bagus, untuk itu diperlukan nelayan-nelayan berkarakter maritim dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta sarana dan sarana yang memadai seperti kapal, tepat tambat serta alat tangkap jaring. Begitu juga sumber daya manusia pariwisata kebutuhan kemampuan pengembangan sumber daya manusia pendukung pengetahuan kemampuan

kepariwisataan, kemampuan bahasa asing, tingkat sadar wisata dan pengembangan potensi kewirausahaan.

Penyiapan sumber daya manusia di Bantul dalam pemanfaatan sumber daya maritim memiliki sekolah tingkat kejuruan pariwisata maupun kelautan. SMKN 1 Sanden di bawah pembinaan pemda provinsi sudah memiliki sertifikasi Internasional kelautan dan perikanan mendidik siswanya untuk siap kerja di bidang kelautan dan perikanan. Pada kenyataannya Pemda bantul belum mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka sehingga sektor maritim tidak menjadi cita-cita mereka untuk bekerja, mereka lebih tertarik menjadi TNI dan walaupun harus bekerja di sektor kelautan dan perikanan mereka tidak ingin bekerja di Bantul karena sarana dan prasarannya masih minim sehingga belum menjanjikan. Untuk SMK Negeri 1 Sewon sektor Pariwisata, pemda Bantul juga belum mampu menyiapkan lapangan kerja yang memadai, karena sektor wisata disana masih dikelola dengan cara tradisional sehingga belum menarik mereka untuk bekerja di sektor wisata maritim Bantul.

Upaya yang sekarang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan pelatihan dan penyuluhan terutama teknis penangkapan ikan dengan menggunakan jaring serta penyuluhan agar ikan kecil-kecil tidak ditangkap untuk kelangsungan penangkapan ikan ke depan dan kondisi saat ini di zona 1a dan 1b (sekitar 4 mil) dari garis pantai Bantul sudah *over fishing* sehingga ikan mulai susah didapat walaupun pada saat musim ikan.

Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Bantul selama ini diantaranya ;

- a. Pelatihan peningkatan kelompok sadar wisata
- b. Pelatihan kuliner
- c. Sosialisasi sadar wisata dan kampanye sapta pesona
- d. Pelatihan kelembagaan usaha ekonomi pariwisata
- e. Pelatihan sadar budaya wisata.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemda Bantul dhi Dinas pariwisata baru sebatas pelatihan dan penyuluhan belum ke tingkat pendidikan, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana.

Bantuan pemda Bantul dan Yogyakarta diberikan kepada masyarakat seperti bantuan modal usaha, perahu, mesin tempel dan kemudahan peminjaman modal usaha di Koperasi Kredit Amrih Makmur, Muntuk, Dlingo, Bantul dan masih banyak lagi. Adapun paradigma baru dari pemda DIY maupun Bantul yaitu “Among Tani Dagang Layar” dengan program ini diharapkan masyarakat pesisir mampu bertani, berdagang dan berlayar sehingga bisa saling mendukung dalam meningkatkan pendapatannya.

Sumber daya manusia yang masih rendah dalam memanfaatkan teknologi maju baik di sektor perikanan maupun pariwisata, sarana dan prasarana yang masih kurang serta permodalan menjadi kendala utama dalam meningkatkan nilai material pemanfaatan sumber daya maritim.

#### **4.3.1.1.2 Meningkatkan Kesadaran Nilai Rohani**

Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Berdasarkan sumbernya nilai kerohanian dapat dibagi lagi menjadi empat jenis diantaranya:

**a. Nilai Ketuhanan.**

Pemanfaatan sumberdaya ikan di pantai selatan Bantul baru berkembang ditandai dengan penggunaan perahu motor pada tahun 1996. Secara umum aktivitas nelayan di pesisir Bantul baru dimulai pada tahun 1997. Nelayan Bantul ini banyak dipengaruhi oleh aktivitas nelayan asal Cilacap yang datang di pesisir Bantul dengan membawa hasil tangkapan yang banyak. Banyaknya hasil ikan tangkapan yang diperoleh nelayan asal Cilacap mempengaruhi warga masyarakat pesisir Bantul untuk beralih profesi dari petani menjadi nelayan untuk mengikuti jejak para nelayan asal Cilacap tersebut.

Sadino (2017) nelayan Samas mengatakan bahwa:

“Masyarakat di sini masih percaya bahwa di laut selatan ada penguasa laut yang harus diberikan ritual tertentu seperti labuhan agar tidak marah dan diberikan keselamatan serta mendapatkan ikan yang banyak”

Nilai ketuhanan yang sebelumnya mempengaruhi masyarakat pesisir Bantul dengan pemikiran takut untuk berlayar karena terdapat penguasa laut yang memiliki kekuatan besar membuat masyarakat takut melaut di laut diwujudkan dengan diadakannya ritual sedekah laut untuk menghormatinya, berubah keyakinan menjadi bahwa Tuhan memberikan rezeki lewat laut. Oleh karena itu masyarakat pesisir Bantul mulai berani pergi ke laut mencari ikan dan rejeki di laut.

Bentuk nilai ketuhanan yang ada di masyarakat, yaitu; tradisi labuhan atau larungan yang dilakukan dalam rangka wujud syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki lewat laut dan memberikan keselamatan di dalam mencari ikan di laut. Di Bantul sendiri sedekah laut disebut labuhan. Kata “Labuhan” berasal dari bahasa Jawa, yaitu labuh. Labuh memiliki artinya sama dengan larungan, yaitu membuang sesuatu ke dalam air yang mengalir ke laut. Tradisi Anggoro Asih merupakan tradisi labuhan yang dilaksanakan oleh nelayan Bantul yang dilaksanakan pada bulan Idul Fitri di mana kegiatannya digabung dengan acara silaturahmi masyarakat karena pada saat itu banyak keluarga yang pulang kampung.

Meningkatkan nilai ketuhanan masyarakat pesisir Bantul dengan menanamkan nilai bahwa Penguasa Laut yang selalu meminta korban merubah pemikiran bahwa Tuhan memberikan rezeki lewat laut berupa ikan dan tempat pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat pesisir Bantul.

**b. Nilai Keindahan (Rasa)**

Keindahan pantai yang ada di pesisir Bantul menjadikan Bantul sebagai salah satu tujuan wisata alam yang cukup favorit di

Yogyakarta, biasanya mereka yang berkunjung melakukan wisata budaya di Yogyakarta melanjutkan wisata alam di pantai pesisir Bantul. Keindahan alam yang dimiliki Bantul seperti Pantai Depok, Pantai Parangendog, Pantai Parangkusumo, Pantai Cemoro Sewu, Pantai Samas, Pantai Patihan, Pantai Pandansimo, Pantai Kuwaru dan Pantai Goa Cemara. Kesadaran masyarakat bahwa pesisir pantai dan lautnya indah dapat dilihat dari banyaknya kunjungan wisatawan yang datang ke pantai terutama pantai Parangtritis. Ratni Nengsih (2017) mengatakan:

“Pemda Bantul juga berusaha untuk meningkatkan nilai estetika dengan programnya berusaha membuat *event-event* agar menarik masyarakat untuk mencintai laut membuat acara-acara untuk mendatangkan wisatawan dengan latar belakang pantai diantaranya Jogja *Air Show* menyuguhkan atraksi dari berbagai macam cabang olahraga dirgantara yang ada dibawah naungan FASI seperti paralayang, gantolle, paramotor, pesawat swayasa, aeromodelling. Mengambil tempat di kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok. Selain itu ada kolam renang, tempat permainan anak-anak, voli pantai, moda wisata transportasi andong, wisata rally mobil dan sepeda motor mini, wisata terbang layang, festival layang-layang, olah raga voli, parade band, berlayar di laguna, motor ATV (*All terrain vehicle*) dan masih banyak lagi. Pariwisata pantai Bantul belum mampu menarik wisatawan mancanegara yang banyak, hal ini dikarenakan belum ada objek wisata yang khas dan pengelolaannya masih sangat sederhana dengan sarana dan prasarana yang terbatas.”

Menurut Budjantoro dan Wijayanti (2013) di pesisir Bantul juga terdapat penyu ini merupakan salah satu dari 7 jenis penyu yang masih bertahan hidup di dunia. Penyu tersebut secara periodik lahir pada musim kemarau mendekati musim hujan mendarat dan bertelur di pantai Patihan dan beberapa di pantai sekitar. Nelayan di sekitar pantai Patihan mulai melakukan pelestarian terhadap penyu dan habitatnya mulai tahun 2010. Di pantai Samas juga dikembangkan

sebagai konservasi penyu. Adapun penyu yang di konservasi adalah Penyu Blimbing, Penyu Hijau, Penyu Sisik dan Penyu Lekang. Penyu juga sebagai salah satu nilai lebih sebagai daya tarik yang dimiliki oleh pantai pesisir Bantul.

Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dengan programnya budaya makan ikan, Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) pertama kali diluncurkan pada tahun 2012. Tingkat konsumsi ikan di Bantul saat ini masih 19 kilogram per kapita per tahun, padahal idealnya 35 kg per kapita per tahun. Gerakan makan ikan terus dikampanyekan dengan cara dengan dilaksanakannya lomba masak ikan dan lomba makan ikan paling banyak. Selain itu dilaksanakan program cinta laut dengan target siswa menengah dengan bekerja sama dengan Posal Samas sebagai pembina pramuka Saka Bahari dan pembinan siswa SMKN 1 Sanden dan melaksanakan lomba mewarnai dan lukis bahari untuk siswa tingkat paud, TK dan SD. Pelaksanaan Gemarikan harus sering dilaksanakan untuk menanamkan cinta laut bagi masyarakat dan generasi penerus.

Meningkatkan nilai keindahan juga dilaksanakan penanganan sampah dengan rumah sampahnya yaitu memisahkan antara sampah organik dengan sampah non organik, penanaman dan pelestarian pohon mangrove di pantai Baros serta pelestarian pohon cemara di pantai Patihan yang terkenal dengan pantai Goa Cemara memiliki kekhasan dibandingkan dengan pantai lain karena pantai ini memiliki pepohonan cemara yang rimbun di sepanjang garis pantai sekitar 1,4 km di mana berguna juga sebagai pencegah abrasi.

Meningkatkan nilai rasa/keindahan terhadap laut masyarakat pesisir Bantul dengan program cinta dan peduli laut serta event-event yang mengundang masyarakat datang ke laut dan yang lebih utama penanaman nilai maritim kepada masyarakat (diharapkan penanaman nilai maritim sejak usia dini).

**c. Nilai Kebenaran**

Nilai kebenaran nilai yang bersumber pada akal manusia. Kesadaran manusia bahwa di laut terdapat sumber daya yang belum dimanfaatkan secara maksimal, maka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelolanya. Pengetahuan yang sudah tertanam dalam diri nelayan sangat sulit untuk dikembangkan, seperti yang terjadi di nelayan Bantul dengan pengetahuan dalam melaut dengan menggunakan perahu mesin tempel sangat sulit untuk dirubah kepada kapal yang lebih besar dengan teknologi yang lebih canggih.

Hal ini membuat para nelayan di Bantul susah untuk berkembang. Begitu juga generasi muda Bantul sangat perlu didorong menjadi nelayan karena secara rasio nelayan yang ada di Bantul taraf hidupnya masih miskin. Membangun budaya maritim harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi karena tanpa lptek laut hanyalah hamparan air yang berwarna biru. (Soesilo,2017)

Kondisi yang diharapkan adalah akal yang dimiliki oleh para nelayan berkembang sehingga mau berubah dengan pemikiran yang lebih maju untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya maritim, tetapi pada kenyataannya sangat sulit dilakukan.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah tertanam di masyarakat pesisir Bantul untuk mau mengembangkan dan beralih kepada pengetahuan dan teknologi yang lebih maju, perlu waktu yang panjang dan ditanamkan sejak usia dini dan peran sekolah *vokasi* maupun perguruan tinggi.

**d. Nilai Kebaikan**

Dengan dimanfaatkannya sumber daya maritim maka nilai kebaikan yang ada di masyarakat pesisir Bantul terhadap lautnya diantaranya nilai gotong royong. Budaya gotong royong masih sangat kuat terutama dalam pelaksanaan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu mesin tempel ini. Mereka secara gotong royong

bersama-sama masyarakat pesisir di mana ada yang sebagai pendorong dan nelayan. Nelayan dorong membantu saat para nelayan akan berangkat walaupun pembagian hasilnya dilakukan pada saat pulang melaut. Budaya gotong royong juga ada pada saat nelayan melakukan ritual sedekah laut di mana pelaksanaannya ditanggung bersama-sama dan sengaja dilaksanakan pada saat seminggu setelah hari raya Idul Fitri agar dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga yang sedang merantau.

Budaya silaturahmi juga dilakukan oleh kelompok nelayan atau pengelola kawasan pantai dengan dibentuknya kelompok usaha bersama (KUB) Mina Bahari 45 yang menyepakati pertemuan rutin kelompok setiap 35 hari sekali dengan aktivitas diskusi atau menyampaikan permasalahan yang ada serta kegiatan simpan pinjam.

Budaya menghormati orang tua dan orang yang dituakan seperti tokoh adat maupun tokoh agama masih dipegang oleh masyarakat pesisir Bantul, mereka mendapat posisi terhormat di dalam masyarakat bahkan tidak jarang diminta pendapatnya jika terdapat permasalahan atau yang menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

#### **4.3.1.1.3 Meningkatkan Kesadaran Nilai Vital**

Nilai vital yaitu nilai yang bermanfaat bagi manusia pada saat melakukan aktivitas, oleh karena itu laut bisa dikatakan nilai vital bagi masyarakat jika mereka sedang mencari ikan di laut atau seseorang yang sedang memanfaatkan sumber daya laut lainnya. Bagi nelayan dengan mata pencaharian melaut untuk mencari ikan tentu laut merupakan nilai vital, tetapi nelayan yang ada di masyarakat Bantul kebanyakan bukan nelayan penuh tetapi nelayan sampingan utama maupun nelayan sampingan tambahan. Hal ini biasanya mereka merangkap menjadi petani, beternak, pedagang atau penjual jasa di lokasi wisata. Laut bisa dijadikan nilai vital bagi masyarakat

pesisir Bantul dengan meningkatkannya agar hasil dari tangkapannya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga masyarakat pesisir Bantul sangat tergantung kepada laut dan budaya maritim terbentuk.

Dari data yang didapat jumlah nelayan Bantul sebagai berikut :

**Tabel. 4.9 Jumlah Nelayan di Kabupaten Bantul**

No	Tahun	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan Utama	Nelayan Sambilan Tambahan	Jumlah Nelayan
1	2015	274	351	40	665
2	2016	142	317	171	630

Sumber : Dislautkan DIY, 2016

Nelayan penuh Bantul adalah nelayan yang benar-benar menggantungkan hidupnya dari laut, nelayan sambilan utama adalah pekerjaan utamanya nelayan sedangkan nelayan sambilan tambahan menjadi nelayan merupakan pekerjaan sambilan. Peningkatan nilai vital dengan memanfaatkan sumber daya maritim semaksimal mungkin sehingga masyarakat menjadi sangat tergantung terhadap laut dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Sumber daya maritim belum menjadi nilai vital bagi masyarakat pesisir Bantul karena masyarakat pesisir Bantul belum sepenuhnya tergantung kepada sumber daya maritim dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meningkatkan kesadaran nilai vital, sumber daya maritim harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat sehingga sumber daya maritim menjadi vital bagi masyarakat.

#### **4.3.1.2 Meningkatkan Kesadaran Norma Maritim**

Hak untuk memanfaatkan sumber daya maritim yang dimiliki oleh masyarakat Bantul harus dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga menjadi bernilai bagi masyarakat, selain hak yang dimiliki oleh masyarakat terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditaati yang diatu melalui norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai sumber berbeda-beda, dilihat dari sumbernya

norma sosial dibedakan menjadi lima pengertian, yaitu sebagai berikut (Tim Sosiologi, 2007): norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum.

#### **4.3.1.2.1 Meningkatkan Kesadaran Norma Kesopanan**

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Norma kesopanan yang ada di masyarakat Bantul sebagai masyarakat timur masih memegang teguh nilai kesopanan cara berpakaian terutama di pantai jangan sekali-kali memakai pakaian yang minim seperti bikini, dan tidak berkata-kata kotor. Norma sopan santun sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat, karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Sekali saja ada pelanggaran terhadap norma kesopanan, pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat, semisal; cemoohan. kesopanan merupakan tuntutan dalam hidup bersama.

Untuk meningkatkan norma kesopanan perlu adanya peran masyarakat itu sendiri didalam memberikan sanksi sosial kepada orang-orang yang melanggarnya.

#### **4.3.1.2.2 Meningkatkan Kesadaran Norma Kesusilaan**

Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Tujuan norma kesusilaan, yaitu; mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Sanksi bagi pelanggarnya, yaitu; rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi pelanggarnya. Salah satu norma kesusilaan yang ada di Bantul adalah menghormati orang yang lebih tua dan dituakan termasuk acara ritual sedekah laut dilaksanakan dalam rangka menghormati orang tua mereka yang biasa melakukannya dan sudah menjadi tradisi, masyarakat Bantul juga

sangat menghormati tokoh adat dan tokoh agamanya dengan menempatkan pada posisi yang dihormati.

Meningkatkan norma kesusilaan di wilayah pesisir Bantul yang masih terjaga terutama mengatur masalah pembagian tugas dan pembagian rezeki dalam pemanfaatan sumber daya maritim sehingga tidak terjadi konflik diantara mereka, di mana Pemda Bantul harus menjaga situasi ini.

#### **4.3.1.2.3 Meningkatkan Kesadaran Norma Agama**

Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran. Sedekah laut juga merupakan identitas dari masyarakat yang ada di pesisir pantai dalam rangka ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan dan rezeki yang didapat dari laut, walaupun di beberapa tempat di Indonesia sudah jarang dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan norma agama. Beberapa ulama menganggap bahwa kegiatan labuhan dianggap bid'ah bahkan mendekati syirik. Situasi seperti tentu diperlukan kebijaksanaan para tokoh agama untuk melihat dari sudut pandang mana. Untuk di Bantul sendiri tokoh agamanya mendukung kegiatan labuhan ini, tokoh agama menyampaikan bahwa yang paling utamanya kita meminta kepada Tuhan (Allah) bukan kepada yang lainnya. Salah satu tokoh agama bernama Sarijan (2017) mengatakan bahwa :

“Penyebaran agama Islam yang dilakukan di tanah Jawa oleh wali Songo dengan menggunakan tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, begitu juga dengan tradisi labuhan, para wali menggunakan media ini untuk penyebaran agama Islam. Yang terpenting sekarang kita ambil manfaatnya dari tradisi ini dan berdoa kepada Tuhan (Allah) agar diberikan keselamatan dan rezeki yang melimpah bukan kepada zat lain.”

Pendapat ini didukung oleh tokoh adat Sadino (2017) yang mengatakan bahwa :

“Labuhan adalah tradisi budaya bangsa Indonesia yang merupakan warisan dari nenek moyang kita yang dilakukan secara turun temurun

sampai sekarang. Kita sebagai generasi sekarang tentu harus menjaga dan melestarikan agar warisan ini jangan sampai hilang. Labuhan juga sebagai cara berdoa mengucapkan syukur kepada Maha Pencipta atas rezeki, kesehatan dan keselamatan yang diberikan lewat laut.”

Nelayan Samas Sutarman (2017) mengatakan bahwa :

“Sedekah laut merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita sejak zaman dulu, oleh karena itu kita selaku anak cucunya harus menghormatinya. Dengan adanya kegiatan ini juga bisa secara langsung mendatangkan rezeki karena banyaknya wisatawan yang ingin melihat kegiatan ini.”

Keyakinan masyarakat pesisir Bantul baik dari tokoh agama, tokoh adat maupun nelayan tentang sedekah laut menunjukkan sampai saat ini di pesisir Bantul bukan menjadi penghambat dalam pelaksanaan sedekah laut ini, walaupun ada beberapa nelayan yang menganggap kegiatan ini hanya kebiasaan saja yang tujuan utamanya bisa mendatangkan banyak wisatawan yang akhirnya dapat memberikan rezeki bagi masyarakat. Di Jawa sendiri terutama di Yogyakarta telah terjadi akulturasi keagamaan terutama Islam dengan adat istiadat pribumi karena pada saat penyebarannya melalui kegiatan budaya yang sudah ada.

Norma agama yang ada di masyarakat pesisir Bantul tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tradisi sedekah laut, karena sedekah laut merupakan salah satu wujud syukur dan persembahan kepada Tuhan disinilah perlunya peran serta dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaannya.

#### **4.3.1.2.4 Meningkatkan Kesadaran Norma Hukum**

Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Objek wisata di pantai Bantul harus

tetap dijaga dan dipertahankan kelestariaanya, oleh sebab itu norma hukum harus dibuat oleh pemda Bantul untuk menjaga sumber daya maritimnya.

Salah satu objek wisata di pantai Di Pantai Patihan juga merupakan salah satu pantai yang menjadi lokasi pendaratan penyu lelang/abu-abu. Menurut Budjantoro dan Wijayanti (2013) penyu ini merupakan salah satu dari 7 jenis penyu yang masih bertahan hidup di dunia. Penyu tersebut secara periodik di akhir musim kemarau mendekati musim hujan mendarat dan bertelur di pantai Patihan dan beberapa di pantai sekitar. Perburuan telur dan daging penyu masih ada yang dilakukan oleh masyarakat Bantul.

Di pantai Baros juga terdapat hutan mangrove dan hutan cemara yang berfungsi untuk menjaga abrasi pantai tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menebang pohon tersebut di mana lahannya untuk dijadikan tambak.

Mujahid (2017) Dinas Lingkungan Hidup mengatakan:

“Masyarakat tidak menyadari apa yang mereka perbuat dengan merusak lingkungan demi menghasilkan uang yang dapat menjadi masalah dikemudian hari terutama bagi generasi yang akan datang.”

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Bantul adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar kelestarian sumber daya maritim dapat terjaga termasuk *flora* dan *fauna*.

#### **4.3.1.2.5 Meningkatkan Kesadaran Norma Kebiasaan**

Norma Kebiasaan adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dengan bentuk yang sama, secara sadar dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Norma kebiasaan dapat juga diartikan sebagai norma yang keberadaannya dalam masyarakat dapat diterima sebagai bentuk aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan pemerintah. Umumnya kebiasaan sering disamakan dengan adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang telah lama ada dalam masyarakat. Norma kebiasaan dari masyarakat Bantul adalah pelaksanaan

kegiatan sedekah laut yang tujuannya merupakan rasa syukur terhadap Tuhan karena telah memberikan rezeki lewat laut.

Masyarakat Bantul juga sangat mengsakralkan hari jumat kliwon sehingga pada hari itu dilarang nelayan untuk pergi ke laut. Pada hari tersebut masyarakat melakukan yasinan berdoa untuk meminta rezeki dan keselamatan.

Norma kebiasaan yang lainnya adalah aturan pembagian hasil melaut dibagi dengan cara : pendapatan melaut dipotong dengan biaya operasional menjadi pendapatan bersih. Pendapatan bersih dipotong 7% untuk pendorong, 2% retribusi pemda Bantul dan 3% untuk Kas TPI. Hasil bersih 88% masih dibagi dua antara nelayan dan pemilik perahu. Untuk pendapatan kotor hasil tangkapan ikan kurang dari Rp.250.000 maka pemilik perahu tidak mendapat bagian. Aturan ini sudah menjadi kesepakatan diantara nelayan dan pemilik perahu, jika pendapatan melaut (kotor) Rp.250.000 maka pendapatan bersih setelah dipotong dana operasional terutama BBM dan biaya makan sisa sekitar Rp.50.000, dengan pendapatan seperti ini pemilik perahu merelakan kepada nelayan tanpa harus dibagi dua. Kebiasaan ini dianggap baik dan masih dilaksanakan sampai saat ini karena pemilik kapal yang dianggap lebih mampu merelakan kepada nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saling percaya juga ada diantara mereka dengan tidak mencurigai ada perbuatan curang.

Pemda Bantul harus melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar kebiasaan-kebiasaan baik ini dan menguntungkan bagi masyarakat tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi penerus.

#### **4.3.2 Meningkatkan Fungsi Pemda Bantul Dalam Memperkuat Budaya Masyarakat Bantul**

Kabupaten Bantul secara geografis berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki panjang garis pantai kurang lebih 17 km memanjang dari Kecamatan Kretek sampai Kecamatan Srandakan dengan kekayaan perikanan dan pemandangan yang indah serta tradisi yang masih

dipegang teguh oleh masyarakatnya, oleh sebab itu harus dibuat kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya maritim tersebut.

Menurut Praktek sosial skema Giddens, budaya maritim bisa dimaknai sebagai suatu arena sosial di mana terjadi interaksi antara manusia, aturan dan fasilitas yang ada sehingga membuat struktur (nilai dan norma) nilai/manfaat yang mendorong seseorang/pelaku untuk melakukan tindakan sosial/pemanfaatan sumber daya maritim dan norma-norma berbentuk aturan sosial maupun hukum yang ada di masyarakat dalam mengatur pemanfaatan sumber daya maritimnya. Dari ketiga aspek ini diharapkan sumber daya maritim dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga mempunyai nilai yang baik untuk kesejahteraan masyarakat (pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani).

Fungsi pemerintahan daerah ini dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Adapun fungsinya tertuang di dalam UU Nomor 32 tahun 2004 yakni :

- a. Pengertian pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Di mana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pemanfaatan sumber daya maritim merupakan fungsi dari pemda Bantul di mana merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan laut Samudera Indonesia di mana pemanfaatannya belum maksimal, begitu juga pengaturan masalah keuangan terkait penganggaran, dan

kebijakan dengan bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan seorang individu atau organisasi dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Meningkatkan fungsi pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat pesisir Bantul adalah meningkatkan kesanggupan dan kecakapan pemda Bantul dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya maritimnya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

#### **4.3.2.1 Kemampuan Meningkatkan Nilai Maritim Masyarakat**

##### **4.3.2.1.1 Kemampuan Meningkatkan Nilai Material**

Nilai material yaitu nilai yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia secara jasmani, tentu saja untuk memenuhi kebutuhan jasmani seseorang harus mampu memanfaatkan sumber daya ekonominya. pemda Bantul harus mampu memanfaatkan sumber daya maritimnya untuk memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani masyarakatnya. Adapun sumber daya maritim yang dimanfaatkan di kabupaten Bantul adalah mencari ikan di laut dan pariwisata maritim.

Untuk Kemampuan meningkatkan nilai material pemda Bantul harus merestrukturisasi SKPD bidang maritim terutama sektor perikanan dan kelautan tetapi kenyataanya Bupati Bantul melebur Dinas Kelautan dan Perikanan kedalam Dinas Pertanian Pangan dan Kelautan sesuai dengan peraturan bupati bantul no. 115 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pertanian pangan kelautan dan perikanan. Dengan dileburnya kedua dinas ini tentu berdampak terhadap program dan anggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya maritim sektor perikanan.

Kepala bidang perikanan dan kelautan Istriyani (2017) menyampaikan :

“Peleburan Dinas Kelautan dan Perikanan ke Dinas pertanian karena bukan prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo, selain itu berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan laut diserahkan ke provinsi”

Dampak peleburan Dinas Kelautan dan Perikanan sangat dirasakan oleh para nelayan. Program-program untuk peningkatan kesejahteraan nelayan makin lama makin berkurang sedangkan pihak pemerintah daerah merasa bahwa para nelayan juga susah diajak maju. Mengembalikan peran Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi sangat penting karena program-program yang dibuat lebih fokus dan terarah ke perikanan dan kelautan begitu juga masalah anggaran tentu tidak terbagi dengan bidang yang lain.

Permasalahan anggaran yang menjadi kendala terbesar dalam pembangunan budaya maritim karena sektor maritim tidak menjadi prioritas pembangunan di Bantul terutama untuk mendukung sarana dan prasarana di sektor perikanan tangkap masih kurang. Di sektor perikanan tangkap memerlukan fasilitas dermaga tempat tambat kepelabuhan sehingga kapal-kapal besar dapat hadir di Bantul dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangkap ikan.

Untuk sarana dan prasarana perikanan laut yang berada di Bantul diantaranya :

**Tabel 4.10 Perkembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Laut**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1	TPI	6	6
2	Pasar ikan	7	7
3	Kapal	8	8
4	Perahu Motor	88	88
5	Pabrik Es	1	1
6	KUB	35	35
7	Penyuluh perikanan	11	11

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Bantul 2017

Tentu sarana dan prasarana di sektor perikanan tangkap masih kurang. Di sektor perikanan tangkap memerlukan fasilitas dermaga tempat tambat sehingga kapal-kapal besar dapat hadir di Bantul dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangkap ikan.

Sektor pariwisata maritim untuk meningkatkan standar kelayakan minimal daerah tujuan wisata di mana di pesisir Bantul terdapat pariwisata maritim, diantaranya :

- a. Objeknya yaitu pantai dan budaya sedekah laut.
- b. Akses jalan sudah ada sampai langsung ke lokasi bahkan sekarang sudah dibuat jalan nasional jalur selatan dan sedang dibuat lapangan terbang di Kulon Progo.
- c. Akomodasi ada sekitar 229 penginapan.
- d. Fasilitas kesehatan, ibadah, pembuangan sampah, kamar mandi.
- e. Transportasi bis, kendaraan umum.
- f. *Carering service* yaitu restoran maupun warung makan, tempat pembelanjaan sovenir.
- g. Aktivitas rekreasi seperti kolam renang, tempat permainan anak-anak, voli pantai, moda wisata transportasi andong, wisata rally mobil dan sepeda motor mini, wisata terbang layang, festival layang-layang, olah raga voli, parade band, berlayar di laguna, motor ATV (*All terrain vehicle*) dan masih banyak lagi.
- h. Keamanan adanya penjaga pantai dan SAR laut.

Dari persyaratan minimal kelayakan destinasi wisata Bantul Pantai, Parangtritis dan Pandansumo yang memenuhi persyaratan sedangkan pantai lain, masih perlu ditingkatkan sarana dan prasarananya.

Untuk sumber daya manusia aparat pemda Bantul untuk di sektor maritim masih kurang, banyak pegawai pemda Bantul di sektor perikanan maupun pariwisata tidak sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya, begitu juga untuk meningkatkan kemampuannya mereka sekolah tidak sesuai dengan tugas dan kebutuhan dari organisasi tempat mereka bekerja.

Anggaran yang diperlukan cukup besar untuk membiayai pembangunan sektor maritim dan kemampuan pemda Bantul yang terbatas sehingga diperlukan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah

pusat, Bank atau pihak swasta. Meningkatkan Kemampuan pemda Bantul memerlukan anggaran yang cukup, SKPD yang khusus menangani bidang maritim, sumber daya manusia aparat pemda Bantul yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang maritim dan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, perguruan tinggi ataupun swasta.

#### **4.3.2.1.2 Kemampuan Meningkatkan Nilai Rohani**

##### **a. Nilai Ketuhanan**

Sedekah laut salah satu nilai Ketuhanan yang dimiliki masyarakat pesisir Bantul harus didukung oleh Pemda Bantul melakukan pembinaan kepada masyarakat nelayan dengan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta memfasilitasi dalam kegiatan keagamaan sedekah laut. Di Pantai Samas pelaksanaan kegiatan budaya dan ritual keagamaan dalam betuk kirab Turumuning Maheso Suro dan puncaknya yang dilakukan oleh kesultanan Yogyakarta. Selain itu ada kegiatan sedekah laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Bantul yaitu tradisi Anggoro Asih merupakan tradisi labuhan yang dilaksanakan oleh nelayan Bantul yang dilaksanakan pada bulan Idul Fitri di mana kegiatannya digabung dengan acara silaturahmi masyarakat karena pada saat itu banyak keluarga yang pulang kampung, di mana pada acara ini masyarakat mengajukan proposal untuk dukungan anggarannya selain dana yang dikumpulkan dari masyarakat.

Kegiatan sedekah laut juga mampu mendatangkan banyak wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, hal ini tentu dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir untuk berjualan, parkir, sewa tikar dan lainnya untuk menambah perekonomian masyarakat.

Kemampuan pemda untuk meningkatkan nilai ketuhanan yaitu dengan memberikan dukungan moril dan materil serta memfasilitasi kegiatan sedekah laut dijadikan *event* pariwisata oleh pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisata ke wilayah Bantul baik

domestik maupun manca negara serta melibatkan tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

**b. Nilai Keindahan (Rasa)**

Nilai keindahan pantai yang ada di pesisir Bantul menjadikan Bantul salah satu tujuan wisata alam cukup favorit di Yogyakarta, biasanya mereka yang berkunjung melakukan wisata budaya di Yogyakarta melanjutkan wisata alam di pantai pesisir Bantul. Keindahan alam yang dimiliki Bantul seperti Pantai Depok, Pantai Parangendog, Pantai Parangkusumo, Pantai Cemoro Sewu, Pantai Samas, Pantai Patihan, Pantai Pandansimo, Pantai Kuwaru dan Pantai Goa Cemara. Dengan menikmati alam laut yang indah dan pemandangan yang asri dapat memenuhi kebutuhan estetika dari masyarakat, sehingga pantai Bantul menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Bantul, Yogyakarta, Indonesia bahkan mancanegara.

Meningkatkan rasa cinta masyarakat Bantul kepada laut di sektor pariwisata dilakukan dengan meningkatkan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata dengan memperbanyak *event-event* dan meningkatkan kualitas objek wisata yang berbeda dengan objek wisata maritim di wilayah lain, kegiatan ini diperlukan anggaran untuk mengadakan *event-event* dan sarana dan prasarana yang mempermudah akses dan ketertarikan para wisatawan dan sumber daya aparatur yang mengerti sapa pesona, di mana selama ini masih sangat minim.

Pemda Bantul juga melaksanakan penanaman nilai maritim yang dengan bekerjasama dengan Posal Samas terhadap siswa menengah dengan tergabung dengan saka bahari, diajarkan untuk lebih mencintai laut. Kegiatan penanaman nilai maritim hanya dirasakan oleh siswa yang ikut saka bahari saja, perlu ditingkatkan ke seluruh sekolah agar terdapat kelompok cinta laut.

Kegiatan gemar makan ikan dan perlombaan menggambar serta mewarnai tema laut dilakukan kurang menggema di masyarakat, diperlukan kegiatan yang lebih besar dan rutin supaya selalu diingat oleh masyarakat Bantul.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap laut dapat dilihat dari sampah yang selalu menjadi masalah di pesisir pantai Bantul, perburuan daging dan telur penyu masih dilakukan oleh masyarakat serta perusakan hutan mangrove, pohon cemara serta gumukan pasir masih dilakukan padahal diperlukan untuk menjaga abrasi pantai

Kemampuan pemda Bantul untuk meningkatkan nilai keindahan (rasa) diperlukan anggaran yang cukup, SKPD yang khusus menangani bidang maritim, sumber daya manusia aparat pemda Bantul yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang maritim dan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, perguruan tinggi atau swasta dalam pelaksanaannya.

### **c. Nilai Kebenaran**

Nilai kebenaran adalah nilai yang bersumber pada akal manusia. Kesadaran manusia bahwa di laut terdapat sumber daya yang belum dimanfaatkan secara maksimal, maka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelolanya. Kemampuan pemda Bantul salah satunya melakukan penelitian guna memperkuat budaya maritim yang ada di masyarakat Bantul.

Pemda Bantul melaksanakan penelitian bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada tentang proses terjadinya gumukan pasir yang ada di pesisir pantai yang berguna untuk mencegah terjadinya erosi akibat ombak yang terjadi di pesisir pantai selatan Bantul. Dari hasil penelitian ternyata gumukan pasir dibawa dari pasir sungai yang mengalir ke laut menimbulkan gumukan pasir, kenyataannya sekarang banyak eksplorasi pasir di sungai secara ilegal sehingga gumukan pasir makin lama makin berkurang. Gumukan pasir selain sebagai

pencegah erosi juga sebagai tempat untuk wisata di mana digunakan oleh wisatawan sebagai tempat permainan seluncur.

Pada tahun 2010 penelitian oleh pemda Bantul juga bekerjasama dengan LAPAN dan Kemenristek mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya di pantai Pandansimo walaupun sampai saat ini proyek tersebut masih terbengkalai, tetapi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa angin yang kuat di pesisir pantai Bantul dapat dimanfaatkan menjadi listrik.

Kerjasama dengan pihak perguruan tinggi lebih ditingkatkan supaya dapat diketahui sumber daya maritim yang lainnya dan hasilnya lebih dirasakan oleh masyarakat.

#### **d. Nilai Kebajikan (Moral)**

Kemampuan pemda Bantul dalam meningkatkan nilai kebaikan yang ada di masyarakat pesisir Bantul adalah dengan ikut serta membina dan mendukung setiap kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya maritim diantaranya budaya gotong royong masih sangat kuat terutama dalam pelaksanaan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu mesin tempel ini. Mereka secara gotong royong bersama-sama masyarakat pesisir di mana ada yang sebagai pendorong dan nelayan. Nelayan dorong membantu saat para nelayan akan berangkat walaupun pembagian hasilnya dilakukan pada saat pulang melaut. Budaya gotong royong juga ada pada saat nelayan melakukan ritual sedekah laut di mana pelaksanaannya ditanggung bersama-sama dan sengaja dilaksanakan pada saat seminggu setelah hari raya Idul Fitri agar dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga yang sedang merantau.

Budaya silaturahmi juga dilakukan oleh kelompok nelayan atau pengelola kawasan pantai dengan dibentuknya kelompok usaha bersama (KUB) Mina Bahari 45 yang menyepakati pertemuan rutin kelompok setiap 35 hari sekali dengan aktivitas diskusi atau

menyampaikan permasalahan yang ada serta kegiatan simpan pinjam, dengan mengundang aparat pemerintah.

Budaya menghormati orang tua dan orang yang dituakan seperti tokoh adat maupun tokoh agama masih dipegang oleh masyarakat pesisir Bantul, mereka mendapat posisi terhormat di dalam masyarakat bahkan tidak jarang diminta pendapatnya jika terdapat permasalahan untuk menyelesaikannya, dan hasilnya diakui oleh pemerintah setempat.

Pemda Bantul mendukung dan mempertahankan budaya maritim yang sudah baik ini sehingga dapat terjaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya dan bekerjasama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama maupun tokoh pemuda.

#### **4.3.2.1.3 Kemampuan Meningkatkan Nilai Vital**

Pemda Bantul dalam meningkatkan nilai vitalnya diharapkan masyarakat pesisir Bantul dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil maupun rohani menjadikan laut sebagai kebutuhan vital, di mana tanpa laut mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pembangunan sektor maritim lebih diarahkan kepada pariwisata pantai, Pengembangan pariwisata maritim dapat mempunyai efek berganda (*multiplier effect*) di mana di sektor ini banyak menyerap tenaga kerja yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan devisa bagi negara dan dapat mendorong konservasi lingkungan serta mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Sedangkan sektor perikanan tangkap masih dianggap memerlukan biaya yang sangat besar terutama dalam penyediaan kapal besar dan dermaga tempat tambat dan bongkar ikan. Tetapi pada kenyataanya pariwisata maritim di Bantul masih dikelola dengan sangat tradisional, pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya dengan pengetahuan dan keterampilan yang rendah dalam sektor pariwisata belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata.

Untuk meningkatkan nilai vital pemda Bantul harus mampu meningkatkan sumber daya maritim untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya baik jasmani maupun rohani sehingga masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya maritimnya.

#### **4.3.2.2 Kemampuan Meningkatkan Norma Maritim Masyarakat**

Meningkatkan tugas pemda Bantul dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengatur pemanfaatan sumber daya maritim baik aturan yang tidak tertulis maupun tertulis dalam bentuk norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat, diantaranya :

##### **4.3.2.2.1 Kemampuan Meningkatkan Norma Kesopanan**

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Norma kesopanan yang ada di masyarakat Bantul sebagai masyarakat timur masih memegang teguh nilai kesopanan cara berpakaian terutama di pantai jangan sekali-kali memakai pakaian yang minim seperti bikini, dan tidak berkata-kata kotor. Norma sopan santun sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat, karena norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Sekali saja ada pelanggaran terhadap norma kesopanan, pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat, semisal cemoohan. kesopanan merupakan tuntutan dalam hidup bersama.

Meningkatkan norma kesopanan yang ada di pesisir pantai Bantul pemda Bantul bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama agar norma yang sudah baik ini dapat dirasakan oleh generasi penerus.

##### **4.3.2.2.2 Kemampuan Meningkatkan Norma Kesusilaan**

Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Tujuan norma

kesusilaan, yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Sanksi bagi pelanggarnya, yaitu rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi pelanggarnya. Norma kesusilaan yang ada di Bantul adalah menghormati orang yang lebih tua dan dituakan.

Penghormatan kepada orang tua dapat dilihat dari acara ritual sedekah laut dilaksanakan dalam rangka menghormati orang tua mereka yang biasa melakukannya, masyarakat Bantul juga sangat menghormati tokoh adat dan tokoh agamanya dengan menempatkan pada posisi terhormat. Pemda Bantul mengakui totoh agama, adat dan tokoh pemuda di mana setiap melaksanakan programnya selalu melibatkan tokoh-tokoh ini.

Norma kesusilaan yang ada di pesisir pantai Bantul dijaga dan dipertahankan oleh pemda Bantul bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama agar norma yang sudah baik ini dapat dirasakan oleh generasi penerus.

#### **4.3.2.2.3 Kemampuan Meningkatkan Norma Agama**

Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran. Sedekah laut juga merupakan identitas dari masyarakat yang ada di pesisir pantai dalam rangka ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan dan rezeki yang didapat dari laut, walaupun di beberapa tempat di Indonesia sudah jarang dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan norma agama. Beberapa ulama menganggap bahwa kegiatan labuhan dianggap bid'ah bahkan mendekati syirik. Situasi seperti tentu diperlukan kebijaksanaan para tokoh agama untuk melihat dari sudut pandang mana. Untuk di Bantul sendiri tokoh agamanya mendukung kegiatan labuhan ini, tokoh agama menyampaikan bahwa yang paling utamanya kita meminta kepada Tuhan (Allah) bukan kepada yang lainnya.

Pemda Bantul selaku pembina masyarakat mendukung dan mengakui peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga selalu dilibatkan dalam

kegiatan tradisi sedekah laut ini, dan selalu mempertahankan agar tradisi ini selalu ada.

#### **4.3.2.2.4 Kemampuan Meningkatkan Norma Hukum**

Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Objek wisata di pantai Bantul harus tetap dijaga dan dipertahankan kelestariaanya, oleh sebab itu norma hukum harus dibuat oleh pemda Bantul untuk menjaga sumber daya maritimnya.

Salah satu objek wisata di pantai Di Pantai Patihan juga merupakan salah satu pantai yang menjadi lokasi pendaratan penyu lelang/abu-abu. Menurut Budjantoro dan Wijayanti (2013) penyu ini merupakan salah satu dari 7 jenis penyu yang masih bertahan hidup di dunia. Penyu tersebut secara periodik di akhir musim kemarau mendekati musim hujan mendarat dan bertelur di pantai Patihan dan beberapa di pantai sekitar. Perburuan telur dan daging penyu masih ada yang dilakukan oleh masyarakat Bantul.

Di pantai Baros juga terdapat hutan mangrove dan hutan cemara yang berfungsi untuk menjaga abrasi pantai tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menebang pohon tersebut di mana lahannya untuk dijadikan tambak.

Pemda Bantul belum mampu memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar norma hukum sehingga belum memberikan efek jera kepada yang melanggarnya. Pemda Bantul harus membuat aturan yang tegas dan memberikan sanksi serta bekerja sama dengan instansi lain yang punya kewenangan penegakan hukum.

#### **4.3.2.2.5. Kemampuan Meningkatkan Norma Kebiasaan**

Norma Kebiasaan adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dengan bentuk yang sama, secara sadar dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Norma kebiasaan dapat

juga diartikan sebagai norma yang keberadaannya dalam masyarakat dapat diterima sebagai bentuk aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan pemerintah. Umumnya kebiasaan sering disamakan dengan adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang telah lama ada dalam masyarakat. Norma kebiasaan dari masyarakat Bantul adalah pelaksanaan kegiatan sedekah laut yang tujuannya merupakan rasa syukur terhadap Tuhan karena telah memberikan rezeki lewat laut.

Masyarakat Bantul juga sangat mengsakralkan hari jumat kliwon sehingga pada hari itu dilarang nelayan untuk pergi ke laut. Pada hari tersebut masyarakat melakukan yasinan atau berdoa bersama untuk meminta rezeki dan keselamatan.

Norma kebiasaan yang lainnya adalah aturan pembagian hasil melaut dibagi dengan cara : pendapatan melaut dipotong dengan biaya operasional menjadi pendapatan bersih. Pendapatan bersih dipotong 7% untuk pendorong, 2% retribusi pemda Bantul dan 3% untuk Kas TPI. Hasil bersih 88% masih dibagi dua antara nelayan dan pemilik perahu. Untuk pendapatan kotor hasil tangkapan ikan kurang dari Rp.250.000 maka pemilik perahu tidak mendapat bagian. Aturan ini sudah menjadi kesepakatan diantara nelayan dan pemilik perahu, jika pendapatan melaut (kotor) Rp.250.000 maka pendapatan netto (bersih) setelah dipotong dana operasional terutama BBM dan biaya makan sisa sekitar Rp.50.000, dengan pendapatan seperti ini pemilik perahu merelakan kepada nelayan tanpa harus dibagi dua. Kebiasaan ini dianggap baik dan masih dilaksanakan sampai saat ini karena pemilik kapal yang dianggap lebih mampu merelakan kepada nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saling percaya juga ada diantara mereka sehingga tidak saling mencurigai atau adanya perbuatan curang.

Norma kebiasaan yang sudah terjadi dalam masyarakat pesisir Bantul tetap dipertahankan dan didukung oleh pemda Bantul, sehingga tradisi maritim yang sudah ada tetap dapat dipertahankan bekerjasama dengan

tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama agar norma yang sudah baik ini dapat dirasakan oleh generasi penerus.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tahapan akhir pada metode *Soft Sistem Method* (SSM) adalah dengan mengaplikasikan hasil penelitian, berkaitan dengan *action to improve the problematic situation*. Tahap ini merupakan tahapan dalam rangka melaksanakan tindakan yang dapat memberikan perbaikan terhadap situasi yang dianggap problematik. Tahapan ini juga menjelaskan mengenai tindakan atau rekomendasi yang ditujukan kepada seluruh *owners* yang sudah ditentukan dalam tahapan kedua SSM, khususnya dalam peningkatan kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul dan fungsi pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul.

Penggunaan NVivo dan SSM dalam penelitian ini membantu peneliti dalam melakukan analisis. Tahapan yang disusun oleh Checkland dalam SSM untuk memudahkan proses analisis dengan cara bertahap dan komprehensif dengan struktursasi yang terdapat dalam tahap 1-7 SSM. NVivo merupakan piranti lunak yang membantu peneliti dalam mengolah data wawancara dan data lainnya. NVivo dapat memberikan kemudahan dalam melakukan *coding* sehingga dapat mendukung analisis dari data yang masih mentah yang telah dikelola dari transkrip wawancara.

##### **5.1.1 Meningkatkan Kesadaran Budaya Maritim Masyarakat Pesisir Bantul**

Meningkatkan kesadaran budaya maritim masyarakat pesisir Bantul dengan meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam pemanfaatan sumber daya maritim yang ada di Bantul sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya baik secara jasmani maupun rohani dan terbentuk aturan/norma yang mendukung pemanfaatan sumber daya maritim tersebut. Adapun yang menjadi faktor utama adalah

- a. Meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Bantul baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga sadar bahwa sumber daya maritim yang ada di Bantul belum dimanfaatkan secara maksimal.
- b. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pemanfaatan sumber daya maritim seperti kapal dan alat tangkapnya serta fasilitas kepelabuhan yang sekarang tidak ada begitu juga untuk pariwisata objek standar minimal kelayakan *destinasi* wisata yang saat ini sangat dirasakan masih kurang.
- c. Meningkatkan fasilitas permodalan wirausaha bagi pelaku pemanfaatan sumber daya maritim karena saat ini masih dikelola dengan cara yang tradisional
- d. Membuat program-program cinta dan kepedulian masyarakat terhadap laut serta penanaman nilai maritim sejak usia dini yang lebih komprehensif dimana saat ini masih kurang
- e. Pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma, aturan maupun hukum yang berkenaan dengan laut

### **5.1.2 Meningkatkan Fungsi Pemda Bantul Dalam Memperkuat Budaya Maritim Masyarakat Bantul**

Meningkatkan fungsi Pemda Bantul dalam memperkuat budaya maritim masyarakat Bantul dengan meningkatkan kemampuannya dalam pemanfaatan sumber daya maritim oleh masyarakat Bantul, diantaranya:

- a. Perlunya satuan kerja yang khusus menangani pemanfaatan sumber daya maritim sehingga lebih fokus dalam memanfaatkan sumber daya maritim
- b. Menyiapkan sumber daya manusia aparatur pemda yang memiliki kompetensi dan keterampilan sektor maritim
- c. Menyiapkan anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana pendukung serta program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program-program cinta laut dan penanaman nilai maritim sejak usia dini.

- d. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat dalam pemanfaatan sumber daya maritim.
- e. Membuat aturan-aturan yang mampu menjaga pelestarian lingkungan maritim dan pengaturan pemanfaatan sumber daya maritim serta mempertahankan norma maritim yang sudah ada

## **5.2 Saran**

Dari kesimpulan yang telah didapatkan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan yang membangun baik bagi para akademisi maupun praktisi sebagai berikut :

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Di penelitian ini telah dibuktikan teori meningkatkan nilai, norma dan budaya maritim, dapat digunakan dalam penelitian terkait pembangunan budaya maritim di kabupaten Bantul. Penggunaan SSM dan NVivo sangat membantu dalam penelitian untuk dapat menghasilkan analisis yang tajam dan terstruktur. Metode ini direkomendasikan untuk digunakan dalam penelitian kualitatif lainnya. Gap yang ditemukan dalam perbandingan model konseptual dengan realitas dapat dikembangkan menjadi penelitian lebih lanjut dengan pembahasan meningkatkan sumber daya manusia berkarakter maritim, sarana dan prasarana, anggaran yang cukup serta satuan kerja yang khusus menangani bidang maritim dan kerjasama antar instansi.

### **5.2.2 Saran Praktis**

- a. Perlu adanya dorongan terhadap Bupati Bantul untuk memvalidasi satuan kerja yang khusus menangani sektor maritim sehingga pembangunan sektor maritim lebih fokus dan terarah.
- b. Pemda Bantul memprioritaskan pembangunan sektor maritim dengan mengalokasikan anggaran yang cukup

- c. Pemda Bantul merekrut pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian dan kopetensi di bidang maritim, memperbanyak sekolah *vokasi* kemaritiman untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di bidang maritim.
- d. Pemda Bantul membuat program-program penanaman nilai kemaritiman seperti pengembangan kurikulum muatan lokal cinta laut dari usia dini hingga sekolah menengah atas dan memperbanyak *event-event* yang mendorong masyarakat datang ke laut.
- e. Pemda Bantul menyiapkan sarana dan prasarana melaut seperti pelabuhan, kapal serta alat tangkap dan pariwisata maritim serta mempertahankan budaya maritim yang sudah ada.
- f. Pemda Bantul meningkatkan kualitas kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, BUMN maupun Perguruan Tinggi dalam memanfaatkan sumber daya maritim yan ada di Bantul.
- g. Melibatkan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat dalam menjaga norma-norma maritim.
- h. Pemda Bantul membuat aturan-aturan yang mendukung pemanfaatan sumber daya maritim dan mempertahankan aturan yang sudah baik serta memberian sanksi tegas sesuai norma yang ada terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran baik secara sosial maupun hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, S . (2016). Melindungi Negara, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bandur, A. (2016). Penelitian Kualitatif dengan Menggunakan NVivo, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Checkland, Peter B. & Poulter, J., (2006), *Learning for Action: A short definitive account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners, teachers and Students*, England: John Wiley& Sons Ltd, The Atrium Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ.
- Checkland, Peter B. and Scholes, J., (1990), *Soft Systems Methodology in Action*, England: John Wiley & Sons Ltd.
- Checkland, Peter B and Poulter, J., (2006). *Learning for Action*. England (GB): John Wiley & Sons Ltd.
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). *Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory Into Practice*.
- Creswell, J.W. (2016) Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (1984), *The Constitution of Society : Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press.
- \_\_\_\_\_ (1995). *The Constitution of Society*, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial. Pedati.
- Gulo W. (1982). Pengantar Psikologi. Salatiga: Penerbit UKSW.
- Hardjosoekarto. S. (2012). *Soft Systems Methodology*. Jakarta: UI Press. Jakarta.
- Kansil, C.S.T.(1989) Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka.
- Hasibuan. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketujuh. Belas. Jakarta. Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. (1979). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

- Limbong, (2015), Poros Maritim, Edisi 1, Cetakan 1, PT Dharma Karya Karsa Utama, Jakarta.
- Malinowski, B. (1983). Dinamika bagi Perubahan Budaya. Malaysia: Satu Penyiasatan Mengenai Perhubungan Ras di Afrika. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Marsetio. (2014). Sea Power Indonesia. Jakarta: Universitas Pertahanan
- Muhamad, Simela Victor. (2014). Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. Info Singkat Hubungan Internasional.
- Nawawi H. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Nurseno. (2007). Sosiologi 2, Solo: PT. Tiga serangkai Pustaka Mandiri.
- Octavian, A. dan Yulianto, B. (2014) Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim. Jakarta : Universitas Pertahanan.
- Reid, A. (2011) Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ricklefs, et al. (2013) Sejarah Asia Tenggara. Jakarta :Komunitas Bambu.
- Satria, A. (2002). Pengantar sosiologi masyarakat pesisir. Penerbit Cidesindo.
- Soekanto, S. (1996) Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, N. (1992). Ilmu Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Sugiyono. (2016) Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suropati, Untung (2016). Global Maritime Nexus: Indonesia's 21st Century Maritime Vision. Naskah Kuliah Umum di LEMHANNAS pada tanggal 19 Mei 2016.
- Tubbs, Steward L. (2001). Human Communications: Konteks-konteks Komunikasi (Buku Kedua). Bandung: Rosdakarya

- Umar, H. (2001). *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Wahyuni, Sri Niniek dan Yusniati. (2004). *Manusia dan Masyarakat*. Bandung: Ganeca Exact.
- Wolters, O.W. (2011) *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya & perniagaan Dunia Abad III - Abad I*. Jakarta : Komunitas Bambu.

### **Jurnal Ilmiah**

- Ames, T. (2013). *Maritime Culture In The Western Pacific*, *Journal Pacific Asia Inquiry*.
- Budjantoro dan Wijayanti. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Ekowisata Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara Patihan Gadingsari Sanden Bantul*. *Jurnal Riset Daerah*.
- Bueger, C. (2015). *What is Maritime Security?. Marine Policy Volume 53, March 2015*.
- Octavian,A. dan Yulianto,B. (2014). *Degradasi Kebudayaan Maritim: Sejarah, Identitas, dan Praktik Sosial Melaut di Banten*, *Jurnal LIPI*.
- Ramdhan, M. dan Arifin, T.(2013). *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia (Application of Geographic Information System for Assessment of Indonesia Marine Proportion)*, *Jurnal BIG*.
- Yuliati. (2014). *Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim (Jalesveva Jayamahe)*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.

### **Dokumen**

- Kabupaten Bantul Dalam Angka 2016.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 2017. *Indonesia Poros Maritim Dunia*. Presentasi
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul*.

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi dinas Pariwisata.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 127 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Bantul tahun 2010–2030.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
- Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2015, Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dengan membawahi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pariwisata.
- Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul 2016-2021.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 2017.
- Territorial Zee En Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) Staatsblad 1939.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 4/PRP tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **Internet**

BIG, 2015. *Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi*. Dipetik Agustus 8, 2017, dari <http://bakosurtanal.go.id/assets/galleries/BedahBuku/GeoMaritimBookFinalLite.pdf>.

BPS. 2013. Laporan Hasil ST 2013 Nasional - Sensus Pertanian 2013 dipetik pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 21.30 dari <https://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/at0000.pdf>.

HIMAPER IPB. 2017. Peringatan Hari Nelayan Nasional 2017. Dipetik pada tanggal 10 Agustus 2017 Pukul 13.00 dari <http://himasper.lk.ipb.ac.id/harinelayan17>.

Kata Data. 2017. Angka Konsumsi Ikan Indonesia Masih Rendah. Dipetik pada tanggal 12 Agustus 2017 Pukul 13.00 dari <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/09/angka-konsumsi-ikan-indonesia-masih-rendah>.

Kuntarti, Sri Dewi. 2015. Indonesia As the World's Maritime Fulcrum: What Are The Beneficial And How To Achieve It?. Dipetik pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 10.00 dari <https://sridewikuntarti.wordpress.com/2015/04/18/indonesia-as-the-worlds-maritime-axis-what-are-the-beneficial-and-how-to-achieve-it/>

Pushidrosal, Jumlah Terbaru Pulau Milik Indonesia Versi Survei Pushidrosal, dipetik tanggal 20 Agustus 2018 pukul 19.00.

<https://www.liputan6.com/regional/read/2994344/jumlah-terbaru-pulau-milik-indonesia-versi-survei-pushidrosal>

Said, Budiman Djoko. 2016. Pengertian Strategic (Strategic Insight) tentang poros maritim. Dipetik pada tanggal 19 Agustus 2017 pukul 10.30 dari <http://www.fkpmar.org/pengertian-strategic-strategic-insight-tentang-poros-maritim>.

Sekretariat Kabinet RI. 2014. Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014. Dipetik pada tanggal 12 Agustus 2017 pukul 19.00 dari <http://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014>.

Tim Sosiologi, 2007, Interaksi Sosial (Pengertian, Syarat, Ciri, Faktor, Bentuk dan Jenis). Dipetik pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 18.00 dari <http://www.davishare.com/2015/01/interaksi-sosial-pengertian-syarat-ciri.html>.

### **Tesis**

Mardani R. (2017) Pariwisata Maritim dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Maritim Perspektif Keamanan Maritim. Tesis. Universitas Pertahanan.

Istriyani. (2012) Pengaruh Persepsi Pada Pekerjaan, Persepsi Pada Pertumbuhan Ekonomi Kawasan dan Persepsi Pada Pelayanan Publik Terhadap Motivasi Kerja dan Partisipasi Nelayan Kapal di INKA MINA di Kabupaten Bantul.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar L1 Foto bersama Priyanto, ST selaku Kabid Ekonomi Sarana dan Prasarana Bappeda Bantul



Gambar L2 Foto bersama Istriyani, MSc. selaku Kabid Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Bantul



Gambar L3 Foto bersama Ratri Nengsih, MSc., Selaku Kabid Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Bantul



Gambar L4 Foto bersama Pak Mujahid Selaku Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Bantul Beserta Staf



Gambar L5 Foto Bapak Sadino selaku Ketua Pokmaswas Mino Samodro



Gambar L6 Foto Bersama Oky Setiawan selaku Ketua Kelompok Nelayan dan Konservasi Penyu



Gambar L7 Foto bersama Suranto (Kanan) Penjual Makanan Selaku Masyarakat Pesisir Bantul



Gambar L8 Foto bersama Kevin selaku Pemuda Saka Bahari

**PERTANYAAN PENELITIAN**

	<b>Pertanyaan Penelitian</b>	<b>Pertanyaan Operasional</b>	<b>Tujuan dan Relevansi</b>	<b>Informan atau Narasumber</b>
<b>1</b>	<b>Bagaimana meningkatkan kesadaran budaya maritim yang ada di masyarakat pesisir Bantul</b>	<b>Nilai Material</b>		
		1. Bagaimana memanfaatkan laut sehingga mampu memenuhi kebutuhan jasmani sehari-hari  2. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu memanfaatkan laut untuk kebutuhan jasmani masyarakat	Mengetahui nilai material yang ada di masyarakat	1. Masyarakat pesisir Bantul  2. Pemda Bantul dan Akademisi
		<b>Nilai Rohani</b>		
		1. Bagaimana cara menunjukkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap laut?	Mengetahui nilai rohani yang ada di masyarakat	1. Masyarakat pesisir Bantul

		<p>2. Bagaimana keyakinan anda bahwa Tuhan memberikan rezeki lewat laut</p> <p>3. Bagaimana meningkatkan keyakinan dan kepedulian masyarakat bahwa di laut terdapat sumberdaya yang melimpah?</p> <p>4. Bagaimana meningkatkan kecintaan dan kepedulian masyarakat terhadap laut?</p>		<p>2. Masyarakat pesisir Bantul</p> <p>3. Pemda Bantul dan Akademisi</p> <p>4. Pemda Bantul dan Akademisi</p>
<b>Nilai Vital</b>				
		<p>Apakah sumberdaya maritim sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?</p>	<p>Mengetahui nilai vital yang ada di masyarakat</p>	<p>Masyarakat pesisir dan Pemda Bantul</p>

		<b>Norma Maritim</b>		
		<p>1. Aturan-aturan apa saja yang mengatur dalam pemanfaatan sumberdaya maritim?</p> <p>2. Bagaimana pemda bantul meningkatkan aturan-aturan agar ditaati oleh masyarakat</p>	<p>Untuk mengetahui norma maritim yang ada di masyarakat</p>	<p>1. Masyarakat pesisir Bantul</p> <p>2. Pemda Bantul</p>
<b>2</b>	<b>Bagaimana meningkatkan fungsi pemda Bantul dalam memperkuat nilai dan norma maritim masyarakat Bantul?</b>	<b>Nilai Material</b>		
		<p>Bagaimana meningkatkan kemampuan Pemda Bantul dalam melakukan pemanfaatan sumberdaya maritim agar bermanfaat secara material?</p>	<p>Mengetahui nilai material yang ada di masyarakat</p>	<p>Bapedda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Kelautan serta SMKN 1 Sanden</p>

<b>Nilai Rohani</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana meningkatkan kemampuan Pemda Bantul agar masyarakat cinta dan peduli terhadap sumberdaya maritim?</li> <li>2. Bagaimana meningkatkan kemampuan pemda dalam meyakinkan masyarakat bahwa laut merupakan sumberdaya yang melimpah?</li> <li>3. Bagaimana meningkatkan kemampuan pemda dalam meyakinkan masyarakat bahwa tuhan memberikan rezeki lewat laut?</li> </ol>	<p>Mengetahui nilai rohani yang ada di masyarakat</p> <p>Bapedda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, SMKN 1 Sanden serta Posal Samas</p>

		<b>Nilai Vital</b>		
		Bagaimana kemampuan pemda dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya maritim secara maksimal sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat?	Mengetahui nilai vital yang ada di masyarakat	Pemda Bantul
		<b>Norma Maritim</b>		
		Bagaimana meningkatkan kemampuan pemda bantul agar aturan-aturan yang mengatur pemanfaatan sumberdaya maritim ditaati oleh masyarakat?	Untuk mengetahui norma maritim yang ada di masyarakat	Pemda Bantul